

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 2005 - 2025

DIPERBANYAK DAN DIDISTRIBUSIKAN OLEH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

1.1.1. Sejarah Singkat Terbentuknya Kabupaten Barito Kuala

Kabupaten Barito Kuala dengan Ibukotanya Marabahan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang sebelumnya daerah ini berstatus Kawedanaan dibawah Kabupaten Banjar. Mengingat luas wilayah, jumlah penduduk dan perkembangannya, potensi ekonomi yang dimiliki serta kondisi lainnya yang menunjang daerah ini untuk diangkat menjadi Daerah Otonom Tingkat II, maka oleh para tokoh masyarakat di daerah ini diperjuangkan agar menjadi Daerah Tingkat II yang berotonomi.

Proses perjuangan menjadikan Marabahan menjadi Daerah Kabupaten dimulai sejak tanggal 17 Pebruari 1957 yaitu dengan dibentuknya Panitia gabungan Partai/Organisasi Penuntut Kabupaten (diketuai oleh M. JALALUDDIN dan IMANSYAH sebagai penulis), bersamaan pula dengan dikeluarkannya resolusi oleh Kerukunan Keluarga Bakumpai (KKB) kepada Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan tentang tuntutan supaya kewedanaan Marabahan dijadikan Daerah Otonom Tingkat II.

Berbagai usaha ditempuh guna mewujudkan tuntutan tersebut beberapa peristiwa yang patut dicatat sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala Nomor 11/Kpts/DPRD-Batola/1997, antara lain :

(a) Tanggal 17 Pebruari 1957

Telah terbentuk Panitia Penuntutan Kabupaten Daerah Otonom Tingkat II yang diketuai oleh M. Jalaluddin dan Sekretarisnya Imansyah. Pada waktu itu juga Kerukunan Keluarga Bakumpai (KKB) ikut mengajukan tuntutan agar Kewedanan Marabahan dapat ditingkatkan menjadi kabupaten.

(b) Tanggal 15 Maret 1957

Panitia Penuntut Kabupaten mengadakan rapat yang dihadiri oleh Partai Politik dan Organisasi Masa untuk menyusun resolusi yang isinya memohon kepada Pemerintah agar kewedanaan Marabahan dapat ditingkatkan menjadi Daerah Otonom Tingkat II yang diberi nama kabupaten dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

(c) Tanggal 1 Juni 1957

Panitia Penuntut kabupaten mengadakan rapat untuk menentukan sikap dengan dibentuknya Propinsi Kalimantan Tengah.

(d) Bulan Juli 1957

Membentuk Panitia Penampung Hasrat Rakyat Marabahan dengan Ketua H. Marli Hasan, Wakil Ketua M. Jalaludin dan Sekretaris H. Syarkani. AB.

(e) Tanggal 15 Juli 1957

Panitia Penampungan Hasrat Rakyat Marabahan mengadakan rapat umum di Pasar Marabahan dengan kesimpulan apabila tuntutan menjadi kabupaten tidak berhasil, masih terbuka jalan untuk menjadi kabupaten di Kalimantan Tengah.

(f) Tanggal 17 Juli 1957

Presiden Soekarno berkunjung ke Banjarmasin dan menanggapi cara tuntutan Panitia Penampungan Hasrat Rakyat Marabahan yang menyatakan akan masuk Kalimantan Tengah dengan perkataan : "*Mis Begrifven Demokrasi*". Akibat adanya tanggapan presiden tersebut, maka komando P.D.M. Martapura Letnan H. Muhammad Noor bersama Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banjar yang diwakili oleh H. Mukerad Bakeri, Ketua DPRD Bidang Ekonomi datang ke Marabahan untuk melihat secara dekat keadaan situasi Marabahan, namun kenyataannya Marabahan tetap aman.

(g) Tanggal 18 Juli 1957

Sebagian pengurus mengundurkan diri dari kepanitiaan.

(h) Tanggal 20 Juli 1957

Mukrad Bakeri dan Wedana Mustafa Ideham memberi penjelasan kepada tokoh masyarakat untung ruginya masuk Kalimantan Tengah.

(i) Tanggal 24 Juli 1957

Diadakan rapat untuk melengkapi personalia Panitia Gabungan Partai Politik diadakan Organisasi Massa Penuntut Kabupaten dengan susunan panitia baru sebagai berikut :

- Ketua : BAIDILLAH
- Wakil Ketua : M. TAOSUN MA'RUF
- Penulis I : ANANG ASRAN
- Penulis II : DARMANSYAH
- Bendahara : MAKSUM
- Pembantu : Semua anggota partai/organisasi yang ada.

(j) Bulan Agustus 1957

DPRDP Kabupaten Banjar mengadakan kunjungan ke Marabahan sekaligus berdialog dengan tokoh masyarakat, pamong praja dan parpol/ormas.

(k) Tanggal 8 Agutus 1957

DPRDP Kabupaten Banjar dalam sidangnya mengambil keputusan yang isinya pada Pemerintah Pusat agar Daerah Swatantra Tingkat II Kabupaten Banjar dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah sebagai berikut :

- Kabupaten Banjar Barat meliputi Kewedanan Kayu Tangi;
- Kabupaten Banjar Tengah meliputi Kewedanan Ulin;
- Kabupaten Banjar Timur meliputi Kewedanan Barito Kuala.

(l) Tanggal 19 Agustus 1957

DPRDP Propinsi Kalimantan Selatan dalam sidangnya hanya dapat menyetujui 2 (dua) Daerah Swatantra tingkat II saja, yaitu :

- Kabupaten Banjar Barat meliputi kewedanan Kayu Tangi, Tanah Laut dan Ulin;
- Kabupaten Banjar Timur meliputi Kewedanaan Barito Kuala.

(m) Tanggal 30 Oktober 1957

DPRDP Kabupaten Banjar membuat resolusi yang isinya mendesak kepada DPRDP Propinsi Kalimantan Selatan agar meninjau kembali keputusannya tanggal 19 Agustus 1957 dengan memperhatikan Keputusan DPRD Kabupaten Banjar tanggal 8 Agustus 1957. Pada hari itu juga datang ke Kalimantan Selatan 2 (dua) orang dari Biro Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri yaitu Drs. Husin dan Mr. Parengkuan.. Kedua utusan tersebut mengadakan pertemuan di Barabai dengan wakil-wakil daerah yang mengajukan permintaan otonomi daerah tingkat II. Mukerad Bakeri, anggota DPD Kabupaten Banjar mewakili Marabahan. Setelah terjadi dialog yang mendalam, oleh utusan dinyatakan tuntutannya akan diperhatikan apabila data-data yang lengkap tentang Marabahan dapat diserahkan sebelum utusan kembali ke Jakarta.

(n) Tanggal 1 Nopember 1957

Mukrad Bakeri bersama-sama dengan Sekretaris Pemda Propinsi Kalimantan Selatan (M. Burhan Noor) menyerahkan data-data dimaksud kepada Utusan Departemen Dalam Negeri di Landasan Ulin.

(o) Bulan Nopember 1957

Di luar daerah kerukunan Keluarga Bakumpai (KKB) juga turut berjuang dengan cara mengadakan pendekatan dengan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan.

(p) Bulan 24 Nopember 1957

Mukerad Bakeri memberikan penjelasan kepada Panitia Gabungan tentang Pembentukan Kabupaten.

(q) Tanggal 18 Januari 1958

Panitia gabugan memberikan kuasa kepada Anggota Dewan Nasional, yaitu :

- H. Hasan Basri, Letkol Inf. Dan Resimen Infanteri 21/LAM di Banjarmasin.
- Cilik Riwut, Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah. Untuk membantu memperjuangkan kepada Menteri Dalam Negeri agar Kabupaten Marabahan dapat diresmikan bersama-sama Kabupaten Barabai dan Kabupaten Kota Waringin.

(r) Tanggal 12 April 1958

Anggota DPR-RI Seksi 6 (Kementerian Dalam Negeri) datang ke Kalimantan Selatan dan meninjau Marabahan. Rombongan terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu Handoko, Hasan Baseri dan Nuncik AR. Rombongan didampingi oleh Mukerad Bakeri dengan menumpang KM Bido. Laporan disusun di kapal sewaktu dalam perjalanan pulang ke Banjarmasin dengan isinya mendukung hasrat masyarakat Marabahan untuk dijadikan Daerah Otonomi Tingkat II.

(s) Tanggal 17 Oktober 1958

Bertempat di Sekolah Rakyat (SR) VI Tahun Marabahan diadakan rapat pembaharuan Pengurus Gabungan Partai/Organisasi dengan susunan kepengurusan adalah sebagai berikut :

Ketua I	:	BAIDILAH
Ketua II	:	M. TAUSOEN MA'RUF
Ketua III	:	ASRANUDDIN
Penulis I	:	DARMANSYAH/ANANG ASRAN
Penulis II	:	MANUAR
Bendahara I	:	MAWARDI
Bendahara II	:	MAKSUM

(t) Tanggal 11 Mei 1959

DPR RI menerima baik Rencana Undang-Undang Pembagian Kabupaten di Kalimantan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tanggal 4 Juli 1959 Daerah Tingkat II Barito Kuala dengan ibukotanya Marabahan disetujui oleh Pemerintah.

(u) Tanggal 6 September 1959

Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menunjuk Patih Akhmad Yunan untuk mempersiapkan pembentukan Kantor Daerah Swatantra Tingkat II Barito Kuala di Marabahan. Dan sebelum diresmikan dibentuklah Panitia dengan ketua H. Kesuma Yuda dibantu oleh beberapa orang.

(v) Tanggal 4 Januari 1960

Akhirnya Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan (H. Maksid), meresmikan Daerah Tingkat II Barito Kuala di Marabahan dan hingga sampai sekarang pada tanggal 4 Januari diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala.

1.1.2. Pengertian dan Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ini selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat makro dengan cakupan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan.

Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menurut ketentuan yang berlaku melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut :

Pertama, Penyiapan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan kegiatan yang dibutuhkan guna mendapat gambaran awal dari visi, misi, dan arah pembangunan daerah.

Kedua, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang Daerah dilaksanakan untuk mendapat masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

***Ketiga*,** Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan seluruh masukan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah menjadi masukan utama dan penyempurnaan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjadi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

***Keempat*,** Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dibawah koordinasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi hukum. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD sebagai inisiatif Pemerintah Daerah untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
h. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

k. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2005 - 2025

1.3. Hubungan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.3.1. Hubungan RPJPD Kabupaten Barito Kuala dan RPJPD Kalimantan Selatan dan RPJP Nasional

Perencanaan pembangunan Kabupaten Barito Kuala tidak terlepas dari hierarki perencanaan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang SPPN bahwa pemerintah daerah, diamanatkan untuk menyusun RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 tahun. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan tersebut, maka penyusunan RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025 mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang tercantum pada RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025, dan RPJP Nasional Tahun 2005-2025

1.3.2. Hubungan RPJPD Kabupaten Barito Kuala dan RPJMD

RPJPD Kabupaten Barito Kuala sebagai pedoman dalam penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah, serta menjadi acuan bagi Kepala Daerah terpilih dalam menyusun strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan RPJMD. RPJPD Kabupaten Barito Kuala juga menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat Barito Kuala yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah, swasta, dan segenap warga masyarakat menuju pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab.

1.3.3. Hubungan RPJPD dan RTRW Kabupaten Barito Kuala

RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025 merupakan perencanaan yang bersifat *makro, filosofis, dan visioner* yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang dalam proses penyusunannya dilakukan secara partisipasif dan melibatkan seluruh

pemangku kepentingan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam wilayah administrasi Kabupaten Barito Kuala dengan memanfatkan seluruh ruang daratan, lautan dan udara. RTRW Kabupaten Barito Kuala memuat rencana penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah sesuai dengan arah kebijakan RPJP Daerah Kabupaten Barito Kuala. Dengan demikian RPJPD Kabupaten Barito Kuala tidak dapat dipisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala 2005-2025 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi. Mengacu Undang-Undang diatas mempunyai makna bahwa rencana yang disusun berarti mengupayakan pengembangan daerah secara optimal sesuai dengan potensi dan kemampuan serta kebutuhan nyata kabupaten selaras dengan pengembangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat, dan hubungan antar provinsi serta hubungan antar kabupaten/kota merupakan peluang bagi terbangunnya sinergi yang lebih mantap agar seluruh kegiatan pembangunan terlaksana secara efektif dan efisien.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala 2005-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakaang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan dan maksud dan tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing.

BAB III ANALISA ISU – ISU STRATEGIS

Memuat Permasalahan Pembangunan dan isu strategis.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Memuat visi dan misi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan jangka panjang.

BAB V SASARAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Memuat sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang, tahapan dan prioritas.

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

Memuat hal-hal yang berhubungan dengan kedudukan dan fungsi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta beberapa hal menyangkut relevansi isi dokumen RPJPD.

1.5. Maksud dan Tujuan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Barito Kuala sebagai dokumen perencanaan pembangunan kabupaten untuk jangka waktu 20 tahun ke depan disusun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha), didalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Kabupaten sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Dengan adanya arah dan acuan ini maka seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan diharapkan menjadi bersifat sinergis dan terpadu serta dapat melengkapi satu sama lain baik didalam pola sikap maupun pola tindak.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Barito Kuala 2005-2025 ini menjadi acuan bagi calon Kepala Daerah (Bupati) dalam membuat Visi dan Misinya yang implementasinya akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka lima tahun sesuai masa bhakti Kepala Daerah. Program dan kegiatan yang direncanakan dibuat sesuai dengan batas kewenangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas keuangan daerah. Hal ini diterapkan agar terjadi kesinambungan dalam pembangunan daerah yang tujuan akhirnya adalah terciptanya kesejahteraan rakyat yang adil dan merata sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi

a. Letak dan Batas Wilayah

Secara geografis Kabupaten Barito Kuala terletak antara 114°20'50" - 114°50'18" Bujur Timur dan 2°29'50" - 3°30'18" Lintang Selatan. Kabupaten Barito Kuala terletak paling barat dari Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin.
- Sebelah Selatan dengan Laut Jawa
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin

Wilayah administrasi Kabupaten Barito Kuala dengan Marabahan sebagai ibukotanya terdiri atas 17 kecamatan dan 6 Kelurahan dan 194 Desa. Luas wilayah Kabupaten Barito Kuala 7,99 persen dari luas Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan luasnya 2.996,96 km^2 atau 299.696 Hektar. (tampilkan dengan tabel luas wilayah masing-masing kecamatan)

b. Tofografi dan Morfologi

Dilihat dari topografi dan morfologi, Kabupaten Barito Kuala merupakan hamparan wilayah dengan tofografi datar sampai landai (0% - 2%), dengan ketinggian 1 – 3 Meter dari permukaan laut (dpl), wilayah dataran rendah dan rawa pasang surut.

c. Geologi

Berdasarkan Peta Geologi lembar Banjarmasin Tahun 1966, faktor geologi Kabupaten Barito Kuala didominasi oleh endapan alluvial yang terdiri dari liat kaolinit debu bersisipan pasir, gambut, kerakal dan bongkahan lepas yang merupakan hasil endapan sungai dan rawa. Litologinya merupakan struktur geologi berupa pelapisan yang relatif horizontal dan tersusun oleh endapan alluvium muda pada Periode Kuarter dan Kala Holosen. Keberadaan tanggul sungai yang disertai dengan deposisi berangsur-angsur dan tidak seragam menyebabkan terbentuknya

cekungan atau depresi. Pada daerah - daerah seperti ini sering terbentuk endapan gambut dengan ketebalan yang bervariasi sesuai dengan kedalaman cekungan.

d. Jenis Tanah dan Tekstur Tanah

Jenis Tanah Kabupaten Barito Kuala terdiri dari Organosol dan Alluvial. Organosol meliputi kawasan seluas ± 101.900 Ha (34%) dan tanah Alluvial seluas 191.390 Ha (66%).

Tanah Organosol berwarna coklat hitam dan sering tanah ini disebut gambut atau peat (bahan yang mudah terbakar), tanah ini terbentuk dari serat tumbuh-tumbuhan yang mengalami proses pembusukan, sifat keasamannya sangat tinggi.

Tanah Alluvial berwarna coklat hijau, yang terbentuk dari endapan Alluvium yang bahan induknya berupa pasir dan lumpur yang dibawa dan diendapkan oleh arus sungai dari pedalaman. Tanah jenis ini terdapat di sepanjang Sungai Barito dan tepi Sungai Kapuas, berupa tanggul-tanggul dan juga pada beberapa meander sungai.

Tanah Alluvial ini menutupi areal seluas 191.390 Ha, atau lebih kurang 64% dari luas wilayah Kabupaten Barito Kuala dan merupakan daerah terbaik bagi pertanian pasang surut.

Tekstur Tanah di Kabupaten Barito Kuala sebanyak 284.706 Ha (95,00 %) bertekstur halus dan hampir menyebar diseluruh kecamatan. Sekitar 14.330 Ha (4,78 %) bertekstur sedang dan 660 Ha (0,22 %) dari luas Kabupaten Barito Kuala bertekstur kasar yang terdapat di Kecamatan Tabukan. Dengan demikian tekstur tanah pada wilayah Kabupaten Barito Kuala cukup baik dalam mengembangkan daerah ini untuk kegiatan pertanian.

e. Hidrologi

Wilayah Kabupaten Barito Kuala dilintasi 3 sungai utama yaitu Sungai Kapuas di sebelah Utara, Sungai Negara di sebelah Timur Laut dan Sungai Barito yang membentang dari utara ke selatan yang bermuara ke Laut Jawa, sungai ini membelah wilayah Kabupaten Barito Kuala. Disamping itu terdapat pula 3 buah terusan (anjir) sungai buatan yang menghubungkan Sungai Barito di sebelah Timur dan Sungai Kapuas di sebelah Barat yaitu Anjir Talaran, Anjir Serapat dan Anjir Tamban. Sungai-sungai besar dan anjir-anjir tersebut sangat mempengaruhi tata air yang ada di wilayah kabupaten ini.

Tata air juga sangat dipengaruhi oleh curah hujan dan tata guna lahan baik di daerah ini maupun di bagian hulu. Dalam musim hujan pada waktu pasang, air Sungai Barito dapat membanjiri sebagian besar wilayah dan mengakibatkan permukaan tanah tergenang.

Pasang surut juga mempengaruhi tata air yang ada, yang selalu bergerak naik turun mengikuti fluktuasi pasang surut air pada Sungai Barito dan Sungai Kapuas, gerak pasang surut ini terjadi 2 kali dalam 24 jam dan setiap harinya terlambat 50 menit sesuai dengan peredaran bulan. Perbedaan tinggi rendah permukaan air pada waktu pasang surut dapat mencapai 1-3 M.

f. Iklim

Kabupaten Barito Kuala juga beriklim tropis dengan dua musim. Menurut Klasifikasi Iklim Schimidt-Ferguson Kabupaten Barito Kuala termasuk daerah hujan tipe B dengan 1 - 2 bulan kering dalam setahun.

Berdasarkan data curah hujan (CH) dan hari hujan (HH) tahun 2003 – 2007, diketahui curah hujan rata-rata sebesar 2.374 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 134 hari/tahun. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dan terendah pada bulan Agustus, sedangkan jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember dan paling sedikit pada bulan Agustus dan September.

Temperatur rata-rata antara 26° C – 27° C, suhu tertinggi adalah 27,5° C terdapat pada bulan Oktober, sedangkan suhu terendah terjadi pada bulan Juli dengan suhu mencapai 26,5°C.

Curah hujan tertinggi di daerah ini pada tahun 2005 terjadi pada bulan Maret yaitu 3.164,5 mm sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan September yaitu 160,6 mm. Jumlah hari hujan selama tahun 2005 adalah 154 hari, terbanyak hari hujan terjadi pada bulan Maret dan bulan Desember yaitu 15 hari, sedangkan hari terjarang hari hujan terjadi pada bulan Juni dan September yaitu 3 hari.

g. Tata Guna Lahan

Tabel II.1

Tata Guna Lahan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005

No.	Penggunaan Lahan	Luas (ha)
(1)	(2)	(3)
1	Lahan sawah	
	a. Pasang surut	119.009
	b. Sementara tidak diusahakan	24.276
2	Lahan bukan sawah :	
	a. Lahan pekarangan	12.509

(1)	(2)	(3)
	b. Tegalan/ladang	12.115
	c. Pengembalaan ternak	9.139
	d. Perkebunan	19.503
	e. Lahan industri	2.024
	f. Kolam air tawar	54,9
	g. Tambak ikan	1.040
	h. Sementara tidak diusahakan	15.447
	i. Lain-lain	42.385
3	Hutan :	
	a. Kawasan linduung	1.500
	b. Hutan rakyat	43.986
	c. Hutan suaka alaam dan wisata	145
	d. Hutan konversi	26.050
Jumlah		**296.696,6**

Sumber : Profil Kab. Barito Kuala Tahun 2005

Bahan galian dan tambang di Kabupaten Barito Kuala, teridentifikasi atas bahan galian menurut golongan :

a. Golongan A, yaitu minyak bumi yang terdapat di Kecamatan Kuripan yang saat ini masih dilakukan penelitian di hulu Sungai Barito
b. Golongan C, yaitu pasir (terdapat di Kecamatan Alalak, Anjir Muara, Tamban dan Tabunganen) dan tanah liat (terdapat hampir di semua kecamatan). Namun kedua potensi ini masih belum dimanfaatkan secara optimal.

2.1.2. Demografi

a. Jumlah dan Kepadatan

Penduduk Kabupaten Barito Kuala tahun 2005 berjumlah 267.052 jiwa yang terdiri dari laki-laki 132.490 jiwa dan perempuan 134.490 jiwa dengan sex rasio sebesar 0,99 %, bila dibandingkan tahun 2004, Jumlah pertumbuhan penduduk Kabupaten Barito Kuala tahun ke tahun terus mengalami kenaikan dengan pertumbuhan antara 0,35 persen hingga 1,56 persen. Mayoritas kecamatan di Kabupaten Barito Kuala mengalami kenaikan jumlah penduduk, kecuali Kecamatan Tamban dan Kecamatan Tabunganen.

Kecamatan Tamban mengalami penurunan akibat banyaknya perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Kecamatan Tamban gulung tikar/bangkrut yang berujung adanya PHK besar-besaran terhadap karyawannya, sedangkan Kecamatan Tabunganen mengalami penurunan

akibat banyaknya rumah tangga/penduduk yang pindah. Kepadatan penduduk per km^2 di Kabupaten Barito Kuala adalah 86 jiwa.

Penduduk terpadat terdapat di Kecamatan Wanaraya dengan 367 jiwa per km^2 disusul Kecamatan Alalak 348 jiwa per km^2. Sedangkan kecamatan dengan penduduk terjarang terdapat di Kecamatan Kuripan yakni 17 jiwaa per km^2. Secara kuantitas Kecamatan Alalak dan Tamban merupakan kecamatan yang berpenduduk lebih besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya yaitu sebesar 39.029 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah kecamatan Kuripan yaitu sebesar 5.771 jiwa.

b. Persebaran Penduduk

Sebagaimana telah diutarakan pada bagian sebelumnya bahwa Kecamatan Tamban dan Alalak merupakan kecamatan dengan penduduuk terbesar dari 17 kecamatan di Kabupaten Barito Kuala. Sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil adalah Kecamatan Kuripan. Selengkapnya persebaran penduduk dapat dilihat pada tabel II.2 di bawah ini.

Tabel II.2

Data Persebaran Penduduk Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tabunganen	18.883	7,16
2	Tamban	39.494	13,58
3	Mekarsari	14.716	6,43
4	Anjir Pasar	15.283	5,84
5	Anjir Muara	18.641	7,11
6	Alalak	37.340	14,61
7	Mandastana	18.896	5,00
8	Belawang	12.232	4,61
9	Wanaraya	13.758	5,02
10	Rantau Badauh	10.876	4,07
11	Cerbon	6.738	2,73
12	Barambai	13.728	2,70
13	Bakumpai	8.419	3,31
14	Marabahan	16.616	7,28
15	Tabuukan	7.802	3,08
16	Kuripan	5.771	2,16
17	Jejangkit	7.264	2,72

Sumber : Profil Kab. Barito Kuala Tahun 2005

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Perekonomian Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (AHB) dalam kurun waktu 2001 sampai dengan 2005 rata-rata sebesar Rp. 2.492,36 trilyun/tahun dengan industri besar dan sedang (IBS) dan Rp. 1.256,16 trilyun tanpa industri besar dan sedang (IBS). Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar selama 5 tahun dengan rata-rata 50,43 % disusul dengan sektor pertanian 28,17 % dan terkecil adalah sektor pertambangan dan penggalian yang hanya berkontribusi rata-rata sebesar 0,3 % terhadap PDRB Kabupaten Barito Kuala.

Tabel II.3

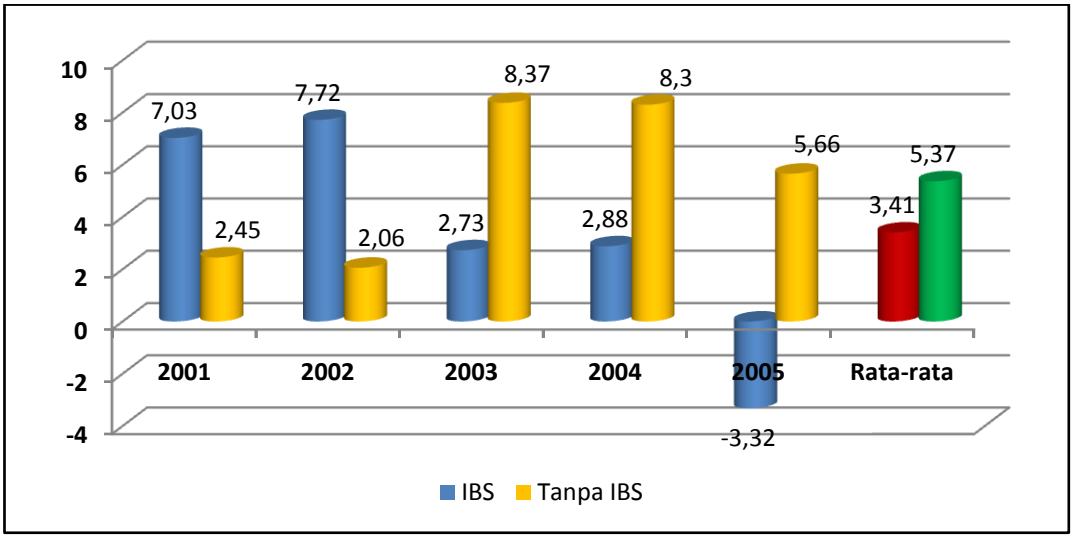
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Ribu Rupiah)
Kabupaten Barito Kuala 2001 – 2005

No	Sektor	Tahun				
		2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertaniaan	594.944.072	672.565.840	723.643.930	747.778.871	777.409.043
2	Pertambangan dan Penggalian	1.072.036	1.216.064	1.425.072	0	0
3	Industri Pengolahan	1.220.717.515	1.250.188.229	1.320.287.178	1.271.994.778	1.196.280.170
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1.828.172	2.041.411	2.330.539	2.723.408	3.134.535
5	Bangunan	57.143.895	65.459.989	70.958.775	103.648.477	149.532.252
6	Perdag. Hotel dan Restoran	137.045.219	165.263.586	176.375.015	198.506.103	234.614.107
7	Pengangkutan dan Komunikasi	40.438.662	50.361.749	53.957.017	55.285.839	55.606.538
8	Keuangan, Persw. dan jasa Perusahaan	29.554.027	33.003.088	42.184.955	55.740.963	61.042.822
9	Jasa – jasa	143.427.237	164.683.587	160.755.328	155.619.234	210.014.008
PDRB dengan IBS		**2.226.170.836**	**2.404.783.543**	**2.551.917.809**	**2.591.297.673**	**2.687.633.475**
PDRB tanpa IBS		**1.020.513.867**	**1.172.043.276**	**1.231.630.631**	**1.340.441.392**	**1.516.182.697**

Sumber : BPS kab. Barito Kuala

Dengan melihat tabel II.3 diatas, dapat diketahui bahwa PDRB Kabupaten Barito Kuala selama 5 tahun terakhir (2001 – 2005) dengan IBS tumbuh rata-rata sebesar 3,93 %. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2002 yakni sebesar 8,02 % dan terkecil pada tahun 2005 sebesar 0,04 %. Sedangkan tanpa IBS PDRB Kabupaten Barito Kuala selaama 5 tahun terakhir (2001-2005) tumbuh rata-rata sebesar 10,47 % dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2002 (14,85 %) dan terendah pada tahun 2003 (5,08 %).

PDRB perkapita masyarakat Kabupaten Barito Kuala selama 5 tahun terakhir (2001-2005) dengan IBS mengalami pertumbuhan rata-rata sevesar 8,02 % per tahun. Pertumbuhan PDRB per kapita tertinggi terjadi pada tahun 2004 (13,50 %) dan terendah pada tahun 2002 (5,07 5). Sedangkan bila tanpa IBS PDRB per kapita masyarakat mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 12,37 % per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2004 (13,00 %) dan terendah pada tahun 2005 (11,38 %).



Gambar II.1

PDRB Per Kapita Kab. Barito Kuala (Jutaan Rupiah)
Tahun 2001 – 2005

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala dalam kurun waktu 2001 – 2005 menggambarkan pertumbuuhan yang berfluktiatif. Kondisi ini disebabkan oleh didominasinya peran sektor industri dan pengolahan terhadap perolehan PDRB antara tahun 2001 sampai dengan 2002. Pada akhirnya tahun 2003 sampai dengan 2005 sektor ini terus berkontraksi hebat dengan kolaps-nya beberapa industri besar dan sedang terutama yang mengandalkan bahan baku berupa kayu. Praktis pada tahun 2005 perekonomian Kabupaten Barito Kuala mengalami penurunan hingga -3,32 % (dengan IBS) dan 5,66 % (tanpa IBS).

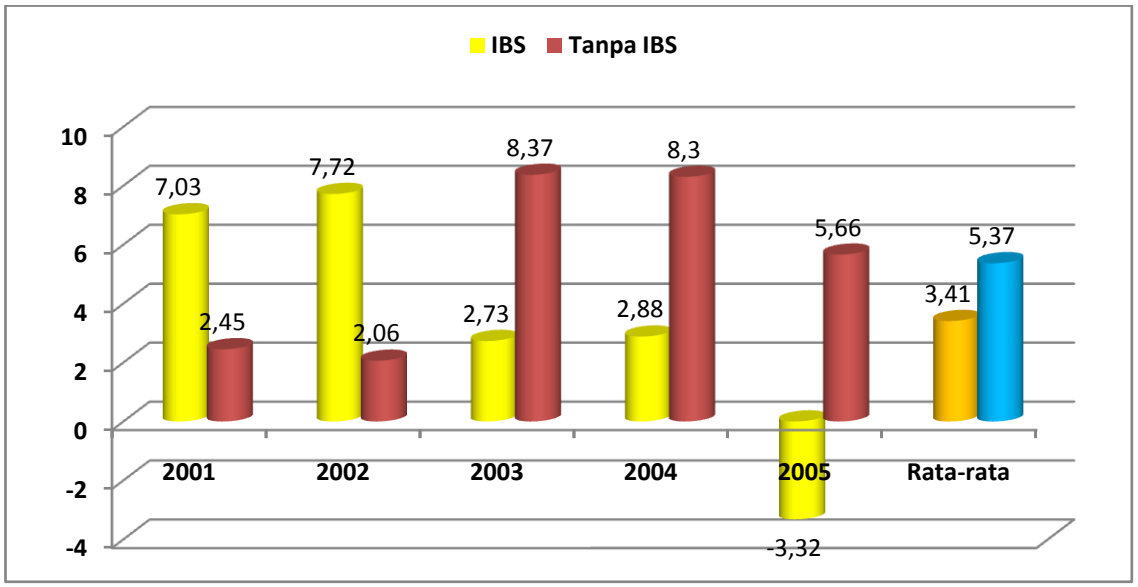
Tabel II.4

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2001 – 2005

No.	Sektor	Tahun (%)					
		2001	2002	2003	2004	2005	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertaniaan	7.35	9.07	8.20	7.63	1.56	6.76
2	Pertambangan dan Penggalian	3.80	1.61	2.19	1.97	0.00	1.91
3	Industri Pengolahan	-1.04	-2.36	-2.63	-2.63	-11.80	-4.09
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	8.52	5.37	6.34	6.37	10.50	7.42
5	Bangunan	8.04	8.57	8.30	5.14	23.94	10.80
6	Perdag. Hotel dan Restoran	7.86	5.61	10.39	8.30	15.46	9.52
7	Pengangkutan dan Komunikasi	11.87	10.49	8.83	9.49	-8.60	6.42
8	Keuangan, Persw. dan jasa Perusahaan	8.70	1.14	12.78	9.97	5.57	7.63
9	Jasa – jasa	3.37	5.30	6.83	14.45	5.21	7.03
PDRB dengan IBS		**7.03**	**7.72**	**2.73**	**2.88**	**-3.32**	**3.41**
PDRB tanpa IBS		**2.45**	**2.06**	**8.37**	**8.30**	**5.66**	**5.37**

Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan tabel II.4 di atas, diketahui bahwa pertumbuhan terbesar secara sektoral terjadi pada sektor bangunan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 10,80 % per tahun. Pertumbuhan rata-rata terkecil terjadi pada sektor industri dan pengolahan yang mengalami pertumbuhan minus (-) rata-rata 4,09 % per tahun.



Sumber : BPS Kab. Barito Kuala

Gambar II.2

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2001 – 2005

Pertumbuhan ekonomi yang tergambar pada grafik di atas dengan IBS menunjukkan peningkatan pada 2 tahun pertama yaitu 2001 dan 2002 masing-masing sebesar 7,03 % dan 7,72 %. Selanjutnya pada tahun 2003 terjadi penurunan hinga berada pada 2,06 % dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2004. Namun pada tahun 2005 berkontraksi hebat hingga menembus minus (-) 3,32 %. Secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala dengan IBS selama kurun waktu tahun 2001 – 2005 adalah sebesar 3,41 %.

Sedangkan pertumbuhan tanpa IBS tahun 2001 tumbuh sebesar 2,45 %, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2003 (8,37%) dan terendah paada tahun 2002 (2,06 %). Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kab. Barito Kuala tanpa IBS adalah 5,37 %.

2.3. Aspek Pelayanan umum

2.3.1. Pendidikan

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Barito Kuala diarahkan menuju terwujudnya pemerataan pendidikan, peningkatan mutu serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan koalitas SDM agar mampu berdaya saing dan beraklaq mulia.

Pembangunan bidang pendidikan tingkat keberhasilannya dapat diukur melalui Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH). Kedua indikator ini menjadi indikator utama dalam Indeks Pendidikan yang akan menentukan Indeks Pembangunan Manusia. Pada Tahun 2000 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Barito Kuala adalah 5,3 tahun, sedangkan angka melek huruf mencapai 90,9 %. Hal ini mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2005 Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Barito Kuala mencapai 6,5 tahun sedang Angka Melek Huruf mencapai 91,5 % (Kalimantan Selatan 95,3%). Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Barito Kuala masih terdapat penduduk yang masih buta aksara sebesar 8,5 % dan sebagian besar adalah penduduk usia lanjut.

Jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2005 terdapat TK/RA 79 buah, SD/MI 310 buah, SMP/MTs 64 buah, SMA/MA 24 buah dan SMK 2 buah.

Indeks Pendidikan di Kabupaten Barito Kuala meningkat setiap tahunnya dan pada tahun 2005 mecapai 75,44. Walaupun demikian di Kabupaten Barito Kuala masih ada penduduk usia sekolah yang belum sekolah. Pada Tahun 2005 untuk anak usia 0-6 tahun sekitar 32,63 % , Usia 7-12 tahun sekitar 9,75 % serta usia 13-15 tahun sekitar 36,33 %

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan komponen yang dijadikan indikator makro dalam mengukur keberhasilan bidang pendidikan, Pada Tahun 2005 Angka Partisifasi Kotor (APK) pendidikan SD/RA sebesar 102,32 % , SMP/MTs 83,87 %, dan SMA 40,17 %. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk pendidikan SD/RA sebesar 81,26 %, SMP/MTs 70,77 %, dan SMA 30,12 %. Faktor utama penyebab meningkatnya APK dan APM pendidikan dasar adalah adanya peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendidikan dasar serta peran serta masyarakat

Dalam mendukung peningkatan kualitas SDM, selain pendidikan formal, juga dilaksanakan pendidikan non formal terutama bagi anak di bawah 5 tahun seperti Kelompok Bermain dan TPA. Jumlah Kelompok bermain dan TPA telah mengalami peningkatan.

Pelayanan pendidikan bagi anak usia dini pada tahun 2005 adalah 2.923 anak yang terlayani PAUD. Meskipun cakupan ini kecil, namun pendidikan bagi usia dini bukan merupakan kewajiban, melainkan pilihan orang tua. Cakupan ini dinilai cukup memadai sebagai penunjang dalam mendukung peningkatan kualitas SDM

Untuk mutu pendidikan, di lihat dari segi input, di Kabupaten Barito Kuala masih banyak guru yang kualifikasinya di bawah Standar Pelayanan Minimal. Pada Tahun 2005 Jumlah guru yang sudah memiliki kualifikasi pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 untuk Guru Tingkat SD/MI baru mencapai 25,60 %, Tingkat SMP/MTs 77,65 % dan Tingkat SMA/SMK/MA sebesar 90,67 %.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Barito Kuala selain pendidikan SD/MI, SLTP/MTS, SMA/SMK/MA juga didirikan Pendidikan Non Formal (PNF) yang merupakan pendidikan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang tidak / belum memperoleh pelayanan pendidikan melalui jalur formal. Kegiatan pokok PNF adalah terdiri dari penuntasan buta aksara , Kegiatan Belajar (Kejar) Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP dalam rangka mendukung program Wajar Dikdas serta kegiatan Paket C untuk setara SMA dan lembaga pendidikan kursus / lembaga pelatihan kerja lainnya. Pada tahun 2005 jumlah PKBM sebagai penyelenggara Kejar Paket A, B dan C berjumlah 43 buah dengan jumlah tutor 216 orang. Jumlah warga belajar yang mengikuti kejar Paket A sebanyak 46 orang dan telah lulus ujian sebanyak 19 orang. Sedangkan warga yg mengikuti Kejar Paket B setara SMP sebanyak 486 orang dan telah lulus sebanyak 293 orang, jumlah warga yang belajar Paket C Setara SMA sebanyak 423 warga dan telah lulus ujian sebanyak. 215 orang. Namun demikian, meskipun rasio kelulusan PKBM di Kabupaten Barito Kuala meningkat dari tahun ke tahun tetapi masih dirasakan kurang optimal.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat khususnya daerah terpencil, dikembangkan Program SD dan SMP Satu Atap di Kecamatan Kuripan, Cerbon, Bakumpai, Rantau Badauh, Barambai, Tamban dan Kecamatan Mandastana. Selain itu juga dikembangkan Program SMP Terbuka di 6 kecamatan (Tabunganen, Mekarsari, Anjir Muara, Barambai, Kuripan, Mandastana). Program SMA Kelas Jauh pun juga dilaksanakan yaitu SMA Marabahan kelas jauh Kuripan, SMA Mandastana kelas jauh Jejangkit, SMA Wanaraya kelas jauh Belawang dan SMA Tamban kelas jauh Tabunganen.

2.3.2. Kesehatan

Kondisi kesehatan masyarakat diperlihatkan oleh tingkat derajat kesehatan yang dimiliki, baik tingkat keadaan kesehatan perorangan, kelompok atau masyarakat. Derajat kesehatan akan mempengaruhi mutu sumber manusia yang terlihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Kuala tahun 2005 sebesar 64,5 (Kalimantan Selatan 67,4) dan IPM rata-rata nasional sebesar 69,0, peringkat Kabupaten Barito Kuala tahun 2005 di Kalimantan Selatan berada di urutan 12.

Sedangkan angka harapan hidup tahun 2005 adalah 59,6 (Kalimantan Selatan 62,1). Secara nasional tingkat harapan hidup tahun 2005 adalah 68,1 tahun.

Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2000 sebanyak 39 bayi dan pada tahun 2005 sebanyak 90 bayi. Faktor penyebab kematian bayi yang paling banyak disebabkan oleh penyakit Asphyxia, Insfeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) dan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Disamping itu disebabkan masih tingginya ibu melahirkan yang ditolong oleh bukan tenaga kesehatan sehingga beresiko kepada kesehatan bayi. Berdasarkan data Survei Data Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2003, Angka Kematian Bayi di Kabupaten Barito Kuala sebesar 35 / 1000 KLH.

Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2000 sebanyak 9 orang dan pada tahun 2005 sebanyak 3 orang. Faktor penyebab kematian ibu melahirkan sebagian besar disebabkan oleh eklamsia berat dan reputra uteri . Hal ini mencerminkan bahwa terjadinya kematian ibu banyak disebabkan oleh adanya ANC (*Ante Natal Care*) yang belum optimal yaitu pertolongan persalinan dan pemeriksaan kehamilan yang masih rendah. Berdasarkan data Survei Data Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2003, Angka Kematian Ibu di Kabupaten Barito Kuala sebesar 307 / 100.000 KLH.

Status gizi masyarakat khususnya balita dari tahun ke tahun berhasil ditingkatkan, namun demikian status gizi kurang dan gizi buruk masih perlu diturunkan. Jumlah penderita gizi buruk 9 orang, Balita BGM sebanyak 1302 anak (4,54 %).

Pada tahun 2005, prosentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air bersih baru mencapai 30,33 % dan akses rumah tangga terhadap sanitasi dasar baru mencapai 35 %, Hal ini menggambarkan bahwa kondisi kesehatan lingkungan masih rendah dan merupakan kegiatan lintas sektor yang belum dikelola dalam suatu sistem kesehatan yang baik.

Cakupan partisipasi masyarakat terhadap Posyandu (D/S) masih rendah yaitu rata-rata setiap tahunnya masih dibawah 70 % . Jumlah posyandu sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan mengalami peningkatan yaitu dari 348 buah menjadi 360 buah dengan jumlah kader dari 1740 orang menjadi 1800 orang. Sehingga proporsi kader per posyandu rata-rata sejumlah 4-5 orang serta proporsi balita per posyandu sebanyak 67 balita. Secara kualitas perkembangan Posyandu ditinjau dari 4 klasifikasi kemandirian posyandu pada tahun 2005, yang tergolong posyandu strata Pratama 59 %, Madya. 33 %, Purnama 6 % dan Mandiri 2 %.

Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz sebagai sarana kesehatan masyarakat meningkat statusnya dari Type D ke type C. Pembangunan Instalasi Pelayanan Kesehatan Handil Bhakti telah mampu meningkatkan jumlah kunjungan (BOR) RSUD H. Abdul Aziz. Pada Tahun 2005 BOR RSU H. Abdul Aziz sebesar 26 %, angka ini meningkat bila dibanding Tahun 2004, BOR RSUD H. Abdul Aziz sebesar 24 %. Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit juga mengalami peningkatan dari 50 TT menjadi 80 TT. Jumlah puskesmas juga mengalami peningkatan dari 16 buah menjadi 19 buah

Jangkauan pelayanan puskesmas pada tahun 2005 sudah cukup tinggi yaitu rata-rata setiap puskesmas dapat melayani sekitar 20.000 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa keterjangkauan pelayanan kesehatan telah lebih baik bila dibandingkan standar pelayanan dimana 1 puskesmas melayani 30.000 penduduk. Sementara itu jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2005, jumlah dokter umum sebanyak 27 orang, dokter gigi 4 orang, dokter spesialis 2 orang, Perawat 114 orang, bidan 191 orang, Nutrisionis 31 orang dan Sanitarian 33 orang.

Pencapaian target peserta KB Baru selama tahun 1996 – 2005 rata-rata setiap tahunnya 100 % dan pencapaian KB aktif rata-rata setiap tahunnya sebesar 75 % dari jumlah PUS. Pencapaian peserta KB aktif tersebut dilaksanakan oleh pos pelayanan KB yang ada di tingkat keluarahan / desa dengan didukung dengan tenaga dokter maupun bidan. Namun pencapaian peserta KB yang tinggi secara kualitas masih rendah karena dari pemakaian alat kontrasepsi yang belum tinggi untuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Kabupaten Barito Kuala memiliki potensi terbesar pada sektor pertanian khsusnya pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Luas areal tanaman padi tahun 2001 sebesar

88.489 hektar meningkat pada tahun 2002 menjadi 89.156 hektar atau naik 0,75 %. Luas tanam padi tertinggi adalah pada tahun 2003 (96.006 hektar) atau naik 7,68 % dari tahun 2002. Rata-rata luas tanam padi selama 5 (lima) tahun terakhir (2001 – 2005) adalah sebesar 90.200 hektar per tahun dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,51 % per tahun.

Sektor pertanian yang terdiri dari tanaman bahan pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan sebagai sektor andalan di Kabupaten Barito Kuala mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2002 (13,05 %) dan terendah pada tahun 2005 (0,66 %).

Sektor pertanian merupakan penyedia utama kebutuhan pangan masyarakat dan merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia. Sektor pertanian juga menyediakan pasar yang sangat besar untuk produk manufaktur karena jumlah penduduk perdesaan yang besar dan terus mengalami peningkatan. Dengan demikian, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah perdesaan melalui peningkatan pendapatan mereka yang bekerja di sektor pertanian. Sementara sektor industri yang berkontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Barito Kuala hanya bersifat sementara karena semakin berkurangnya pasokan bahahn baku kayu sebagai bahan baku sebagian besar industri besar dan sedang yang berada di Kabupaten Barito Kuala.

PDRB Kabupaten Barito Kuala (jutaan rupiah) baik atas dasar harga berlaku (AHB) maupun atas dasar harga konstan (AHK) dari tahun 2001 sampai 2005 terus mengalami peningkatan. PDRB Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2001 (dengan IBS) atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 2.125.873 dan pada tahun 2005 mencapai Rp. 2.792.751 atau meningkat rata-rata sebesar 9,41 % per tahun, sedangkan atas dasar harga konstan tahun 2001 sebesar Rp. 1.800.407 meningkat menjadi 2.010.148 pada tahun 2005 (meningkat rata-rata sebesar 2.39 % per tahun).

PDRB perkapita penduduk Kabupaten Barito Kuala dengan IBS dan atas dasar harga berlaku tahun 2001 sebesar 7.814.937 meningkat menjadi 10.620.966 pada tahun 2005 atau meningkat rata-rata sebesar 9.38 % pertahun. Sedangkan atas dasar harga konstan tahun 2001 sebesar Rp. 2.451.227 meningkat menjadi Rp. 7.644.690 pada tahun 2005 atau meningkat rata-rata sebesar 43,11 % pertahun.

Sebagai sentra produksi padi di Kalimantan Selatan, produksi padi Kabupaten Barito Kuala terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Besarnya potensi pada sektor pertanian menjadikan sektor ini memberikan kontribusi relatif lebih besar dibandingkan dengan 8 sektor lainnya. Produksi padi tahun 2001 (292.857 ton), 2002 (268.724 ton), 2003 (269.341 ton),

2004 (269.198 ton), 2005 (279.091 ton). Rata-rata produksi padi selama 5 (lima) tahun adalah sebesar 275.842 ton dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2005 (3,67 %) dan terendah tahun 2002 (-8,24 %).

Produksi hortikultura terutama jeruk tahun 2001 (2.371 ton) terus mengalami peningkatan yang signifikan hingga tahun 2005 (4.841 ton). Rata-rata produksi jeruk selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebesar 3.236 ton/tahun dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 20, 61 % per tahun.

Selain sebagai produsen padi terbesar di Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala juga mengembangkan ternak besar berupa ternak sapi Bali, kerbau rawa, kambing dan beberapa ternak unggas seperti ayan buras dan ayam ras (pedaging dan petelur). Rata-rata produksi daging sapi selama 5 (lima) tahun adalah 41.347,33 ton dengan pertumbuhan produksi rata-rata sebesar 10,13 % per tahun.

Tabel II.5

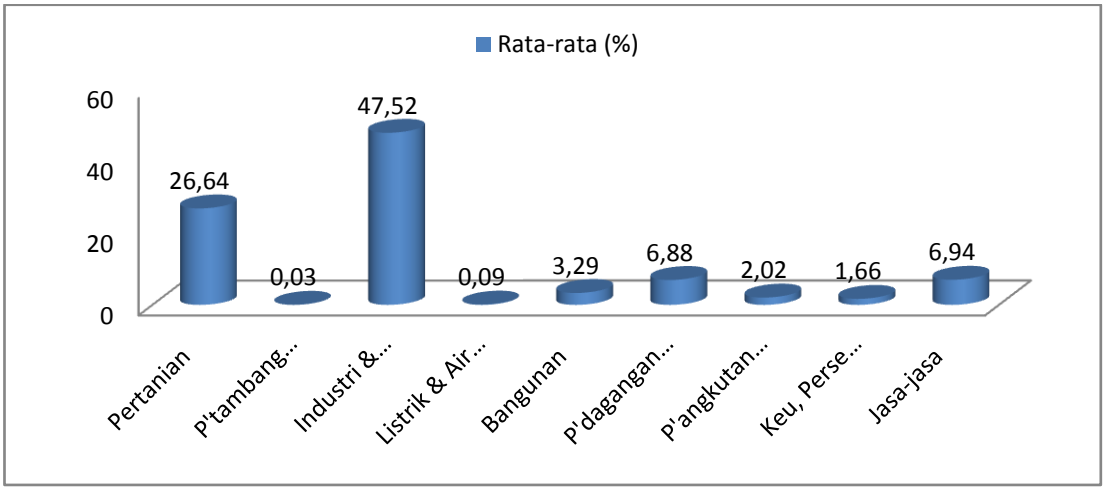
Produksi Pertanian dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2001 – 2005

No.	Komoditi	Produksi				
		2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Padi (ton)	292.657	268.724	269.341	269.198	279.091
2	Jeruk (kwintal)	120.829	108.870	121.900	127.890	183.750
3	Mangga (kwintal)	13.897	50.090	4.669,7	4.729	1.839
4	Nanas (kwintal)	600,80	11.340	1.323,20	1.349	1.407
5	Rambutan (kwintal)	130.500	126.170	10.959,30	11.599	27.969
6	Sapi (kg)	36.787	42.775	44.480	46.764	48.320
7	Kerbau (kg)	9.085	10.631	10.880	11.534	12.524
8	Kambing (kg)	15.053	16.564	15.126	17.298	20.697
9	Ayam ras pedaging (kg)	60.424	61.005	101.731	112.750	129.090
10	Ayam buras (kg)	130.888	131.325	182.864	234.887	294.280
11	Itik (kg)	10.417	11.412	12.216	10.579	11.456
12	Telur ayam buras (butir)	299.980	385.174	559.182	612.375	675.390
13	Telur itik (butir)	275.840	317.216	364.376	429.227	457.937

Sumber : Dinas Pertanian TPH dan Dinas Peternakan Kab. Barito Kuala

Selama kurun waktu tahun 2001 sampai dengan 2005, sektor industri dan pengolahan memberikan produksi tertinggi pada PDRB Kabupaten Barito Kuala yakni rata-rata sebesar 47,52 % dari total PDRB diikuti oleh sektor pertanian dengan rata-rata sebesar 26,64 %. Sedangkan sektor dengan produksi terendah adalah pertambangan dan penggalian (0,03 %). Dilihat dari pertumbuhan masing-masing sektor, sektor bangunan memperlihatkan pertumbuhan dengan rata-rata tertinggi (29,50 %) diikuti dengan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

(22,31 %). Sedangkan sektor dengan rata-rata pertumbuhan terendah adalah sektor pertambangan (-17,75 %).



Sumber : BPS Kab. Barito Kuala

Gambar II.3

Rata – rata Kontribusi beberapa Sektor terhadap PDRB
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2001 – 2005

2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur terutama jalan dan jembatan merupakan kebijakan prioritas disamping kebijakan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Hingga tahun 2005 panjang jalan di Kabupaten Barito Kuala adalah 626,13 kilometer. Dilihat dari kondisi jalan tersebut, 182,16 kilometer (39 %) baik, 112, 97 (17,99 %) sedang dan 214,14 kilometer (34 69 %) rusak. Transportasi sungai masih menjadi alternatif bagi masyarakat Barito Kuala sebagai transportasi antar kecamatan ataupun antar wilayah. Di beberapa wilayah transportasi antar kecamatan, kabupaten bahkan antar provinsi masih dihubungkan dengan menyeberangi sungai yang dilengkapi dengan dermaga-dermaga penyeberangan.

Prasarana sumber daya air yang berada di wilayah Kabupaten Barito Kuala adalah saluran rawa nasional seluas 2506,800 Km, Daerah Rawa (DR) nasional seluas 71.798 Ha, Daerah Irigasi (DI) Provinsi seluas 20.064 Ha, Jaringan rawa provinsi seluas 2733,917 Km, Daerah Rawa provinsi seluas 30.978 Ha. Keberadaan prasarana sumberdaya air ini disamping berfungsi sebagai parasana transportasi juga untuk mendukung usaha masyarakat terutama usaha pada sektor pertanian dalam arti luas.

Pelayanan air bersih di Kabupaten Barito Kuala telah menjangkau sebanyak 6 (enam) kecamatan dengan total pelanggan 5.674 rumah tangga. Sebagian besar dari pelanggan tersebut merupakan pelanggan kelompok II (1.439 pelanggan), diikuti kelompok III (1.791 pelanggan), kemudian kelompok I (90 pelanggan) dan kelompok IV (4 pelanggan). Air baku yang digunakan oleh PDAM Kabupaten Barito Kuala bersumber dari Sungai Barito dan Sungai Nagara Pada musim normal mencapai 70 lt/detik dan musim kemarau hanya mencapai 30% (33 lt/detik), dengan sistem intake menjangkau 9 IKK yaitu IKK Anjir Pasar, Anjir Muara, Alalak, Rantau Badauh, Cerbon, Bakumpai, Tamban, Tabunganen dan Marabahan. (8 kecamatan belum terlayani). Produksi air minum pada tahun 2005 adalah sebesar 1.857.217 M^3 dengan distribusi sebanyak 1.623.863 M^3 dan terjual sebanyak 1.328.175 M^3.

Pelayanan listrik kepada masyarakat oleh PT. PLN hingga tahun 2005 sudah melayani sebanyak 43.175 pelanggan dengan VA tersambung sebanyak 26.598.260 VA dan terjual sebanyak 3.192.292 KWH.

2.4.3. Iklim Berinvestasi

Perkembangan investasi di Kabupaten Barito Kuala sangat dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur jalan dan jembatan baik untuk menjang kelancaran aksesibilitas antar kecamatan di Kabupaten Barito Kuala maupun sebagai penghubung dengan daerah lain yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Barito Kuala. Beberapa potensi dan peluang bisnis yang dapat dikembangkan adalah terdapat di Kecamatan Anjir Pasar, Anjir Muara, Alalak dan Mandastana yang merupakan daerah pertumbuhan sepat untuk ekonomi dan perdagangan. Kecamatan – kecamatan tersebut dilintasi oleh jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kalimantan tengah. Investasi yang memiliki prospektif untuk dikembangkan adalah bisnis property/real estate menengah ke atas, usaha pertokoan/toserba, mall dan pergudangan karena sangat ditunjang oleh tersedianya lahan dan kemudahan fasilitas transportasi, listrik, air bersih dan telekomunikasi.

Investasi pada sektor industri dan pengolahan sangat didominasi oleh industri menengah ke atas baik dari PMDN maupun PMA. Hingga tahun 2005 terdapat 20 buah industri dari PMDN dan PMA sebanyak 9 buah perusahaan. Perusahaan – perusahaan tersebut sebagian besar berada di sepanjang daerah aliran sungai Barito yang berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar.

2.4.4. Sumberdaya Manusia (SDM)

Penduduk Kabupaten Barito Kuala tahun 2005 berjumlah 267.052 jiwa yang terdiri dari laki-laki 132.490 jiwa dan perempuan 134.490 jiwa dengan sex rasio sebesar 0,99 %, bila dibandingkan tahun 2004, Jumlah pertumbuhan penduduk Kabupaten Barito Kuala tahun ke tahun terus mengalami kenaikan dengan pertumbuhan antara 0,35 persen hingga 1,56 persen. Mayoritas kecamatan di Kabupaten Barito Kuala mengalami kenaikan jumlah penduduk, kecuali Kecamatan Tamban dan Kecamatan Tabunganen. Kecamatan Tamban mengalami penurunan akibat banyaknya perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Kecamatan Tamban gulung tikar/bangkrut yang berujung adanya PHK besar-besaran terhadap karyawannya, sedangkan Kecamatan Tabunganen mengalami penurunan akibat banyaknya rumah tangga/penduduk yang pindah. Secara kuantitas Kecamatan Alalak dan Tamban merupakan kecamatan yang berpenduduk lebih besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya yaitu sebesar 39.029 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah kecamatan Kuripan yaitu sebesar 5.771 jiwa.

Setelah industri kayu runtuh maka sektor pertanian dalam arti luas merupakan pemberi lapangan kerja alternatif baik bagi karyawan yang kena PHK maupun pendudukan yang kurang terdidik, sektor pertanian dapat menjadi penopang perekonomian desa-desa miskin di Kabupaten Barito Kuala.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala terus berupaya melakukan perluasan kesempatan kerja, sehingga dapat memperluas kesempatan kerja dan diharapkan akan terjadi penekanan terhadap jumlah pengangguran yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup penduduk.

Indeks Pendidikan di Kabupaten Barito Kuala meningkat setiap tahunnya dan pada tahun 2005 mecapai 75,44. Walaupun demikian di Kabupaten Barito Kuala masih ada penduduk usia sekolah yang belum sekolah. Pada Tahun 2005 untuk anak usia 0-6 tahun sekitar 32,63 % , Usia 7-12 tahun sekitar 9,75 % serta usia 13-15 tahun sekitar 36,33 %

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan komponen yang dijadikan indikator makro dalam mengukur keberhasilan bidang pendidikan, Pada Tahun 2005 Angka Partisifasi Kotor (APK) pendidikan SD/RA sebesar 102,32 % , SMP/MTs 83,87 %, dan SMA 40,17 %. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk pendidikan SD/RA sebesar 81,26 %, SMP/MTs 70,77 %, dan SMA 30,12 %. Faktor utama penyebab meningkatnya APK

dan APM pendidikan dasar adalah adanya peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendidikan dasar serta peran serta masyarakat

Dalam mendukung peningkatan kualitas SDM, selain pendidikan formal, juga dilaksanakan pendidikan non formal terutama bagi anak di bawah 5 tahun seperti Kelompok Bermain dan TPA. Jumlah Kelompok bermain dan TPA telah mengalami peningkatan. Pelayanan pendidikan bagi anak usia dini pada tahun 2005 adalah 2.923 anak yang terlayani PAUD. Meskipun cakupan ini kecil, namun pendidikan bagi usia dini bukan merupakan kewajiban, melainkan pilihan orang tua. Cakupan ini dinilai cukup memadai sebagai penunjang dalam mendukung peningkatan kualitas SDM

Untuk mutu pendidikan, di lihat dari segi input, di Kabupaten Barito Kuala masih banyak guru yang kualifikasinya di bawah Standar Pelayanan Minimal. Pada Tahun 2005 Jumlah guru yang sudah memiliki kualifikasi pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 untuk Guru Tingkat SD/MI baru mencapai 25,60 %, Tingkat SMP/MTs 77,65 % dan Tingkat SMA/SMK/MA sebesar 90,67 %.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Barito Kuala selain pendidikan SD/MI, SLTP/MTS, SMA/SMK/MA juga didirikan Pendidikan Non Formal (PNF) yang merupakan pendidikan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang tidak / belum memperoleh pelayanan pendidikan melalui jalur formal. Kegiatan pokok PNF adalah terdiri dari penuntasan buta aksara , Kegiatan Belajar (Kejar) Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP dalam rangka mendukung program Wajar Dikdas serta kegiatan Paket C untuk setara SMA dan lembaga pendidikan kursus / lembaga pelatihan kerja lainnya. Pada tahun 2005 jumlah PKBM sebagai penyelenggara Kejar Paket A, B dan C berjumlah 43 buah dengan jumlah tutor 216 orang. Jumlah warga belajar yang mengikuti kejar Paket A sebanyak 46 orang dan telah lulus ujian sebanyak 19 orang. Sedangkan warga yg mengikuti Kejar Paket B setara SMP sebanyak 486 orang dan telah lulus sebanyak 293 orang, jumlah warga yang belajar Paket C Setara SMA sebanyak 423 warga dan telah lulus ujian sebanyak. 215 orang. Namun demikian, meskipun rasio kelulusan PKBM di Kabupaten Barito Kuala meningkat dari tahun ke tahun tetapi masih dirasakan kurang optimal.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat khususnya daerah terpencil, dikembangkan Program Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap di Kecamatan Kuripan, Cerbon, Bakumpai, Rantau Badauh, Barambai, Tamban dan Kecamatan Mandastana. Selain itu juga dikembangkan Program SMP Terbuka di 6

kecamatan (Tabunganen, Mekarsari, Anjir Muara, Barambai, Kuripan, Mandastana). Program SMA Kelas Jauh pun juga dilaksanakan yaitu SMA Marabahan kelas jauh Kuripan, SMA Mandastana kelas jauh Jejangkit, SMA Wanaraya kelas jauh Belawang dan SMA Tamban kelas jauh Tabunganen. Dengan demikian diharapkan pelayanan dasar dalam bidang pendidikan dapat lebih dirasakan oleh seluruh lapisan masyaraakat khsusnya yang sudah usia sekolah.

BAB III

ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

(a) Kondisi geografis Kabupaten Barito Kuala yang merupakan daerah rawa pasang surut berdampak terhadap tingginya anggaran yang harus dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan. Hal ini berdampak kepada aksesibilitas terutama melalui transportasi jalan darat di beberapa kecamatan belum lancar.

(b) Beberapa wilayah pedesaan di Kabupaten Barito Kuala belum mendapatkan pelayanan listrik yang disebabkan pola permukiman yang tersebar acak mengakibatkan kerapatan beban rendah sehingga untuk pembangunan jaringan PLN membutuhkan dana yang relatif tinggi sementara investasi keuangan terbatas.

(c) Pelayanan air bersih belum mampu melayani masyarakat secara maksimal akibat keterbatasan jaringan dan kondisi geografis Kabupaten Barito Kuala.

(d) Berdasarkan rasio proporsi panjang jalan kondisi baik sampai dengan sedang pada tahun 2001-2004 sebesar 45,5% kondisi ini berakibat pada sektor - sektor bidang pembangunan yang lain tidak mampu memberikan pertumbuhan yang positif diantaranya terhambatnya arus barang dan orang. Pelayanan terhadap angkutan darat dan sungai perlu didukung oleh sarana dan prasarana jalan dan jembatan yang akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi daerah sehingga penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan sangat berpengaruh terhadap kelancaran pergerakan barang dan jasa.

(e) Adanya kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akases terhadap pelayanan kesehatan, tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, adanya balita kurang gizi dan beban ganda penyakit.

(f) Kurangnya penyediaan pelayanan dan pemerataan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar ke jenjang yang lebih tinggi, tingginya angka buta aksara dan kurangnya tenaga guru.

(g) Pendapatan petani masih tergolong rendah sebagai akibat dari rendahnya produktivitas lahan. Meskipun secara umum produksi pertanian Kab. Barito Kuala khsusnya padi adalah terbesar di Kalimantan Selatan akan tetapi hal ini dikarenakan luasa tanam yang relatif lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya.

3.2. Isu Strategis

(a) Produksi padi Kabupaten Barito Kuala adalah tertinggi di Kalimantan Selatan dan merupakan penyumbang terbesar untuk kebutuhan pangan Kalimantan Selatan. Dengan semakin berkurangnya lahan produktif terutama di Pulau Jawa, maka dalam rangka ketahanan pangan lahan rawa menjadi kawasan yang memiliki prospek untuk pengembangan produksi pertanian masa depan.

(b) Barito Kuala sebagai penyangga pertumbuhan Kota Banjarmasin khsusnya di Kecamatan Alalak, mandastana, Anjir Muara, Tamban dan Tabunganen.

(c) Sungai Barito Kuala menjadi jalur pelayaran utama menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, transportasi hasil tambang dan perkebunan serta menyimpan potensi yang besar untuk usaha budidaya perikanan.

(d) Barito Kuala telah ditetapkan sebagai Pusat Pengembangan Wilayah (PKW).

(e) Deforestasi sumberdaya hutan khususnya galam yang disebabkan oleh penebangan liar, alih fungsi dan kebakaran hutan di Kabupaten Barito Kuala tidak diimbangi dengan upaya reboesasi dan rehabilitasi yang memadai.

BAB IV
VISI DAN MISI DAERAH

4.1. VISI

Visi merupakan suatu rumusan tentang keadaan yang diinginkan di masa depan, untuk Kabupaten Barito Kuala adalah di akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu pada Tahun 2025.

Visi untuk Kabupaten Barito Kuala dirumuskan dengan memperhatikan berbagai hal mencakup tantangan dan peluang di masa depan, kekuatan dan kelemahan yang ada, faktor-faktor strategis yang muncul, amanat pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi dan aspirasi masyarakat.

Kabupaten Barito Kuala sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memiliki visi yang selaras dengan visi pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu " Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur" serta harus selaras pula dengan Visi Provinsi Kalimantan Selatan yaitu " Kalimantan Selatan 2025 Maju dan Sejahtera sebagai wilayah Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro Industri" sebagai bentuk harapan kondisi yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu pada Tahun 2025

Berdasarkan pertimbangan atas faktor di atas, maka diperoleh rumusan visi Kabupaten Barito Kuala dalam waktu 20 tahun yang akan datang yaitu :

"BARITO KUALA 2025 YANG ADIL, MAJU DAN MANDIRI BERBASIS AGRIBISNIS"

Dalam visi tersebut terkandung nilai-nilai yang dicita-citakan dan diidam-idamkan bersama oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Barito Kuala pada akhir periodesasi RPJP Kabupaten Barito Kuala tahun 2005 – 2025, yaitu :

a. **Adil** : Dimaksudkan pada kesamaan hak dan kewajiban seluruh elemen masyarakat Kabupaten Barito Kuala dalam menikmati dan memanfaatkan seluruh hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dengan tidak mengesampingkan kesamaan kewajiban untuk berperan aktif dalam berbagai aktiivitas pembangunan. Makna adil juga diartikan

bahwa tidak ada diskriminasi dalam perlakuan dan pelayanan pemerintah terhadap berbagai kebutuhan daasr seperti pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

b. **Maju** : Kondisi kehidupan masyarakat pada titik tataran tertentu menjadi lebih baik dari pada kondisi sebelumnya atau menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi masyarakat di wilayah lainnya. Makna kata "Maju" yang terpenting adalah terwujudnya semangat, gairah dan dinamika masyarakat sebagai "budaya" dalam menanggapi hidup dan kehidupan yang lebih baik.

c. **Mandiri** : Tingkat kemampuan yang ingin dicapai dan merupakan output dari kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang telah diletakkan dan dilaksanakan secara konsisten. "Mandiri" dimaknai sebagai perwujudan dari kemampuan daerah dalam hal ini pemerintah dan masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan segala potensi dan keunggulan yang dimiliki baik mandiri dari aspek ekonomi dan mandiri dalam pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan dasar.

d. **Agribisnis** : Sebagai daerah yang potensi utamanya didominasi oleh pertanian, maka segala upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian sehingga menghantarkan Kabupaten Barito Kuala sebagai pemasok pangan terutama padi terbesar untuk Kalimantan Selatan menjadikan agribisnis sebagai basis untuk mencapai kondisi yang diinginkan pada akhir periode RPJPD. Berkembangnya sektor *hulu* perlu didukung dengan perkembangan sektor *hilir* sehinga tercipta nilai tambah (*added value*) produk yang dihasilkan. Pengertian gribisnis sendiri adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penanganan komoditi pertanian dalam arti luas, yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan masukan dan keluaran produksi (agroindustri), pemasaran masukan-keluaran pertanian dan kelembagaan penunjang kegiatan. Yang dimaksud dengan berhubungan adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian.

4.2. MISI

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Barito Kuala tersebut ditempuh dengan misi sebagai berikut :

a. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ.

b. Mengoptimalkan pengelolaan SDA dan sumberdaya lainnya untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan.
c. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal
d. Mengembangkan dan meningkatkan pemerataan prasarana dan sarana pembangunan
e. Memantapkan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam penyelei pemerintahan daerah.

1) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ.

Dalam pembangunan, manusia adalah perencana, pelaku, pengendali serta tujuan dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu pengembangan kualitas sumberdaya manusia merupakan prioritas utama yang harus ditingkatkan. Upaya pengembangan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan dilakukan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidkkan yang merata dan berkualitas, guna menyongsong tuntutan pendidikan yang bertaraf global. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang mudah terjangkau dan berkualitas. Meningkatkan kompetensi masyarakat petani dalam beragrobisnis beserta manajemen kelembagaannya sehingga mampu menjadi pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian dalam arti luas. Meningkatkan pembinaan kerohanian melalui berbagai aktivitas keagamaan sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama yang mampu berkontribusi positif terhadap pembangunan sikap mental spiritual dengan kearifan, keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2) Mengoptimalkan pengelolaan SDA dan sumberdaya lainnya untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan.

Pengelolaan sumberdaya alam akan diupayakan seoptimal mungkian bagi peningkatan kesejahteraan dan tarap hidup masyarakat. Segala aktivitas pembangunan yang memanfaatkan sumberdaya alam harus tetap berorientasi pada kelestarian lingkungan sehingga dapat memberikan dampak positif tidak hanya pada aspek ekonomi melainkan juga secara sosial, budaya dan lingkungan.

3) **Mewujudkan perekonomian daerah yang maju guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal.**

Mewujudkan pembangunan ekonomi agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang mantaf dan stabil, meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat dengan memanfaatkan segala potensi sumberdaya alam yang ada seperti pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan serta sektor-sektor perekonomian strategis lainnya sehingga peningkatan tarap hidup dan kesejahteraan masyarakat..

4) **Mengembangkan dan meningkatkan pemerataan prasarana dan sarana pembangunan**

Pembangunan infrastruktur dan berbagai prasarana dan sarana yang dibutuhkan bagi kelancaran aktivitas perekonomian dan usaha masyarakat diupayakan secara efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

5) **Memantapkan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.**

Penyelenggaraan pemerintahan yang diarahkan untuk melaksanakan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan memerapkan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian diharapkan akan terwujud pelayanan publik yang mencakup beberapa aspek seperti aspek sumberdaya aparatur, regulasi dan kebijakan serta standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB V

SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

5.1. Sasaran Pembangunan Jangka Panjang daerah

Sasaran umum Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025 adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Barito Kuala adil dan sejahtera yang beriman dan bertaqwa sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5.1.1. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM yang berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ, ditandai oleh hal-hal berikut:

(a) Meningkatnya derajat dan mutu pendidikan masyarakat Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut:

- Terlayaninya pendidikan anak usia dini.
- Penuntasan buta aksara.
- Terpenuhinya wajib belajar 9 tahun.
- Termulainya rintisan wajib belajar 12 tahun, pengembangan pendidikan kewirausahaaan, peningkatan pendidikan profesi, peningkatan kompetensi pendidik , pengembangan kurikulum, peningkatan kesejahteraan pendidik)
- Terpenuhinya tenaga profesional (Peningkatan pengembangan pendidikan profesi, peningkatan pengembangan pendidikan kewirausahaan, peningkatan kesejahteraan pendidik,peningkatan kompetensi peneliti)
- Terpenuhinya tenaga profesional dengan strata tinggi (Peningkatan kualitas menajemen, pengembangan pola pikir ilmiah dan penelitian)

(b) Meningkatnya derajat dan mutu kesehatan masyarakat Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut :

- Terpenuhinya penigkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia (medis dan non medis), peningkatan kuantitas dan kualitas sarana layanan kesehatan.
- Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas semberdaya manusia medis dan non medis disertai pemerataan distribusi, peningkatan akses layanan kesehatan bagi kelompok miskin dan kelompok yang agak jauh dari jangkauan, Pengembangan sistem jaminan kesehatan, peningkatan pengembangan kuantitas dan kualitas sarana layanan kesehatan
- Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem jaminan kesehatan, pengembangan sistem pencegahan dan pemberantasan wabah penyakit dan penggunaan obat terlarang.
- Terwujudnya pengembangan budaya hidup bersih dan sehat, penurunan fertilitas dalam rangka pengendalian jumlah penduduk.

(c) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan Umur Harapan Hidup.

- Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia pada tahap I mencapai 68, dengan Usia Harapan Hidup 65,5 tahun.
- Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia pada tahap II mencapai 70 dengan Usia Harapan Hidup 67 tahun
- Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia pada tahap III mencapai 72 dengan Usia Harapan Hidup 68 tahun
- Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia pada tahap IV mencapai 75 dengan Usia Harapan Hidup 70 tahun

(d) Meningkatnya masyarakat yang agamis, berakhlak mulia dan memiliki toleransi antar umat beragama dan pengembangan kualitas kehidupan beragama masyarakat beragama yang berbudaya sesuai dengan kepribadian bangsa indonesia.

- Berkembangnya karakter masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang mandiri, berdaya saing, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan pemahaman agama bagi para pemeluknya.
- Makin kuatnya nilai-nilai keagamaan, berakhlak mulia, bermoral, beriman dan bertaqawa yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Barito Kuala meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam seluruh bidang pembangunan, peningkatan penghayatan dan pengamalan agama kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peningkatan kerukunan antar umat beragama, pengembangan wadah dan iklim untuk dialog kebudayaan.
- Makin mantapnya budaya masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa, pengembangan rasa kecintaan akan budaya lokal
- Pengembangan dan penguatan wawasan kebangsaan,Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan konflik sosial

(e) Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan sosial masyarakat dengan melakukan penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial

- Perluasan akses pelayanan dasar masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
- Percepatan peningkatan kualitas kehidupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan kemandirian masyarakat.
- Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan koordinasi penanggulangan kemiskinan.
- Penguatan usaha mikro bagi masyarakat miskin.

(f) Meningkatnya pengembangan kebudayaan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal.

- Membina dan mengembangkan seni dan budaya serta melengkapi sarana dan prasarana kebudayaan dan kesenian

- Mengintegrasikan kebudayaan lokal/masyarakat kedalam program pendidikan baik formal maupun informal
- Melakukan promosi terhadap potensi kebudayaan terutama kebudayaan unggulan.
- Pelestarian nilai-nilai budaya serta peninggalan sejarah dan purbakala termasuk kawasan cagar budaya, sistem nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat

Berikut ini Tabel sasaran pembangunan SDM Kabupaten Barito Kuala 2005-2025 :

Tabel V.1
Sasaran Pembangunan SDM Kab. Barito Kuala 2005 – 2025

Tahap	Indikator			
	Pendidikan	Harapan Hidup	IPM	Sosbud Agama
I	Terpenuhinya wajib belajar 9 thn	65,5 thn	68	Tersedianya wadah pengembangan
II	Termulainya rintisan wajib belajar 12 thn	67 thn	70	Optimalnya wadah pengembangan
III	Terpenuhinya wajib belajar 12 tahun	68 thn	72	Terkendalinya konflik & PMKS
IV	Terpenuhi tenaga pendidikan yang profesional	70 thn	75	Kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

5.1.2. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan dengan berbagai kebijakan, dengan tahapan pencapaian sebagai berikut:

(a) Meningkatnya pemeliharaan keragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam dan lingkungan Kabupaten Barito Kuala.

(b) Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat Kabupaten Barito Kuala dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(c) Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

(d) Meningkatnya kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang didukung oleh pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara serasi, seimbang, dan lestari.

(e) Meningkatnya implementasi tata ruang secara fungsional.

(f) Meningkatnya luasan rehabilitasi hutan dan lahan kritis.

(g) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan hidup terutama pada kalangan generasi muda.

(h) Diberlakukannya secara bertahap pelaksanaan hukum yang mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup.

(i) Meningkatnya penataan dan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan perkebunan

(j) Tersusunnya Base line data yang reliabel untuk semua sumberdaya alam.

(k) Terpenuhinya rehabilitasi hutan dan lahan.

(l) Terpenuhinya tata ruang secara fungsional dalam wilayah Barito Kuala.

(m) Terlaksananya kontrol sosial atas pemanfaatan lahan yang bertentangan kaedah pelestarian lingkungan.

(n) Terpenuhinya syarat Maximum Sustainable Yield (MSY) dalam pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien.

(o) Terselenggarannya penyusunan neraca sumberdaya alam berdasarkan base line data yang selalu diperbaharui setiap tahun.

(p) Dapat dipertahankannya pemanfaatan sumberdaya alam sesuai prinsip MSY yang selaras dengan kelestarian lingkungan hidup.

(q) Tegaknya hukum tanpa diskriminasi bagi setiap pelanggaran akan ketentuan illegal logging, illegal mining, illegal fishing dan perusakan lingkungan hidup.

(r) Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup sesuai standar yang berlaku.

5.1.3. Terwujudnya perekonomian daerah yang maju guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal, yang tandai oleh hal-hal sebagai berikut:

(a) Meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat di Kabupaten Barito Kuala melalui peningkatan produksi dan produktivitas usaha.

- Meningkatnya pembangunan ekonomi yang dititikberatkan pada usaha untuk memperkuat aktivitas ekonomi utama yaitu pertanian, terutama yang berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian dengan proses produksi yang lebih efisien dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama. Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan dan penyaluran sarana produksi dan melakukan intervensi pasar guna menjamin tingkat harga yang layak apabila dijumpai adanya indikasi kegagalan pasar. Sedangkan yang berhubungan dengan sektor industri dan jasa difokuskan pada tahap persiapan untuk menuju tahun investasi pada lima tahun kedua yang bertujuan untuk membuka peluang investasi, kesempayan berusaha dan membuka lapangan kerja untuk menekan angka pengangguran.
- Meningaktnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang daerah mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten maju lainnya di Indonesia.
- Meningkatnya "daya tarik dan daya tahan" ekonomi lokal melalui penyehatan iklim berinvestasi yang dinamisasi ekonomi dengan didukung oleh sumberdaya manusia yang kompetitif untuk menemukan citra komoditi ekonomi dan produk lokal.
- Meningkatnya pertumbuhan kegiatan ekonomi daerah, edukasi dan promosi potensi ekonomi daerah yang berkualitas dan berkesinambungan serta menciptakan daya saing daerah dalam rangka pengembangan ekonomi lokal. Pencapaian tujuan tersebut akan diupayakan dengan memberikan fasiliatsi dan meningkatkan peran pemerintah serta masyarakat dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan, maju dan mandiri.

(b) Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kabupaten Barito Kuala serta terciptanya efisien dan efektifitas dalam sisitem distribusi yan dapat menjamin kepastian berusaha dari pengembangan sektor industri dan perdagangan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi:

- Meningkatnya investasi dalam skala besar maupun kecil, pemanfaatan teknologi guna meningkatkan efesien dan daya saing.
- Meningkatnya pelaksanaan Modernisasi KUKM, peningkatan nilai tambah produksi, perluasan kesempatan berusaha
- Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan global untuk mendapatkan input dan jalur pemasaran produksi, Pemanfaatan optimal kerjasama strategis bagi kemajuan ekonomi, terwujudnya sisitem tata niaga yang kondusif tanpa adanya regulasi yang tumpang tindih.
- Meningkatnya pelaksanaan pengembangan riset sebagai salah satu basis pengambilan keputusan, terwujudnya persaingan yang sehat dan perlindungan yang layak bagi KUKM

(c) Terwujudnya pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia lokal secara optimal serta Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kabupaten Barito Kuala dari pengembangan sektor pertanian modern yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi

- Meningaktnya pengembangan agribisnis yang berbasis pada SDA pertanian dan jaminan bagi perluasan lahan pertanian, terwujudnya jaminan bagi perluasan lahan pertanian, peningkatan ketersediaan saprodi dan infrastruktur pendukung bagi peningkatan produktifitas.
- Meningkatnya pengembangan pola kemitraan, dan terwujudnya jaminan ketahanan pangan dan taraf hidup petani yang layak.
- Pengembangan pola produksi berbasis masyarakat,serta pelaksanaan reorientasi agribisnis disertai sistem informasi pasar dan jaminan mutu produk
- Pengembangan sumber daya energi alternatif yang mendukung pembangunan berkelanjutan, pengembangan sentra-sentra agribisnis dalam suatu kawasan terpadu secara luas

(d) Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kabupaten Barito Kuala dari pengembangan sektor perikanan dan kelautan modern yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Meningkatnya perluasan dan penganekaragaman dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan bagi agroindustri.
- Terwujudnya sistem pengendalian dan perlindungan sumberdaya perikanan yang efisien dan efektif, pengembangan produksi perikanan dengan mengendalikan penangkapan dan mengembangkan kegiatan budidaya baik di perairan umum maupun di laut secara berkelanjutan dan berorientasi bisnis perikanan
- Peningkatan pengembangan produksi perikanan di wilayah pesisir baik budidaya ataupun tangkap yang terkendali, berkelanjutan dan berorientasi bisnis perikanan.
- Penyelenggaraan transportasi laut global yang layak dari segi, pelayanan jasa angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan dan penyelenggaraan keselamatan maritim

(e) Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kabupaten Barito Kuala dari pengembangan sektor jasa dan transportasi yang lebih bermutu dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi berdaya saing.

- Semakin terarahnya pengembangan SDM dan IPTEK kepada industri berbasis SDA yang ramah lingkungan
- Pengembangan sentra-sentra produksi berbasis keunggulan dan spesifik lokalita dan penetapan struktur perwilayahan pariwisata
- Perkembangan sektor jasa dan pariwisata selaras dengan perkembangan ekonomi
- Meningkatnya keterpaduan perindustrian dan perdagangan dengan sarana pergudangan dan transportasi yang bersifat nasional.

(f) Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kabupaten Barito Kuala dari pengembangan sektor kehutanan yang lebih bermutu dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi berdaya saing.

- Meningkatnya penerapkan prinsip pengelolaan hutan terpadu dengan melibatkan masyarakat mulai dari level perencanaan sampai dengan pemanfaatan berbagai hasil hutan, Pengembangan Hutan Rakyat
- Peningkatan Pengembangan Hutan Rakyat

- Penganekaragaman hasil hutan
- Pengolahan hasil hutan kayu dan bukan kayu lebih lanjut agar tercipta nilai tambah dan rantai produksi lebih luas.

5.1.4. Terwujudnya peningkatkan pemerataan prasarana dan sarana pembangunan

(a) Meningkatnya pemerataan prasarana dan sarana (jaringan transportasi, jalan, jembatan) yang berkualitas disertai perbaikan dan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi yang telah ada di Kabupaten Barito Kuala yang terpadu dan merata ke seluruh wilayah kecamatan.

- Perbaikan dan pemelihara prasarana dan sarana transportasi yang telah ada, tersedianya peningkatan sarana dan prasarana transportasi; Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik, peningkatan kondisi dermaga penyeberangan, terminal lokal, untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi.
- Pembangunan prasarana dan sarana transportasi baru, tersedianya peningkatan sarana dan prasarana transportasi; peningkatan Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik, pembangunan jembatan penyeberangan
- Peningkatan jaringan transportasi inter dan antar moda yang terpadu, tersedianya sarana dan prasarana transportasi; Peningkatan Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik, Peningkatan, terminal lokal,,dermaga penyeberangan, serta pembangunan jembatan penyeberangan , terbentuknya sistem transportasi antar wilayah yang terpadu untuk mendukung percepatan ekonomi.
- Peningkatan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan transportasi. Penyempurnaan sarana dan prasarana transportasi; Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik, Peningkatan kondisi dermaga penyeberangan,, penyelesaian jembatan penyeberangan terbentuknya sistem transportasi antar wilayah yang terpadu dan terbukanya akses perdagangan regional untuk mendukung percepatan ekonomi.

(b) Meningkatnya penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan air bersih kepada Masyarakat dengan cakupan pelayanan yang lebih luas dengan terpeliharanya

sumber air baku, instalasi dan proses pengolahan yang berkualitas dengan tahapan pencapaian sebagai berikut

- Peningkatan cakupan pelayanan air bersih, terpenuhinya kebutuhan air bersih dengan cakupan pelayanan 60%, dengan terpeliharanya sumber air baku dan instalasi serta proses pengolahan yang berkualitas.
- Terpeliharanya sumber air baku secara berkesinambungan, Tahap Kedua adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih dengan cakupan pelayanan lebih luas.
- Peningkatan instalasi pengolahan air bersih, terpenuhinya kebutuhan air bersih dengan cakupan pelayanan lebih luas.
- Peningkatan instalasi pengolahan air bersih, terpenuhinya kebutuhan air bersih dengan cakupan pelayanan lebih luas.

(c) Meningkatnya prasarana dan sarana listrik untuk melayani seluruh konsumen dengan pemanfaatan energi alternatif dan pemeliharaannya yang efisien dan efektif dengan tahapan :

- Peningkatan kapasitas pelayanan listrik serta terpenuhinya kebutuhan listrik dengan cakupan pelayanan luas
- Pemanfaatan sumber energi alternatif dan terpenuhinya kebutuhan listrik dengan cakupan pelayanan lebih luas.
- Peningkatan Pemanfaatan sumber energi alternatif dan terpenuhinya kebutuhan air bersih dengan cakupan pelayanan lebih meningkat.
- Meningaktnya pemeliharaan yang efisien dan efektif dan semakin terpenuhinya kebutuhan listrik dengan cakupan pelayanan yang meliputi seluruh rumah tangga dan wilayah perdesaan

(d) Meningkatnya prasarana dan sarana telematika untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas ,cakupan pelayanan, serta peningkatan peran swasta dalam penyediaan layanan dengan pencapaian :

- Peningkatan cakupan pelayanan serta terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana telematika
- Peningkatan cakupan pelayanan.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas telematika serta terbangun.

- Terpeliharanya sarana dan prasarana telematika.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas telematika.
- Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana telematika.
- Peningkatan peranan swasta dalam penyediaan layanan.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas telematika.
- peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana telematika.
- Peningkatan peranan swasta dalam penyediaan layanan.

(e) Terwujudnya pengembangan dan peningkatan perumahan dan pemukiman masyarakat dengan tahapan :

- Peningkatan dan pemeliharaan perumahan dan permukiman serta terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana perumahan.
- Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana perumahan, (ii) Perluasan akses pembiayaan dan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan Pegawai Negeri Sipil; (iii) Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perumahan.
- Peningkatan peranan swasta.
- Peningkatan pelaksanaan pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dan Pegawai Negeri Sipil.
- Pemeliharaan sarana dan prasarana perumahan.
- Terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana perumahan dengan meningkatkan peranan swasta.
- Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perumahan.

(f) Terwujudnya Perencanaan pembangunan yang sesuai dengan pemanfaatan, perencanaan dan pengendalian tata ruang.

- Menyediakan data-data spasial kegiatan penataan ruang dengan memaduserasikan antara potensi dan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan secara luas dengan terus meningkatkan peran lembaga penataan ruang di daerah

- Menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) untuk memberikan gambaran terinci mengenai pola dan struktur ruang yang didukung oleh semakin vitalnya peran lembaga penataan ruang daerah dengan menyediakan data-data spasial kegiatan pembangunan.
- Menyediakan rencana pemanfaatan ruang untuk kawasan strategis yang terkendali agar kegiatan pembangunan segala sektor sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- Mewujudkan pola dan struktur ruang sesuai RTRWK dengan memperhatikan dan terus menyesuaikan dengan perkembangan pembangunan keruangan secara cermat dan bijaksana.

5.1.5. Pembangunan bidang politik, pemerintahan dan hukum diarahkan untuk mendorong terwujudnya kehidupan yang demokratis, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa (*clean government*), serta terciptanya kepastian hukum, rasa keadilan, tertib/taat hukum.

Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis, pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa serta terciptanya kepastian hukum, rasa keadilan, tertib/taat hukum dengan memberikan kesempatan yang luas dan transparan kepada masyarakat terhadap akses berbagai informasi pembangunan, menciptakan peluang yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasinya secara mudah, terarah dan akomodatif, serta pada akhirnya diharapkan semua elemen masyarakat dapat turut serta dalam kebijakan mencapai kesejahteraan masyarakat, ditandai oleh hal-hal berikut :

(a) Meningkatnya kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan Kabupaten Barito Kuala yang profesional, kompeten, bersih, andal, berwibawa dan bertanggungjawab.

(b) Menerapkan reformasi birokrasi secara bertahap dan berkelanjutan.

(c) Mewujudkan penegakan hukum daerah tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.

(d) Meningkatnya ketertiban dan keamanan pada semua sendi kehidupan bermasyarakat di wilayah Kabupaten Barito Kuala yang menjamin martabat kemanusiaan, keselamatan masyarakat, dan keutuhan wilayah dari ancaman dan gangguan keamanan.

(e) Menguatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang politik, pemerintahan dan hukum adalah sebagai berikut :

(a) Menciptakan peluang yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasinya secara mudah, terarah dan akomodatif.

(b) Menciptakan peran pemerintah sebagai katalisator, regulator, fasilitator, pengarah, pembina, dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan.

(c) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas dan akuntabilitas.

(d) Mewujudkan peningkatan perangkat hukum di daerah.

(e) Meningkatkan penegakan hukum di daerah tanpa pengecualian, (vi) Terwujudnya peningkatan rasa keadilan, tertib hukum dan budaya hukum.

(f) Meningkatnya kerjasama dan partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) untuk setiap tahapan pembangunan.

(g) Mewujudkan penataan organisasi pemerintah daerah didasarkan pada visi, misi, sasaran, strategi, agenda kebijakan, program dan kinerja kegiatan yang terencana; dan diarahkan pada terbangunnya sosok birokrasi yang ramping, efesien, efektif, akuntabel, dan transparan.

(h) Mewujudkan konstruksi hubungan antara hukum dan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga terwujud keterkaitan erat penegakan hukum dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

(i) Meningkatnya penegakkan hukum peraturan daerah.

(j) Meningkatnya budaya hukum pada pemerintah daerah dan masyarakat.

(k) meningkatkan penataan perangkat hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(l) Semakin meningkatnya respon yang tepat dan cepat terhadap permasalahan atau perubahan yang terjadi.

(m) Meningaktnya kerjasama dan partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan untuk setiap tahapan pembangunan.

(n) Meningkatnya ketrampilan aparatur dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik.

(o) Meningkatnya asas tanggungjawab kepada publik atas keputusan dan tindakan penyelenggara pembangunan.

(p) Mewujudkan lembaga sistem informasi yang terbuka bagi setiap pihak untuk setiap tahap pemerintahan;

(q) Semakin mantapnya pemantapan nilai-nilai dan prinsip dasar kehidupan bermasyarakat; antara lain adalah "ketuhanan, kemerdekaan, etika, hak asasi dan martabat manusia, supremasi hukum, kebangsaan, demokrasi, sistem checks and balances, kemajemukan, perbedaan pendapat, kebersamaan, persatuan dan kesatuan, kemitraan, kesejahteraan bersama, dan keadilan".

(r) Meningkatnya penerapan prinsip dasar *good governance*; antara lain adalah "kepastian hukum, transparansi, partisipasi, profesionalitas, dan pertanggung jawaban (akuntabilitas)".

(s) Meningkatnya jamianan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kua

5.2. Arah Pembangunan Daerah

5.2.1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ.

a. Kependudukan

- Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : Penyelenggaraan tertib pengadministrasian kependudukan di Kabupaten Barito Kuala terutama pada pelayanan peristiwa penting kependudukan, seperti pencatatan Kartu keluarga (KK), pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

- Penurunan angka fertilitas dan laju pertumbuhan penduduk. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Peningkatan dan pengembangan keluarga sejahtera. (ii) Peningkatan mutu kesehatan reproduksi. (iii) Pembangunan berwawasan jender.
- Penyebaran penduduk secara merata dengan mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan dan pedalaman. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan di wilayah perdesaan. (ii) Penyediaan akses transportasi di wilayah perdesaan. (iii) Pengembangan ekonomi lokal di wilayah perdesaan.

b. Kehidupan beragama

- Peningkatan pelayanan kegiatan ibadah umat beragama dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan keagamaan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama sesuai pemeluk masing-masing. (ii) Peningkatan pembangunan fasilitas peribadatan.
- Peningkatan pemahaman dan pengalaman agama bagi setiap individu dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Penjaminan kebebasan dan perluasan kesempatan pelaksanaan ajaran agama. (ii) Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas pendidikan maupun lembaga sosial berbasis keagamaan. (iii) Peningkatan kualitas tenaga pengajar di bidang agama.
- Peningkatan dan memantapkan kerukunan, pemahaman dan pengalaman ajaran agama para pemeluk agama sehingga dapat berperan sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Peningkatan kerukunan antar umat beragama. (ii) Peningkatan kegiatan dan pemantapan antar umat beragama maupun maupun secara internal bagi tiap pemeluk agama. (iii) Peningkatan peranan tokoh agama dalam segala kegiatan.

c. Kebudayaan dan Pariwisata

- Pengembangan Kebudayaan Berdasarkan Nilai-nilai Kearifan Lokal. Strategi ini dilakukan melalui arah kebijakan : (i) Membina dan mengembangkan seni dan budaya serta pembangunan prasarana dan sarana kebudayaan dan pariwisata. (ii) Mengintegrasikan kebudayaan lokal/masyarakat dalam program pendidikan formal maupun non formal. (iii) Melakukan pemetaan tempat tujuan wisata yang berpotensi untuk dikembangkan. (iv) Melakukan promosi secara efesien dan efektif tentang obyek-obyek wisata. (v) Pelestarian nilai-nilai budaya serta peninggalan sejarah dan purbakala kawasan cagar budaya, sistem nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat
- Peningkatan promosi wisata untuk menunjang terciptanya jaringan antar obyek wisata secara nasional. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (i) Peningkatan promosi wisata terpadu pada objek wisata unggulan dan objek wisata potensial. (ii) Peningkatan informasi tentang festival budaya pada berbagai promisi wisata dan berbagai pintu masuk wisata. (iii) Peningkatan komunikasi antarperangkat yang bergerak di bidang kepariwisataan khususnya yang menangani promosi wisata.
- Pengembangan Industri wisata. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (i) Peningkatan sumberdaya manusia pada keahlian bidang kesenian budaya dan kerajinan tangan. (ii) Peningkatan peran dan fungsi masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan dan atraksi wisata.
- Pengembangan jalur wisata yang efisien dan menarik. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (i) Pengembangan jalur wisata unggulan. (ii) Pengadaan Infrastruktur pada daerah persinggahan jalur wisata pada wisata unggulan dan potensional.

d. Kesejahteraan Sosial

- Peningkatkan pembinaan dan kualitas pelayanan serta bantuan dasar terhadap anak terlantar, anak asuh, penyandang cacat, penduduk

lanjut usia, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Peningkatan kesejahteraan sosial keluarga/fakir miskin dan penyandang cacat. (ii) Pemberdayaan anak terlantar, anak jalanan, dan anak cacat dengan menjamin dan membekali ketrampilan tumbuh kembang anak secara wajar agar diterima di lingkungannya. (iii) Pemberdayaan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar. (iv) Peningkatan sumberdaya manusia pengelola kesejahteraan sosial. (v) Perluasan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial. (vi) Pemberdayaan komunitas adat terpencil dengan meningkatkan kesejahteraan sosialnya dengan hidup menetap dalam suatu lingkungan permukiman. (vii) Pelayanan dan rehabilitasi bagi korban NAPZA, eks NAPI, dan eks wanita tuna susial dengan mengembalikan korban ke kehidupan yang normal dan diterima di lingkungan sosialnya.

e. Ketenagakerjaan

- Peningkatan peluang usaha yang memiliki daya saing tinggi dengan mengutamakan penyerapan tenaga kerja seluas-luasnya. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Peningkatan peluang berusaha yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. (ii) Peningkatan ketrampilan dan keahlian yang lebih spesifik. (iii) Peningkatan produktivitas kerja melalui pembenahan management sistem tenaga kerja.
- Peningkatan pemenuhan tenaga kerja sesuai dengan pasar kerja baik dalam maupun luar negeri. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Revitalisasi tenaga kerja. (ii) Peningkatan ketrampilan tenaga kerja berdasarkan bidang keahlian. (iii) Pengadaan pelatihan melalui Balai Latihan Kerja.
- Peningkatan partisipasi dunia usaha untuk memacu peningkatan mutu tenaga kerja. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Peningkatan kualitas tenaga kerja di dunia usaha khususnya bagi

tenaga berketrampilan rendah dan menengah. (ii) Peningkatan kualitas pendidikan dan ketrampilan bagi setiap tenaga kerja yang berorientasi pemenuhan kualitas tenaga kerja dan pasar kerja. (iii) Pengembangan jiwa kewirausahaan bagi angkatan kerja. (iv) Perbaikan hubungan sistem ketenagakerjaan, khususnya hubungan antara industri dengan para pekerjanya. (v) Penghapusan tenaga kerja anak

- Penciptaan pasar kerja yang fleksibel, hubungan kerja yang harmonis disertai perlindungan tenaga kerja yang memadai. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Peningkatan peran dan kualitas stakeholders dalam perlindungan tenaga kerja. (ii) Perbaikan sistem pengawasan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja dalam dan luar negeri. (iii) Peningkatan kualitas keselamatan dan kesehatan kerja

f. Perempuan dan Anak

- Peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Peningkatan peran aktif perempuan dalam bidang pembangunan baik ekonomi, sosial, politik, budaya. (ii) Perluasan kesempatan yang lebih luas pada kaum perempuan dalam berkarir dan berkarya. (iii) Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan sebagai salah satu bagian dari sumberdaya manusia termasuk perlindungan tenaga kerja wanita. (iv) Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak. (v) Peningkatan kualitas anak dan perempuan. (vi) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.

g. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknlogi (IPTEK)

- Pemanfaatan dan pengunaan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Pengembangan

IPTEK dalam berbagai bidang pembangunan. (ii) Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian berbagai bidang

- Pemanfaatan dan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dasar sebagai peningkatan kesejahteraan rakyat. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan berdasarkan IPTEK sesuai dengan kemampuan masyarakat pengguna. (ii) Penyebarluasan hasil penelitian pada masyarakat.
- Pengembangan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari para pelaku usaha dan perguruan tinggi kepada masyarakat. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Mengalokasikan dalam bentuk insentif untuk mengembangkan motivasi masyarakat dan lembaga non litbang. (ii) Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan berbasis IPTEK di setiap bidang pembangunan.
- Kerjasama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi dan swasta dalam pengembangan riset unggulan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam penelitian pembangunan. (ii) Peningkatan kerjasama bidang penelitian dan pengembangan berbasis IPTEK terapan dengan berbagai lembaga penelitian masyarakat.

h. Pemuda dan Olah raga

- Peningkatan peran dan fungsi pemuda dalam kegiatan pembangunan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Peningkatan fungsi, peran serta kegiatan lembaga dan organisasi kepemudaan sebagai wadah dalam menampung aspirasi pemuda sehingga mampu mendorong kepedulian pada berbagai permasalahan pembangunan. (ii) Pembinaan generasi muda untuk meningkatkan dimanika kepemudaan dan kepemimpinan. (iii) Pembinaan pengembangan seni dan budaya.

- Peningkatan prestasi olahraga masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang olah raga. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana olahraga. (ii) Peningkatan SDM (pembina, pelatih dan olahragawan) dan kelembagaan olah raga pada berbagai instansi dan organisasi kepemudaan serta wilayah

i. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

- Peningkatan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa dan kelurahan. (ii) Peningkatan pembinaan aparat pemerintah desa dan kelurahan.
- Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa. (ii) Otimalisasi fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
- Peningkatkan kapasitas masyarakat perdesaan dan kelurahan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Peningkatan kualitas SDM masyarakat di perdesaan dan kelurahan. (ii) Pengembangan pelatihan pemberdayaan masyarakat.
- Peningkatan peran, pastisipasi dan keswadayaan masyarakat. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Peningkatan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan. (ii) Peningkatan peran kelembagaan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan secara partisipatif.
- Peningkatan kesejahteraan keluarga dan sosial budaya masyarakat secara dinamis. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat sesuai dengan kondisi lokal. (ii) Pengembangan semangat kegotong-royongan masyarakat dalam pembangunan.

- Pemantapan dan peningkatan peran lembaga dan usaha ekonomi masyarakat. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Peningkatan peran lembaga ekonomi di pedesaan dan kelurahan. (ii) Peningkatan usaha ekonomi masyarakat. (iii) Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan ekonomi penduduk miskin. (iv) Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat miskin melalui pengembangan kemampuan kerja dan berusaha.
- Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya lokal. (ii) Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan. (iii) Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat melalui hasil penemuan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas.
- Peningkatkan kapasitas tata ruang perdesaan dan kelurahan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Peningkatan kualitas dan penataan infrastruktur perdesaan dan kelurahan. (ii) Peningkatan kualitas dan penataan permukiman masyarakat perdesaan dan kelurahan.

j. Pendidikan

- Penuntasan program wajib belajar 9 tahun dan rintisan program wajib belajar 12 tahun terutama di wilayah pedesaan dan pedalaman. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Permberian subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar, (ii) Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, (iii) peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan untuk sekolah pada usia wajib belajar, (iv) peningkatan mutu dan profesionalisme tenaga pengajar sehingga mencapai strata pendidikan S1 dan memiliki sertifikasi sesuai standar mutu nasional.
- Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Unggulan dan Kejuruan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Pengembangan

sekolah percontohan pada setiap jenjang pendidikan melalui penyediaan prasarana dan sarana pendidikan, dan tenaga pengajar yang berkualitas pada setiap kecamatan, (ii) Pengembangan pendidikan kejuruan dan keahlian sesuai kebutuhan pasar kerja setingkat SMU yang mampu bersaing di pasar global, (iii) Peningkatan mutu pendidikan untuk mencapai standar nasional melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, (iv) Pengembangan kerjasama dan jejaring pendidikan dengan sekolah unggulan nasional.

- Perluasan lembaga pendidikan formal dan non formal serta pendidikan informal setingkat perguruan tinggi yang bermutu. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Pengembangan lembaga pendidikan sesuai permintaan tenaga kerja (ii) Percepatan pengembangan lembaga pendidikan di daerah yang kurang berkembang (iii) Pengembangan pendidikan lanjutan pendukung keahlian khusus. (iv) Pengembangan pusat pelatihan yang memiliki standar nasional.

k. Kesehatan

- Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui peningkatan pemahaman kesehatan sebagai upaya menurunkan angka kematian dan meningkatkan usia harapan hidup. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Promosi cara hidup sehat, (ii) Peningkatan kemitraan antara tenaga medis dan non medis (iii) Pemberdayaan perempuan dan keluarga dalam meningkatkan mutu kesehatan keluarga (iv) Pembentukan desa siaga dengan meningkatkan implementasi kesehatan masyarakat (v) Peningkatan mutu pelayanan terhadap lansia.
- Peningkatan pelayanan kepada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu menyusui, pelayanan bayi dan balita. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Peningkatan jangkauan pelayanan ibu hamil dan bersalin oleh tenaga kesehatan. (ii) Pengembangan informasi kesehatan bagi ibu-ibu hamil & menyusui.

- Peningkatan pencegahan penyakit menular dan wabah sejak dini dengan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta berperilaku hidup bersih dan sehat. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Peningkatan hygiene sanitasi lingkungan perumahan dan tempat-tempat umum lainnya. (ii) Peningkatan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan untuk pencegahan penyakit. (iii) Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dengan meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat.
- Pengembangan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan untuk masyarakat, pekerja, dan keluarga miskin serta perlindungan kepada masyarakat miskin untuk mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Pengembangan sistem dan pelayanan kesehatan yang terintegrasi. (ii) Peningkatan program pemeliharaan kesehatan masyarakat yang sangat memerlukan pelayanan kesehatan seperti santun lansia. (iii) Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan yang murah melalui berbagai program subsidi. (iv) Peningkatan gizi masyarakat yang mendukung tercapainya sumberdaya manusia yang bermutu.
- Peningkatan dan pemerataan fasilitas kesehatan di setiap Kecamatan dengan dilengkapi sarana pendukung kesehatan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Pemantapan kerjasama lintas program & sektor yang berkaitan dengan bidang kesehatan. (ii) Pemantapan akreditasi fasilitas kesehatan. (iii) Pemantapan mutu dan perluasan jangkauan kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan terutama pada wilayah pedalaman, perdesaan dan kawasan rawan bencana. (iv) Penambahan fasilitas kesehatan yang dapat menciptakan tenaga kesehatan.
- Peningkatan dan pemerataan tenaga medis, paramedis dan non medis di setiap kecamatan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Peningkatan pendidikan dan latihan bagi tenaga kesehatan (ii) Peningkatan mutu sumberdaya dengan meningkatkan perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan dengan meningkatkan

profesionalisme. (iii) Peningkatan jumlah tenaga medis, spesialis dasar dan tenaga ahli kesehatan. (iv) Peningkatan tenaga medis sampai ke pelosok perdesaan dan pedalaman.

- Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana (KB), dalam mewujudkan keluarga kecil, bahagia, sejahtera. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (i) Pemenuhan permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. (ii) Peningkatan pemahaman pengetahuan sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksi. (ii) Peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. (iii) embinaan kemandirian, peningkatan cakupan dan mutu layanan KB, dan kesehatan reproduksi. (iv) Pemberian informasi penggunaan alat kontrasepsi kepada pasangan usia subur, dan remaja; maupun KB mandiri. (v) Peningkatan sosialisasi program keluarga berancana sampai pedalaman. (vi) Pengendalian angka kelahiran dan memperkecil angka kematian.

5.2.2. Mengoptimalkan Pengelolaan SDA untuk Menjamin Kelanjutan Pembangunan dan Menjaga Keseimbangan Lingkungan

a. Lingkungan Hidup

- Pengembangan kerangka dasar pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia khususnya dalam rangka penanganan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. (ii) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan stakeholder lainnya. (iii) Penetapan perangkat hukum dalam penegakan lingkungan hidup. (iv) Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati beserta habitatnya, serta fauna dan flora spesifik yang ada.
- Pengelolaan lingkungan hidup dalam mewujudkan kelestarian lingkungan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Perlindungan terhadap kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, terutama untuk melindungi hewan dan tanaman

langka, (ii) Peningkatan inventarisasi, penelitian, pendataan dan pengembangan informasi bidang lingkungan hidup, (iii) Peningkatan pelayanan dan pengawasan pada lokasi kegiatan pembangunan yang rawan perubahan rona lingkungan alam (iv) Pelaksanaan sanksi atau hukuman yang lebih tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan, (v) Pengendalian kerusakan hutan dan lahan dalam skala luas. (vi) Pengendalian pemanfaatan kawasan lindung, (vii) Pengendalian pemanfaatan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan dan perdesaan, (viii) Peningkatan upaya resapan air ke dalam tanah, (ix) Perlindungan ekosistem yang memiliki fungsi lindung dan resapan air

- Pengelolaan lingkungan hidup berbasis mitigasi bencana alam. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan Mewujudkan kinerja sistem manajemen bencana alam dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Identifikasi dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana, (ii) Pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana. (iii) Perencanaan wilayah yang mengacu pada kemungkinan terjadinya bencana alam. (iv) Sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini terhadap ancaman dan mekanisme antisipasi bencana alam kepada masyarakat. (v) Pengendalian wilayah hulu sungai sesuai dengan fungsi kawasan. (vi) Pengelolaan pengendalian banjir dan pengamanan kawasan DAS

b. Kehutanan

- Penjaminan keberadaan sumberdaya hutan dalam luasan yang mencukupi dan menjamin pengelolaan hutan secara lestari dan intensif guna mendukung peningkatan kualitas ekosistem. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Pemberantasan pembalakan illegal, (ii) penegakan hukum dan meningkatkan partisipasi para pihak kehutanan, (iii) pemantapan kawasan hutan, (iv) penjagaan kawasan hutan lindung dengan tidak melakukan alih fungsi lahan, (v) perluasan

informasi dan pendidikan tentang manfaat kelestarian hutan bagi masyaraat.

- Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) percepatan pemulihan lahan yang kritis dan meningkatkan partisipasi masyarakat, (ii) peningkatan akses masyarakat setempat dalam pemanfaatan SDH dan melestarikannya, (iii) peningkatan reboisasi hutan.
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang diimbangi dengan peningkatan kualifikasi sumberdaya manusia, dan (ii) penciptaan industri yang efisien dan berdaya saing global serta peningkatan penyerapan tenaga kerja.

5.2.3. Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Maju Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Pada Potensi Dan Keunggulan Lokal.

Pembangunan bidang ekonomi, diarahkan untuk mengembangkan produksi dan produktivitas usaha guna mencapai peningkatan pendapatan dan kesejahteraan yang berbasis pada potensi sumberdaya manusia sumberdaya alam dengan dukungan infrastruktur yang kuat. Dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang tangguh dengan ciri memiliki fondasi yang kokoh serta mampu secara nyata memberikan kesejahteraan pada masyarakat secara berkeadilan, maka diperlukan strategi dan kebijakan ekonomi dengan arahan sebagai berikut :

(a) Meningkatkan **efisiensi** berbagai sumberdaya ekonomi dengan kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong : (i) Peningkatan produksi dan produktivitas ekonomi dan nilai tambah produksi dengan memanfaatkan teknologi tepat guna dengan tetap mempertimbangkan kemampuan operasional pada pelaku utama dan pelaku usaha. (ii) Peningkatan sistem informasi penanaman modal untuk menunjang peningkatan investasi. (iii) Penganekaragaman produk industri dengan menggunakan bahan baku lokal.(iv) Peningkatan efisiensi pemasaran produk usaha ekonomi masyarakat guna meningkatkan nilai jual dan keuntungan bagi pelaku utama

perekonomian. (v) Peningkatan kualitas kerjasama dengan pola kemitraan yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak baik secara lokal maupun antar daerah. (vi) Peningkatan pelaksanaan riset untuk menemukan paket teknologi baru dengan memanfaatkan sumberdaya alam sesuai potensi daerah.

(b) Menciptakan **sistem distribusi** yang efisien dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong perluasan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi melalui : (i) Perluasan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat menengah kebawah. (ii) Pengembangan sistem tata niaga yg kondusif dengan ditopang oleh regulasi yg saling melengkapi melalui pemanfaatan sistem resi gudang (SRG) dan pupuk bersubsidi. (iii) Penciptaan iklim persaingan yang sehat. (iv) Perlindungan bagi berkembangnya Kelompok Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) / Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui pengembangan sistem dan jaringan transportasi yang mendukung penyediaan dan penyaluran sarana produksi. (v) Pemasaran paket-paket produk unggulan daerah.

(c) Mewujudkan **struktur ekonomi** yang mencerminkan keseimbangan peran antara berbagai sektor strategis yang akan mendorong : (i) Pengembangan dan ***peningkatan*** sumberdaya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) ke arah pengelolaan sumberdaya alam lokal dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan. (ii) Pengembangan sentra produksi usaha rakyat berbasis keunggulan daerah. (iii) Pengembangan sektor jasa dan pariwisata selaras dengan perkembangan ekonomi. (iv) Pengembangan produk industri kecil dan menengah yang memiliki potensi untuk memenuhi permintaan pasar regional, nasional dan internasional (pasar global).

(d) Mewujudkan **pertanian berkelanjutan** dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong : (i) Penetapan kawasan konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup (habitat) sumberdaya pertanian (ii) Jaminan bagi keberlangsungan dan perluasan lahan pertanian, peningkatan ketersediaan sarana produksi pertanian (saprotan) dan infrastruktur pendukung bagi peningkatan produktivitas. (iii) Peningkatan ketahanan pangan dan taraf hidup

petani yang layak. (iv) Pengolahan hasil perkebunan lebih lanjut agar tercipta nilai tambah dan jaringan pemasaran yang lebih luas dan kompetitif. (v) Reorientasi agribisnis disertai sistem informasi pasar dan jaminan mutu produk. (vi) Pengembangan sentra-sentra agribisnis dalam suatu kawasan terpadu secara luas.

(e) Mewujudkan pemanfaatan secara optimal **potensi perikanan dan kelautan** dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong : (i) Penetapan kawasan konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup (habitat) sumberdaya ikan. (ii) Revitalisasi aturan-aturan lokal tentang penangkapan dan budidaya ikan. (iii) Regulasi pemanfaatan sumberdaya ikan. (iv) Pengembangan potensi sumberdaya ikan spesifik dan lokal. (v) Diversifikasi produk perikanan dan kelautan bagi industri dan perdagangan.

(f) Mewujudkan pemanfaatan barang dan jasa **hasil hutan** secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kelestarian ekosistem dan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas dengan : (i) Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. (ii) Mengoptimalkan aneka fungsi hutan untuk mencapai manfaat sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang melalui terbentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). (iii) Pembangunan kehutanan secara lestari melalui pendekatan *"forest resource management*" dengan memperhatikan keanekaragaman ekosistem, manfaat dari hasil hutan (kayu dan non kayu), kondisi fisik kawasan dan kepentingan para pihak. (iv) Merevitalisasi pengelolaan hutan yang dikembangkan sesuai konsep pengelolaan hutan lestari dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada prinsip efesiensi, ramah lingkungan, variasi produk dan nilai tambah. (v) Pengkajian neraca sumberdaya alam dan optimalisasi PDRB-termasuk PDRB hijau akan ditempuh melalui pengelolaan hutan secara lestari baik dalam areal hutan alam dan hutan tanaman (indusrti dan rakyat) serta peningkatan produk hasil hutan non kayu (*non timber forest product*). (vi) Memberikan insentif dan reward bagi perusahaan dan masyarakat yang mampu mengelola hutan sesuai prinsip-prinsip kelestarian.

(g) Mengoptimalkan **sumberdaya alam pertanian** dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong : (i) Pengembangan agribisnis dan usaha perekonomian lainnya dengan tetap berbasis pada pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. (ii) Pengembangan pola-pola kemitraan yang berorientasi pada kesamaan tujuan, kesejajaran dan berkeadilan dalam memperoleh manfaat secara bersama-sama. (iii) Pengembangan pola produksi berbasis masyarakat dan sumberdaya baru terbarukan yang mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya mineral, air, tanah dan sumberdaya alam lainnya. (iv) Pengembangan sumberdaya energi baru terbarukan dengan memperhatikan keseimbangan alam dan lingkungan. (v) Pengembangan usaha mitigasi bencana alam sebagai akibat dari pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak baik.

(h) Mengoptimalkan sumberdaya **Pelaku Usaha** dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong : (i) Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)/Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui pola kemitraan dengan pihak lainnya. (ii) Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) yang profesional. (iii) Pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sebagai basis usaha ekonomi kerakyatan dalam rangka pemberdayaan KUMKM, Sistem Resi Gudang (SRG) dan pupuk bersubsidi. (iv) Memprioritaskan keikutsertaan pelaku usaha di dalam berbagai kegiatan pembangunan. (v) Memprioritaskan pelaku usaha daerah dalam berbagai kepemilikan asset diberbagai bidang usaha.

(i) Meningkatkan **kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan** dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong : (i) Pencapaian taraf hidup ekonomi masyarakat yang sejahtera. (ii) Pencapaian pemerataan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (iii) Penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha guna mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (iv) Penguatan kemampuan fiskal daerah yang mandiri. (v) Meningkatkan peredaran uang di masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha daerah yang profesional.

5.2.4. Mengembangkan dan meningkatkan pemerataan prasarana dan sarana pembangunan

Secara keseluruhan pembangunan prasarana dan sarana ini diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik dengan arah dan strategi sebagai berikut :

(a) Pemerataan pelayanan transportasi darat antar wilayah maupun di dalam wilayah perkotaan dan perdesaan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Peningkatan aksesibilitas jaringan jalan yang menghubungkan pusat pusat aktifitas dan wilayah sekitarnya terutama dengan kawasan perdesaan (ii) Peningkatan tingkat pelayanan dan pemeliharaan jalan, (iii) Peningkatan kelas jalan utama yang menghubungkan dalam dan luar wilayah serta pada pusat-pusat aktivitas.

(b) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana ASDP untuk menunjang pergerakan intermoda. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Peningkatan prasarana dermaga / penyeberangan sungai di daerah yang mempunyai angkutan perjalanan tinggi, (ii) Peningkatan keterkaitan transportasi intermoda yang berhubungan antara daratan yang terpisah oleh sungai dengan dukungan transportasi sungai

(c) Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung terhadap pembentukan kawasan strategis daerah sehingga terjadi keterpaduan yang saling mendukung. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Pembangunan jalan baru yang mengarah pada akses ke kawasan strategis daerah (ii) Peningkatan aksesibilitas transportasi darat yang mendukung terhadap distribusi barang dan jasa, (iii) Peningkatan kualitas jalan pada kawasan pedalaman, (iv) Peningkatan keterpaduan koneksitas sistem jaringan transportasi intermoda yang mampu menghubungkan keterkaitan antara darat dan sungai.

(d) Pengembangan jaringan irigasi/pengairan untuk melayani perluasan areal sawah. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Peningkatan kelayakan, dan rehabilitasi jaringan irigasi (ii) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan tambak, (iii) Pencetakan sawah baru pada lokasi potensial.

(e) Pengembangan jaringan daerah rawa. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Peningkatan dan pembangunan jaringan tata air daerah rawa, (ii) Pembangunan dan pengelolaan irigasi, rawa, dan tambak.

(f) Konservasi sumberdaya air. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan Konservasi sumberdaya air. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Peningkatan partisipasi masyarakat melalui GUKPA (Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air), (ii) Peningkatan pengamanan pantai dan sungai.

(g) Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang melalui rehabilitasi, repowering pembangkit yang ada dan pembangkit baru serta pengembangan diversifikasi energi dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang sudah beroperasi sehingga mampu mendukung pasokan listrik pada beban puncak, (ii) Penyediaan pembangkit listrik dengan jenis PLTD dan PLTU untuk penyediaan jangka pendek, maupun melalui penyediaan mikro hidro dan mini hidro, (iii) Penyediaan listrik pedesaan tenaga matahari atau berupa pembangkit listrik tenaga air yang lebih sesuai sebagai upaya pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah, iv) Peningkatan kerjasama antar pelaku kelistrikan.

(h) Peningkatan kualitas layanan dan pengembangan sistem ketenagalistrikan dengan melakukan manajemen sumber daya listrik yang berwawasan lingkungan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Peningkatan pengawasan dan pemahaman terhadap pengunaan listrik di masyarakat, (ii) Peningkatan efisiensi dengan cara penekanan terjadinya losses tenaga listrik, (iii) Pengembangan interkoneksi sistem jaringan tenaga listrik dalam rangka untuk penyediaan sumber daya listrik yang aman terutama pada kondisi jam puncak, (iv) Penyediaan pembangkit listrik baru pada kawasan baru

(i) Mewujudkan pembangunan dan pengembangan telematika dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong : (i) Peningkatan cakupan pelayanan telekomunikasi dan informasi ke segenap wilayah dengan harga yang semakin terjangkau, (ii) Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas telematika,

(iii) Peranan swasta dalam meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana telematika perlu dipertimbangkan secara cermat dan terkoordinir dengan baik.

(j) Mewujudkan pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong : (i) Penetapan kawasan perumahan dan permukiman yang responsitif terhadap perubahan alam. (ii) Peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan permukiman berwawasan lingkungan, (iii) Perencanaan perumahan sederhana dan layak pakai yang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. (iv) Peningkatan peranan swasta dalam penyediaan perumahan.

(k) Meningkatkan pembangunan dan pengembangan fasilitas perkantoran, fasilitas umum dan sosial dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong : (i) Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran dan fasilitas umum sesuai kebutuhan. (ii) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkantoran dan fasilitas umum sesuai perkembangan teknologi. (iii) Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana secara sistematis dan kontinyu.

5.2.5. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

a. Politik

- Pengembangan sistem politik yang demokratis yang ditopang dengan kemandirian infrastruktur politik agar mantapnya interaksi politik antara infrastruktur dan suprastruktur stabilitas politik serta sosial budaya dalam wilayah NKRI. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Pengembangan struktur politik yang demokratis di daerah, (ii) Pengembangan etika, moral dan budaya politik yang demokratis, (iii) Peningkatan kualitas integrasi sosial budaya melalui peningkatan kelembagaan sosial budaya, perbaikan perilaku yang menyimpang dan pengembangan sumberdaya pranata sosial.
- Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional mandiri, independen dan non partisan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) pengembangan sistem dan mekanisme pemilu yang

demokratis langsung, (ii) peningkatan kemandirian Orpol, Ormas dan LSM, (iii) percepatan pengembangan pendidikan politik.

b. Pemerintahan

- Meningkatkan **Layanan kepada Masyarakat.** Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Penyederhanaan sistem *perizinan dan non perizinan*, dengan bentuk organisasi seperti ; pos, satuan layanan, unit pelaksana teknis (UPT), kantor dan dinas. Semua organisasi tersebut harus mencantumkan secara transparan syarat, biaya dan prosedur perizinan dan non perizinan. (ii) Peningkatan secara berangsur-angsur layanan kesehatan gratis di luar tindakan, pengobatan gratis untuk semua warga dan layanan asuransi kesehatan bagi masyarakat. (iii) Peningkatan layanan pendidikan gratis untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah, melalui kebijakan SPP dan buku gratis.
- Meningkatkan Sistem Manajemen Pemerintahan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Peningkatan tunjangan kesejahteraan kepada pegawainya secara layak dan proporsional, dengan dasar hukum yang kuat, berdasarkan pada kehadiran dan atau kinerja. (ii) Pengembangan praktik good governance yang terkait erat dengan pola manajemen kinerja, pada pelaksanaan seperti ; Anggaran Berbasis Kinerja, Pengadaan Barang dan Jasa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), Kontrak Kinerja, Penilaian Kinerja, dan Re-Organisasi dan Tata Kerja.
- Peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai dan upaya pemerataan pegawai di daerah. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) peningkatan pendidikan dan pelatihan pegawai; (ii) pengembangan institusi dan peningkatan komitmen pimpinan birokrasi dalam mendukung peningkatan kualitas pegawai; (iii) membuat pemetaan pegawai yang ada di semua kecamatan, terutama tenaga pendidik dan tenaga kesehatan agar pelayanan publik dapat optimal.
- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan

pembangunan. (ii) Pengembangan unit/layanan pengaduan masyarakat melalui media yang dapat dengan mudah diakses oleh semua pihak.

- Memantapkan Reformasi Birokrasi. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Pemantapan reformasi sistem birokrasi/restrukturisasi organisasi aparatur pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang effektif dan effisien. (ii) Peningkatan (revitalisasi) pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan, yang selaras dengan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur yang berbudaya kerja.
- Menguatkan kompetensi Pemerintahan Desa. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur pemerintahan desa, melalui pendidikan pelatiahan dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kepemerintahan dan pelayanan publik. (ii) Peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lembaga pemerintahan desa, melalui peningkatan infrastruktur/ saranan dan prasarana pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

c. Hukum

- Peningkatan kuantitas dan kualitas aparat hukum melalui pembinaan dan pendidikan serta latihan arapat hukum. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) peningkatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat guna meningkatkan kualitas kinerja aparat hukum dalam merealisasikan pembentukan badan kerjasama guna menekan angka kriminalitas, (ii) penyelenggaraan pelatihan, pendidikan, bagi aparat hukum.
- Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral guna meningkatkan kualitas kinerja aparat hukum guna memfasilitasi penyediaan regulasi dan pembentukan badan kerjasama atau forum-forum penegakan hukum. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : Pembentukan forum koordinasi dan komunitas secara terpadu antar organisasi perangkat hukum dengan organisasi kekuatan sosial politik di masyarakat agar terjadi penanganan secara cepat dalam rangka penegakan hukum guna menangkal potensi gangguan Kamtibmas di masa yang akan datang.

- Peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi dan keterlibatan relawan dalam menjamin kepastian, keadilan dan penegakan hukum. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan hukum, pelaksanaan hukum, serta monitoring, evaluasi, dan penanganan sengketa hukum dalam menjamin kepastian, keadilan dan penegakan hukum, (ii) peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program-program penyuluhan kesadaran hukum.
- Peningkatan kapasitas aparat hukum dalam menjamin kepastian, keadilan dan penegakan hukum. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan : (i) peningkatan kapasitas dalam menindak setiap perkara pelanggaran Perda secara adil, transparan dan akuntabel, (ii) Pengembangan pos pemantau terpadu di setiap daerah/kecamatan.

5.3. Sasaran Pokok

5.3.1. Arah Pembangunan Lima Tahun I (2005 – 2007)

Pembangunan jangka panjang pada tahap pertama diarahkan peningkatan kualitas ***sumberdaya manusia*** sehingga dalam jangka panjang memiliki daya saing yang tinggi; ***pengembangan ekonomi*** diarahkan pada pembentukan struktur ekonomi yang mapan dan lebih berpihak pada rakyat banyak; ***infrastruktur dasar*** untuk mendukung aksesibilitas dan arah pengembangan kawasan prioritas; pemerintahan kabupaten dan kecamatan berjalan dengan lebih efisien dan efektif, dan ***hukum lebih diutamakan***; serta ***penataan ruang*** menjadi dasar kebijakan pembangunan dengan mengedepankan ***kelestarian alam dan lingkungan***. Pola ini diharapkan menjadi dasar pembentukan masyarakat yang sejahtera dengan dasar pembangunan yang berkeadilan.

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia ditandai dengan peningkatan berbagai bidang terkait khususnya pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai indeks pembangunan manusia (IPM). Hal ini juga akan sangat ditunjang oleh peningkatan penelitian dan penguasaan Iptek, peningkatan peran wanita dalam pembangunan, peningkatan

kegiatan pemuda dan olahraga serta didukung oleh kebersamaan antar pemeluk agama dan semakin diperhatikannya kesejahteraan sosial masyarakat.

Pada tahap pertama ini peningkatan kualitas SDM yang dilakukan melalui peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan dengan memantapkan wajib belajar 9 tahun, pembinaan dan pengembangan pendidikan menengah umum dan kejuruan, pendidikan informal, perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk mendukung kebutuhan pengembangan SDM maka diperlukan dukungan Litbang dan Iptek yang aplikatif di berbagai bidang pembangunan.

Peningkatan kesehatan masyarakat dilakukan melalui promosi hidup sehat dan pembedayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman kesehatan pada segenap lapisan masyarakat, serta perluasan sosialisasi pada masyarakat tentang kebersihan lingkungan serta berperilaku hidup bersih dan sehat; disertai berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Pengembangan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin untuk mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu. Distribusi penduduk yang sangat besar memerlukan peningkatan dan pemerataan fasilitas kesehatan di setiap kecamatan. Peningkatan pelayanan fasilitas dan pelayanan kesehatan perlu dimulai dengan melakukan pemerataan tenaga medis, paramedis dan non medis di setiap kecamatan. Perkembangan penduduk yang cukup tinggi memerlukan pengendalian angka kelahiran dan memperkecil angka kematian. Dalam bidang kesehatan ini juga dilakukan peningkatan informasi kesehatan, pelayanan KB, sampai pada KB mandiri.

Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kemampuan keahlian dan peluang usaha dengan mengutamakan penyerapan tenaga kerja, peningkatan produktivitas kerja, dan upaya peningkatan kualitas untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, disertai pemberian informasi ketenagakerjaan. Mengingat perlunya peningkatan kualitas tenaga kerja, maka diperlukan partisipasi dunia usaha, serta menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan bagi angkatan kerja. Pada tahap ini telah mulai dilakukan peningkatan kesejahteraan serta hak-hak pekerja sekaligus dilakukan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja sekaligus serta penghapusan tenaga kerja anak.

Dalam bidang keagamaan, dilakukan peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama sesuai pemeluk masing-masing. Hal ini juga didukung oleh peningkatan kerukunan umat beragama. Meskipun demikian tetap diperlukan partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan keagamaan melalui peningkatan pembangunan fasilitas peribadatan dan kegiatan keagamaan bagi setiap pemeluk agama masing-masing, juga peningkatan kualitas melalui berbagai program pendidikan bagi pengajar keagamaan.

Banyaknya masalah kesejahteraan sosial yang memerlukan penanganan khususnya terutama anak terlantar, anak asuh, keluarga miskin dan korban bencana perlu dikurangi jumlahnya secara menerus dan juga diperluas jangkauan pelayanannya. Hal ini dilakukan dengan (i) pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat, (ii) peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat, dan (iii) pengelompokan pemukiman untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan pelayanan umum.

b. Pengembangan Ekonomi Wilayah

Konsep dasar pengembangan ekonomi masing-masing wilayah adalah dengan dengan bersandar pada pendayagunaan potensi sumberdaya lokal dan meningkatkan kemampuan partisipasi masyarakat dalam mengatasi ketertinggalannya. Upaya yang diperlukan adalah meningkatkan pemerataan antarwilayah dan antarsektor perekonomian dengan (i) menumbuhkan pusat kegiatan ekonomi baru dengan memperhatikan produk andalan lokal, (ii) peningkatan akses masyarakat dan usaha mikro, kecil dan menengah kepada modal, pasar, informasi dan teknologi, (iii) kerjasama dan keterkaitan ekonomi antar wilayah, (iv) peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat. Penataan dasar yang diperlukan adalah meningkatkan peran sektor pertanian secara luas, pengembangan komoditas yang memiliki peluang ekspor, melakukan promosi Investasi dan perdagangan.

Pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dalam tahap awal diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan sendiri melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pertanian untuk menunjang ketahanan pangan, penetapan daerah sentra pembangunan pertanian, pembentukan kawasan agropolitan, serta pengembangan sistem dan usaha agribisnis secara terpadu dan utuh. Selanjutnya di bidang pertanian tanaman pangan dilakukan pengembangan infrastruktur pengairan sebagai penunjang utama pertanian.

Kehutanan memiliki peran penting bagi pengembangan ekonomi, tetapi secara bertahap perannya sebagai pengeksport bahan mentah dikurangi. Dalam tahap pertama diperlukan pemetaan potensi dan fungsi hutan disertai pengelolaan hutan secara lestari dan intensif. Mengingat banyaknya kerusakan pada sumberdaya hutan, maka tindakan rehabilitasi dan

konservasi SDH dilakukan dalam skala luas, meningkatkan akses masyarakat setempat dalam pemanfaat SDH dan melestarikannya.

Pengembangan perkebunan memiliki peran penting dalam perekonomian Kabupaten Barito Kuala pada masa yang akan datang, sehingga sangat diperlukan peletakan dasar pengembangan perkebunan baik terkait dengan penyiapan lahan, pengembangan komoditas dan teknologi tepatguna, serta pengolahan hasil perkebunan maupun infrastruktur dan SDM & kelembagaan terkait. Pengembangan perkebunan ini dilakukan dengan melakukan pemilihan komoditas potensial, pembentukan sentra perkebunan sebagai kutub pertumbuhan bagi daerah sekitarnya.

Pengembangan peternakan diarahkan menjadi ternak andalan dan unggulan, pemenuhan kebutuhan daging dan telor, disertai pengembangan infrastruktur yang mendukung kelancaran usaha peternakan. Pengembangan peternakan juga didorong untuk membentuk pengolahan produk peternakan. Mengingat pengolahan produk peternakan ini memiliki nilai ekonomi tinggi maka diperlukan pembentukan peluang pemasaran seluas-luasnya kepada pelaku usaha. Pembinaan pengembangan dan pengelolaan ternak bagi masyarakat juga diperluas pada skala ekonomis, dan memiliki daya saing sebagai bagian dari agribisnis dan agroindustri bidang peternakan.

Pengembangan kelautan dan perikanan dilakukan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, serta peningkatan aksesibilitas ke sentra-sentra produksi perikanan. Pengembangan kelautan dan perikanan ini perlu didukung oleh investasi dan kemitraan, disertai upaya pengolahan produk perikanan sebagai produk unggulan Kabupaten Barito Kuala yang ramah lingkungan, dan penggunaan teknologi unggulan perikanan.

Pengembangan perekonomian ini sangat memerlukan peningkatan kuantitas dan kualitas investasi yang bersumber dari dalam dan luar negeri, yang dilakukan dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat murah, dan nyaman, jaminan keamanan dan kepastian hukum, menciptakan iklim investasi yang kondusif, promosi dan kerjasama investasi, agar dapat membuka lapangan kerja baru dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.

Dalam pengembangan perekonomian peran perindustrian, perdagangan dan koperasi sangat penting dan menentukan. Industri pengolah hasil pertanian, pengembangan industri

berbasis produk ungulan daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, cluster industri berbasis komoditas unggulan. Pengembangan ini harus disertai peningkatan kualitas SDM dan penciptaan iklim yang kondusif dalam skala regional dan lokal.

Berbagai produk Kabupaten Barito Kuala harus dipasarkan seluas-luasnya melalui peningkatan volume perdagangan disertai kerjasama antar daerah. Dalam tahap ini neraca perdagangan semakin ditingkatkan. Peran koperasi, usaha kecil dan menengah melalui ekonomi produktif. Dalam tahap ini juga dilakukan pembuatan prioritas perdagangan (eksport) non migas. Untuk ini juga diperlukan penguatan usaha dan lembaga pedagangan, perlindungan terhadap konsumen, meningkatkan tertib usaha niaga, peningkatan daya saing, perluasan pasar ekspor dan promosi.

Pariwisata, meskipun belum dominan tetapi memiliki prospek pengembangan yang sangat baik, dan pengembangan pariwisata ini dilakukan dengan menciptakan keterkaitan antar kepariwisataan secara regional dan nasional, pengembangan promosi wisata dan disertai dengan penetapan dan pengembangan objek dan atraksi wisata unggulan. Kegiatan ini ditunjang oleh pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan termasuk kesenian dan pengembangan sumberdaya manusia bidang kepariwisataan. Selanjutnya pendukung utama perkembangan pariwisata dilakukan melalui pembentukan sentra pelayanan pariwisata, penetapan festival budaya, penetapan jalur wisata. Wisata andalan pada masa yang akan datang yakni wisata alam dan bahari harus ditingkatkan dan dijadikan daya tarik utama.

Untuk meningkatkan nilai ekonomis maka diperlukan peningkatan alternatif pengelolaan bahan tambang potensional dan sumberdaya alternatif migas. Pada kawasan pertambangan juga dilakukan pembuatan basis data dan penataan ruang pertambangan yang serasi antar sektor. Terkait dengan pemanfaatan ruang bekas penambangan diperlukan penataan dan penertiban bekas tambang dengan melakukan reuse, sebagai langkah intensifikasi.

c. Prasarana Dasar

Prasana dasar yang sangat diperlukan dalam pembangunan adalah transportasi, irigasi dan kelistrikan. Secara keseluruhan ketiga bidang ini sangat menunjang keberhasilan pembangunan antara lain untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, integrasi wilayah dan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Pengembangan transportasi darat dalam tahap pertama diarahkan pada upaya pemerataan terutama untuk menghindari kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan, antar wilayah, antar kecamatan dan antar pedesaan, dan membuka isolasi wilayah, serta peningkatan jalan kabupaten. Pengembangan ini juga diharapkan akan menjadi stimulan bagi pengembangan wilayah di bidang lain, seperti kehutanan, perkebunan, pariwisata dan bidang lainnya sehingga terbentuk pola jaringan yang terpadu. Mengingat di Kabupaten Barito Kuala angkutan perairan khususnya sungai sangat penting, maka juga dikembangkan sistem intermoda melalui pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi Sungai untuk menunjang pergerakan intermoda.

Pengembangan sistem irigasi dilakukan dengan memprioritaskan pada kemampuan dalam pengairan yang menunjang pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah. Pengembangan jaringan daerah rawa dilakukan untuk peningkatan dan pembangunan jaringan tata air daerah rawa dan tambak.

Energi listrik di Kabupaten Barito Kuala harus ditingkatkan mulai dari penyediaan sumber daya listrik dengan pembangunan dan pengembangan listrik perdesaan melalui kerjasama operasional PLN dan partisipasi pemerintah,selanjutnya pengembangan jaringan pelayanan (PLTD) Marabahan dan Barito (Banjarmasin). Secara bertahap juga dilakukan perbaikan tegangan sesuai standar tegangan di bawah 90 % dari tegangan normal pada daerah.

d. Politik, Pemerintahan dan Penegakan Hukum

Pada dasarnya kegiatan yang dilakukan adalah secara terus menerus melakukan peningkatan pelayanan bidang pemerintahan kesegenap masyarakat, meningkatkan koordinasi antara instansi terkait secara terpadu, meningkatkan efisiensi dan kinerja organisasi perangkat daerah, susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis, serta keterpaduan pengelolaan pembangunan daerah. Pada tahap ini dilakukan melalui peningkatan kualitas sumberdaya aparatur antara lain melalui upaya (i) penataan kembali sumberdaya aparatur sesuai dengan kebutuhan akan jumlah kompetensinya, (ii) meningkatkan kompetensi sumberdaya aparatur melalui diklat struktural, teknis dan fungsional, (iii) pembinaan mental spiritual sumberdaya apratur dengan harapan adanya peningkatan etika, moral dan akhlak dalam fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, melalui (i) penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintah daerah agar

dapat berfungsi lebih memadai, luas dan responsip, (ii) peningkatan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintah daerah, dan (iii) penataan dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi mayarakat.

Peningkatan pada bidang hukum dilakukan dengan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana hukum, pengembangan struktur organisasi setingkat muspika di wilayah kecamatan. Dalam tahap pertama ini juga dilakukan peningkatan kapasitas aparat hukum dalam menjamin supremasi dan kepastian hukum, keadilan dan penegakan hukum.

Pengembangan sistem politik yang demokratis, pemantapan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Selanjutnya juga dilakukan peningkatan kewaspadaan nasional dan ketahanan bangsa terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan atas kehidupan berbangsa dan bernegara serta meningkatkan kesadaran bela negara segenap warga masyarakat. Melakukan peningkatan integrasi sosial – budaya disertai penguatan kelembagaan dan perilaku sosial yang menyimpang.

e. Penataan Ruang dan Lingkungan

Penataan ruang melalui kegiatan: perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dan partisipatif. Penataan ruang khususnya tata guna tanah diikuti dengan tertib penggunaan/penguasan tanah, tertib administrasi pertanahan, tertib hukum pertanahan, dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup. Program penataan ruang dilakukan secara terintegrasi dengan berbagai program pembangunan yang dimulai dengan pengembangan struktur ruang yang dapat mengurangi disparitas antar wilayah, meningkatkan pertumbuhan wilayah, sesuai dengan fungsi masing-masing wilayah, pemantapan kawasan lindung khususnya hutan lindung dan konservasi sumberdaya air. Mendorong kawasan potensial dan strategis skala provinsi dan kabupaten, serta pada masing-masing kawasan. Salah satu kawasan yang perlu didorong pertumbuhannya adalah kawasan alalak, Tamban menjadi kawasan perkotaan yang berperan sebagai pusat perumahan, perdagangan dan jasa.Untuk Marabahan ditetapkan sebagai pusat kegiatan wilayah yang nantinya harus dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung fungsi tersebut.

Permukiman masyarakat yang tersebar dalam jumlah besar dan kecil menjadikan perlu mengarahkan dan memprioritaskan pengembangan kawasan pemukiman perdesaan dan

permukiman perkotaan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan masyarakat. Selanjutnya pada berbagai wilayah diperlukan penataan, penyediaan sarana dan prasarana penunjang permukiman

Pada permukiman transmigrasi dilakukan peningkatan penyediaan hunian yang layak untuk transmigran, disertai dengan penyediaan lahan usaha yang memadai. Lahan usaha ini harus diarahkan pada peningkatan kegiatan usaha yang bernilai ekonomis tinggi dengan membentuk agroindustri dan agrobisnis.

Terkait dengan pemanfaatan berbagai sumberdaya alam, maka perlu diprioritaskan pemahaman tentang kerangka dasar pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, melalui peningkatan kualitas khususnya dalam rangka penanganan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Selanjutnya dilakukan tindakan pencegahan penurunan kualitas lingkungan, penegakan hukum bagi pelaku perusakan lingkungan, dan upaya perbaikan kualitas bagi lingkungan yang telah rusak termasuk pengendalian kerusakan hutan dan lahan dalam skala luas. Berbagai upaya juga dilakukan dengan melakukan pengelolaan lingkungan hidup.

5.3.2. Arah Pembangunan Lima Tahun II (2007 – 2012)

Bila pada tahap pertama berbagai landasan pembangunan jangka panjang telah dilakukan, maka program jangka menengah tahap ke-2 diarahkan pada pemantapan perubahan struktural secara sosial – ekonomi, sehingga pembangunan akan lebih diarahkan pada penguatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri mulai berjalan, pengembangan perekonomian telah mengarah pada perbaikan struktur antara produk hulu-hilir. Secara keseluruhan pembangunan telah menunjukan pada arah peningkatan kesejahteraan secara global, lingkungan mulai terkendali, dan secara umum terjadi peningkatan daya saing daerah dalam kemandirian pembangunan. Prasarana dasar pembangunan semakin memiliki peran dalam pemerataan dan mendorong pertumbuhan wilayah, pelaksanaan pembangunan makin menunjukkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dengan partisipasi yang makin meningkat serta penataan ruang dijadikan sebagai dasar pijakan pembangunan daerah. Kondisi lingkungan secara global juga menunjukkan adanya peningkatan yang ditandai oleh kesadaran masyarakat akan lingkungan yang makin membaik dan penegakan hukum lingkungan juga semakin baik. Secara keseluruhan dalam program jangka menengah telah mengarah pada pembentukan masyarakat sejahtera dengan pelaksanaan pembangunan

yang lebih adil dalam pengertian antar sektor dan antar wilayah, serta kegiatan unggulan daerah mulai dapat bersaing dalam skala regional dan nasional.

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia secara keseluruhan menunjukkan peningkatan yang signifikan ditandai oleh membaiknya partisipasi masyarakat dalam pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, peran wanita serta pemuda dalam pembangunan yang semakin meningkat, kehidupan keagamaan semakin menunjukkan peningkatan kerukunan, dan indeks kesejahteraan sosial juga meningkat yang ditunjukkan oleh berkurangnya anak terlantar. Secara umum kualitas SDM mendekati rata-rata nasional.

Peletakan dasar peningkatan partisipasi pendidikan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih merata telah dengan partisipasi masyarakat yang mendekati usia wajib belajar 12 tahun. Kualitas tenaga pendidik juga semakin baik yang ditandai oleh semakin banyaknya pengajar yang minimum berjenjang S1. Pada saat yang bersamaan pendidikan unggulan, dan pendidikan berbasis ketrampilan disetiap kecamatan sudah mulai terwujud. Peningkatan kualitas pendidikan ini menjadikan kualitas SDM dan ketenagakerjaan juga semakin membaik.

Peningkatan pendidikan pada sisi lain juga meningkatkan kemampuan SDM dalam memanfaatkan iptek dan litbang sehingga keduanya akan menjadi penopang utama dalam pengembangan SDM. Selanjutnya Iptek dan Litbang ini dikembangkan oleh setiap lembaga pemerintah dan swasta sehingga semakin meningkatkan SDM dan kualitas produk setiap kegiatan.

Peningkatan pengetahuan berbagai bidang oleh masyarakat menjadikan kesadaran akan kesehatan juga semakin membaik, dan semakin meningkatnya pelayanan kesehatan seperti bertambahnya fasilitas kesehatan ke berbagai wilayah sampai pelosok, tenaga medis yang semakin terdistribusi menjadikan kualitas kesehatan semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya jumlah kematian ibu saat melahirkan, serta semakin baiknya lingkungan hidup dan berperilaku hidup sehat masyarakat. Pemerataan pelayanan kesehatan ini juga semakin dinikmati oleh masyarakat kurang mampu, serta masyarakat bersama pemerintah telah dapat mengatasi berbagai wabah dan penyakit endemi.

Peningkatan kualitas pendidikan, penguasaan iptek yang lebih baik dan kualitas kesehatan yang meningkat menjadikan daya saing SDM semakin unggul sehingga selanjutnya menjadikan produktivitas tenaga kerja juga semakin baik. Secara simultan hal ini akan mendorong peningkatan kualitas produktivitas SDM, sehingga sangat mendorong penciptaan peluang kerja yang lebih baik, yang ditandai oleh berkurangnya pengangguran, semakin meningkatnya pendapatan rata-rata, dan semakin beragamnya kegiatan usaha masyarakat. Dalam menopang pengembangan perekonomian berbasis masyarakat semangat kewirausahaan makin berkembang.

Peningkatan kegiatan masyarakat juga semakin meningkatkan kegiatan bidang keagamaan, juga semakin meningkatkan kerukunan umat beragama. Fasilitas keagamaan semakin membaik, sekolah keagamaan juga menunjukkan adanya peningkatan peran dalam meningkatkan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perbaikan kondisi sosial-ekonomi menjadikan kesejahteraan sosial masyarakat juga makin membaik. Hal ini antara lain ditandai oleh jumlah anak terlantar dan anak asuh semakin berkurang, kemandirian masyarakat semakin kuat.

b. Pengembangan Ekonomi Wilayah

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan semakin baiknya iklim investasi secara langsung ataupun tidak akan mendorong pengembangan perekonomian wilayah. Perubahan struktur ekonomi yang ditandai dengan semakin meningkatnya pertanian dalam arti luas semakin terlihat, ketergantungan pada sumberdaya alam yang tidak terbarukan secara bertahap mulai berkurang, industri pengolahan semakin berkembang dari hulu sampai hilir. Pengembangan perekonomian ini ditunjang oleh partisipasi masyarakat dalam skala luas, yang ditandai oleh semakin berperannya koperasi dan UKM. Pada sisi lain semangat otonomi semakin mendorong perkembangan daerah dan daya saing daerah, serta munculnya spesialisasi daerah. Dengan demikian interaksi ekonomi antar sektor antar wilayah akan semakin meningkat. Untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan wilayah, maka pengembangan kawasan strategis mulai dilakukan.

Peningkatan perekonomian pada berbagai bidang juga nampak pada pertanian tanaman pangan dan hortikultura dimana kemandirian wilayah dapat tercapai melalui kemampuan dalam menyediakan kebutuhan pangan. Selanjutnya sentra produksi pertanian unggulan dan pusat pelayanan seperti pembentukan agropolitan semakin berkembang. Pola ini juga didukung oleh berkembangnya agribisnis dan agroindustri sehingga semakin meningkatkan daya saing daerah dari sisi pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Indikator perkembangan ini juga ditunjukkan oleh semakin berkembangnya infrastruktur pertanian, penggunaan peralatan yang semakin modern, dan mengikuti informasi pasar pertanian.

Pemanfaatan sumberdaya hutan semakin dapat diarahkan pada pembentukan hutan lestari dengan pemanfaatan yang seimbang dengan pengolahan yang semakin intensif. Hal ini ditandai oleh meningkatnya pengolahan hasil hutan, berkurangnya pengambilan bahan mentah, dan perdagangan hasil hutan sebagai hasil primer semakin berkurang. Hal ini juga ditunjukkan oleh meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengolah hutan lestari. Partisipasi masyarakat dalam menjaga hutan lestari makin meningkat dan penegakan hukum makin ditingkatkan.

Perkebunan di Kabupaten Barito Kuala semakin menunjukkan peran penting dalam perekonomian. Bila pada tahap pertama sudah dilakukan pelaksana pengembangan lahan dan komoditas unggulan perkebunan, maka pada tahap kedua target penyediaan lahan semakin bertambah, dan produknya meningkat untuk dipasarkan. Sentra perkebunan mulai berkembang, dimana hai ini ditandai juga oleh semakin banyaknya sentra perkebunan dan permukiman masyarakat berkegiatan utama perkebunan. Selanjutnya mulai dilakukan pengolahan hasil perkebunan sehinga menciptakan produk hulu – hilir secara simultan yang diikuti juga dengan perbaikan pemasaran dan jaringan pasar nasional dan internasional. Dalam tahap ini peran berbagai stakeholders juga mulai berkembang.

Semakin intensif dan ekstensifnya pemanfaatan lahan pertanian juga sekaligus membuka peluang pengembangan peternakan, disamping ternak yang dikembangkan secara intensif. Selanjutnya pengembangan ternak unggulan mulai berkembang dengan mantap, dimana hal ini ditandai dengan semakin berkurangnya import ternak, pengolahan produk ternak menjadikan nilai ekonomis ternak semakin meningkat, dan tenaga kerja bidang peternakan semakin meningkat jumlah dan ketrampilannya.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Barito Kuala juga ditopang oleh perkembangan kelautan dan perikanan yang semakin meningkat perannya. Pengembangan ini ditopang oleh SDM yang semakin handal, infrastruktur perikanan yang lebih mapan, dan pengolahan hasil ikan menjadi industri perikanan sebagai salah satu komoditas yang diandalkan. Perkembangan ini juga ditandai oleh meningkatnya iklim investasi bidang perikanan, semakin membaiknya pola kemitraan antar stakeholders, dan semakin meningkatnya pendapatan nelayan.

Perkembangan ekonomi yang membaik, iklim usaha yang makin kondusif menjadikan minat investasi dari dalam negeri dan luar negeri semakin meningkat. Hal ini ditunjang oleh semakin meningkatnya jaminan kepastian usaha dan kepastian hukum, meningkatnya kemudahan berusaha dan investasi yang ditunjukkan oleh semakin meningkatnya nilai investasi daerah. Perkembangan perekonomian akan lebih berkembang dengan ditunjang oleh perindustrian, perdagangan dan koperasi. Dalam tahap ke dua ini, industri berbasis pertanian dan produk unggulan daerah makin berkembang, kawasan industri mulai dipasarkan dengan dukungan infrastruktur dan deregulasi yang memadai, promosi pengembangan kawasan industri terus ditingkatkan. Pada tahap ini neraca perdagangan semakin positif, sentra produk pemasaran telah terbentuk.

Peran pemerintah juga menunjukkan adanya peningkatan melalui semakin membaiknya peran BUMD dalam pembangunan, yang juga ditandai oleh peningkatan peran publik dalam pengelolaan BUMD. Demikian juga dengan koperasi, usaha kecil dan menengah semakin berperan dalam perekonomian lokal sampai internasional yang ditandai oleh meningkatnya jumlah UKM dalam kegiatan perekonomian.

Semakin terpeliharanya kualitas alam dan terjaganya budaya menjadikan pariwisata akan semakin menarik. Perkembangan ini ditandai oleh semakin meningkatnya wisatawan nusantara, semakin tingginya tingkat hunian, dan semakin baiknya pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Barito Kuala. Dalam tahap ini sudah mulai dimantapkan kalender wisata untuk menyambut wisatawan pada berbagai event serta semakin tertata dan menarik obyek wisata unggulan daerah. Promosi wisata sudah pada tingkat nasional yang ditandai oleh terbentuknya jaringan pariwisata nasional.

Pertambangan meskipun tetap memegang peran penting dalam perekonomian tetapi secara proporsional secara bertahap akan menurun perannya. Hal ini ditandai dengan penurunan proporsinya dalam penerimaan daerah. Selanjutnya dalam peningkatan efisiensi dan penjagaan

kualitas lingkungan maka pengolahan pertambangan yang lebih ramah lingkungan semakin dikenal dan penataan dan penertiban bekas tambang sebagai langkah intensifikasi semakin meningkat perannya.

c. Prasarana Dasar

Transportasi akan semakin berkembang seiring dengan peningkatan perekonomian wilayah dan kualitas sumber daya manusia. Hal ini juga didukung oleh energi listrik yang semakin mapan dan irigasi yang semakin meluas wilayah pengalirannya.

Transportasi darat semakin berkembang yang ditandai oleh semakin terhubungkannya antar pusat permukiman perkotaan dan perdesaan serta pusat-pusat perekonomian wilayah dan kawasan strategis daerah. Pemerataan pengembangan jalan ini semakin terlihat pada wilayah yang mempunyai aksesiblitas rendah. Pengembangan jaringan jalan ini dilakukan secara terpadu dengan sistem transportasi lainnya sebagai sistem intermoda.

Transportasi sungai masih memiliki peran dalam mendorong perekonomian melalui kegiatan antar wilayah. Peningkatan ini ditandai oleh masih berfungsinya dermaga penyeberangan dalam upaya peningkatan arus barang dan orang yang mempunyai aksesibilitas terbatas.

Penyediaan pangan yang mandiri sangat didukung oleh peningkatan irigasi, yang ditandai oleh semakin mapannya sistem irigasi, semakin luasnya sawah yang dapat diairi. Pola ini juga ditunjukkan oleh semakin besarnya produk pertanian tanaman pangan khususnya padi dan tanaman Holtikultura

Pasokan listrik di Kabupaten Barito Kuala yang mulai mapan semakin ditingkatkan melalui intensifikasi dan diversifikasi terutama pada saat beban puncak. pembangunan dan pengembangan listrik perdesaan melalui kerjasama operasional PLN dan partisipasi pemerintah,selanjutnya pengembangan jaringan pelayanan (PLTD) Marabahan dan Barito (Banjarmasin).. Selanjutnya pengembangan yang terpadu antar jaringan sudah mulai berkembang. Berbagai efisiensi untuk mengurangi kehilangan daya juga dilakukan yang ditandai oleh meningkatnya persentase daya terpakai. Keterbatasan energi yang dimiliki mengharuskan untuk mencari alternatif energi diantaranya pengembangan energi biodiesel dari tanaman jarak dan kelapa sawit, pengembangan energi coal beat Methane (panas bumi) untuk kebutuhan masyarakat.

d. Politik, Pemerintahan dan Hukum

Peran pemerintah sebagai regulator dan administrator dalam pembangunan terus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya efisiensi organisasi perangkat daerah yang ditandai oleh semakin terpenuhinya standar pelayanan dan jumlah perangkat daerah, maupun pada susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis. Selanjutnya peningkatan sumberdaya manusia dalam bidang ini adalah ditandai oleh semakin baiknya tingkat pendidikan pegawai, semakin tersebarnya pegawai pada daerah terpencil ataupun terisolir, dan pedalaman.

Dalam bidang hukum peningkatan pelayanan ditunjukkan oleh meningkatnya pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana hukum, semakin berkembangnya struktur organisasi setingkat muspika di wilayah kecamatan. Selanjutnya penegakan hukum lebih efektif dijalankan di berbagai bidang pembangunan, juga semakin tercipta kepastian hukum bagi berbagai dunia usaha.

e. Penataan Ruang dan Lingkungan

Pembangunan pada berbagai bidang yang terus meningkat dan mendorong pertumbuhan wilayah akan tetap terarah sesuai dengan pokok-pokok kebijakan seperti tertuang rencana tata ruang wilayah. Struktur ruang semakin menunjukkan adanya keseimbangan distribusi antara perkotaan dan perdesaan, jaringan pergerakan antar wilayah yang makin mapan, dan kegiatan ekonomi utama wilayah semakin memiliki spesialisasi. Berbagai program pembangunan juga semakin mengacu pada tata ruang wilayah, pola ruang yang telah ditetapkan baik ruang daratan, ruang lautan, maupun ruang udara semakin terarah dan terkendali. Hal ini ditandai oleh semakin kecilnya penyimpangan pemanfatan ruang lindung/konservasi. Penataan ruang yang makin kondusif ini akan semakin mendorong minat investasi daerah.

Kualitas permukiman di berbagai wilayah juga menunjukkan peningkatan yang ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas permukiman, serta semakin berkurangnya pemukiman Kumuh. Permukiman yang semakin meningkat kualitasnya juga mendorong produktivitas masyarakatnya.

Permukiman transmigrasi akan semakin meningkat kualitasnya yang ditandai oleh semakin menurunnya perumahan yang kurang layak huni, semakin tumbuh menjadi perdesaan

bahkan menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian wilayah sebagai perdesaan baru. Pada permukiman transmigrasi yang potensial akan membentuk berbagai pusat perekonomian melalui semakin berkembangnya agroindustri dan agrobisnis.

Kesadaran pembangunan yang semakin meningkat disertai kesadaran akan keseimbangan alam menjadikan sumberdaya alam akan semakin lestari dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Berbagai pembangunan semakin memperhatikan kaidah AMDAL, semakin menurunnya perusakan alam, meningkatnya kualitas lingkungan, dan semakin tegaknya hukum bagi pelaku perusakan lingkungan. Disamping itu keberhasilan pengembalian kualitas pada lingkungan yang rusak semakin mendorong berbagai kegiatan penyelamatan lingkungan, seperti reboisasi. Pengelolaan lingkungan hidup berbasis mitigasi bencana alam juga semakin dipahami oleh masyarakat.

5.3.3. Arah Pembangunan Lima Tahun III (2012 – 2027)

Pembangunan pada seluruh bidang yang dilakukan dengan konsisten selama dua periode telah menunjukkan pemantapan menuju masyarakat sejahtera, pemerataan hasil pembangunan telah dirasakan masyarakat. Kualitas SDM semakin meningkat, kebergantungan ekonomi pada sumberdaya alam yang tidak terbarukan mulai berkurang, sedangkan pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan semakin berkembang, dan struktur ekonomi semakin mantap. Prasarana dan sarana dasar pembangunan telah mencapai wilayah pedalaman, pemerintahan berjalan makin efisien, efektif, dan transparan. Selanjutnya penataan ruang menjadi acuan pokok pembangunan wilayah, serta kualitas lingkungan secara global semakin terkendali dan terus meningkat kualitasnya.

a. Pengembangan SDM

Pembangunan yang dilaksanakan secara terencana dalam dua periode telah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, sehingga menunjukkan daya saing yang makin tinggi. Secara umum hasil pembangunan SDM yang dilaksanakan dalam periode ini menjadikan kualitas SDM masyarakat Kabupaten Barito Kuala telah setara dengan kualitas SDM masyarakat Indonesia. Kesejahteraan masyarakat makin meningkat, dan semakin mandiri dalam melaksanakan berbagai program pembangunan.

Dalam periode ini pendidikan semakin meningkat yang ditunjukkan oleh meratanya pelaksanaan pendidikan ke segenap kawasan perkotaan dan perdesaan, wajib belajar telah

mencapai 12 tahun, sekolah unggulan dan sekolah kejuruan sudah berkembang, serta kualitas pendidikan secara umum telah setara dengan rata-rata nasional. Di ibukota kabupaten sudah dikembangan pendidikan unggulan bertaraf nasional. Peningkatan kualitas pendidikan ini akan menjadi pilar utama peningkatan kualitas SDM.

Meningkatnya kualitas pendidikan ini sangat berkaitan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja yang ditopang oleh litbang dan iptek. Dengan demikian litbang dan iptek telah menjadi suatu kebutuhan setara dengan kebutuhan informatika dan secara umum juga menunjukkan kesetaraannya dengan tingkat nasional. Berbagai keputusan kebijakan dasar diambil berdasarkan hasil penelitian yang valid dan disepakati berbagai pihak. Hal ini juga ditandai oleh semakin besarnya peran litbang dan iptek dalam lembaga pemerintah dan swasta.

Peningkatan kesadaran akan kesehatan dan lebih baiknya perilaku hidup sehat, serta semakin meratanya distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga medis-paramedis menjadikan tingkat kesehatan masyarakat Kabupaten Barito Kuala semakin baik. Derajat kesehatan masyarakat yang semakin membaik ini juga ditandai oleh semakin meningkatnya usia harapan hidup rata-rata masyarakat, jumlah kematian ibu saat melahirkan semakin dapat ditekan, semakin baiknya lingkungan hidup dan berperilaku hidup sehat masyarakat, wabah dan endemi lokal semakin dapat ditangani secara mandiri. Masyarakat kurang mampu juga semakin mudah menjangkau pelayanan kesehatan yang prima.

Peningkatan kualitas indeks pembangunan manusia yang telah diperoleh menjadikan daya saing semakin meningkat, pendapatan semakin membaik, juga spesialisasi tenaga kerja semakin terjadi. Secara simultan hal ini akan mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja, semakin tertekannya pengangguran, dan produktivitas kerja juga semakin mantap. Berbagai kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan arah pengembangan ekonomi makro seperti kebutuhan tenaga teknik, medis, perencanaan, management, pariwisata, pengelolaan lingkungan hidup dapat dipenuhi dari masyarakat Kabupaten Barito Kuala sendiri. Demikian juga dengan peluang usaha swasta dibidang telematika, dan berbagai jasa telah berkembang dengan cukup baik. Pada sisi lain, dengan semakin terbukanya peluang usaha yang besar dengan peluang pemasaran nasional dan eksport ke luar negeri menjadikan perkembangan kewirausahaan menjadi tinggi.

Dalam bidang keagamaan juga menunjukan peningkatan dimana kerukunan antar umat semakin membaik, kegiatan keagamaan semakin marak, dan fasilitas peribadatan juga semakin berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Sekolah berbasis keagamaan semakin mapan, dan terdistribusi ke berbagai daerah.

Peningkatan berbagai bidang ini juga semakin meningkatkan kualitas SDM secara umum, kesejahteraan sosial masyarakat juga makin membaik yang ditandai oleh semakin berkurangnya anak terlantar dan anak asuh, pemerintah daerah dapat menyantuni berbagai kebutuhan kesejahteraan sosial, dan kemandirian masyarakat semakin membaik.

b. Pengembangan Ekonomi Wilayah

Bila pada tahap ke-2 perubahan struktur ekonomi sudah mulai mapan, investasi mulai masuk dan semakin meningkat, ketergantungan pada sumberdaya alam primer juga semakin berkurang, industri pengolahan semakin berkembang dari hulu sampai hilir, sektor perdagangan dan jasa semakin meningkat perannya, maka pada tahap ke-3 secara keseluruhan juga akan semakin berkembang dan mapan. Partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan perekonomian juga menunjukkan peningkatan. Masyarakat banyak semakin tergabung dalam pengembangan koperasi dan berbagai UKM semakin meningkat menjadi besar. Perkembangan dan kondisi perekonomian termasuk investasi di dalamnya sudah sedikit diatas rata-rata nasional.

Dalam tahap ini penyediaan kebutuhan pangan dapat dipenuhi secara mandiri, pada saat puncak panen bahkan mulai dapat mengeksport hasil. Perkembangan ini juga didukung oleh berkembangnya teknologi pangan sehingga mulai berkembang diversifikasi penyediaan pangan. Selanjutnya sentra produksi dan pemasaran mulai dari unit paling kecil sampai konsumen telah ada dalam sistem jaringan jang saling menguntungkan. Agropolitan sistem telah tumbuh, infrastruktur pertanian juga semakin berkembang. Kegiatan masyarakat juga telah berbasis pada agribisnis dan agro industri yang secara keseluruhan meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Selanjutnya sistem informasi pertanian termasuk informasi pasar juga semakin dikenal oleh petani.

Sumberdaya hutan telah memasuki pengelolaan lestari, kawasan hutan lindung semakin memiliki peran dalam keseimbangan lingkungan dan tetap dipertahankan, sementara hutan produksi dikelola secara efisien dan hasilnya dikelola dan diolah sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Penanganan hasil hutan sudah berjalan lebih efektif, dimana penebangan kayu ilegal sudah dapat ditangani dan penegakan hukum juga lebih efektif. Terhadap tanah yang rusak karena bekas penebangan hutan juga semakin tertangani sebagai bagian dari program reboisasi menerus. Pada tahap ini partisipasi masyarakat disekitar kawasan hutan semakin baik dan

masyarakat juga semakin merasakan manfaat pengelolaan hutan lestari, dan penegakan hukum terhadap perusakan semakin tertangani dan pencurian hasil hutan semakin minim.

Perkebunan unggulan telah mencapai tingkat mapan dan produknya telah memiliki daya saing dipasaran nasional. Target penyediaan lahan perkebunan telah tercapai, pengembangan telah dilakukan, peran perkebunan menjadi dominan, karena mampu mengembangkan pertanian, peternakan, dan industri pengolahan dari hulu-hilir. Pengolahan hasil perkebunan menjadi pendongkrak perekonomian dan ketenagakerjaan, baik jumlah maupun kualitasnya. Dalam tahap ini sektor perkebunan akan lebih dimantapkan. Sentra perkebunan sudah berkembang yang ditandai juga oleh semakin berkembangnya sentra perkebunan dan permukiman masyarakat berkegiatan utama perkebunan juga semakin berkembang kegiatannya. Pada tahap ini, maka pemasaran dan pengembangan prasarana pendukung pengembangan perkebunan, serta kerjasama dengan berbagai stakeholders untuk mengembangan industri pengolahan hasil perkebunan semakin meningkat.

Peternakan pada tahap ini sudah ada pada kondisi yang semakin mantap dalam pengertian peternakan sudah mampu menjadi salah satu penopang ekonomi unggulan, diversifikasi produk peternakan dan pengolahannya mendorong pengembangan industri pengolahan. Kemandirian dapat memenuhi kebutuhan akan ternak telah tercapai, dan selanjutnya hasil ternak ungulan mulai dapat dieksport. Indikator keberhasilan ini adalah semakin meningkatnya iklim usaha peternakan, semakin tertanggulanginya penyakit ternak. Sumberdaya manusia dalam pengolahan ternak juga semakin baik yang ditandai oleh meningkatnya jumlah usaha ternak, tenaga ahli bidang peternakan, dan lembaga penelitian dan penyediaan ternak unggulan semakin berkembang.

Dalam bidang kelautan dan perikanan terjadi peningkatan produk yang bukan saja menghasilkan dan memasarkan ikan segar, tetapi juga pengolahan hasil penangkapan ikan. Perkembangan perikanan ini ditopang oleh kualitas SDM yang semakin baik, penggunaan sarana dan prasarana perikanan yang semakin canggih, dan kelembagaan yang lebih mapan. Selanjutnya sentra-sentra produksi perikanan juga semakin berkembang, investasi dan kemitraan perikanan semakin diminati, juga kualitas lingkungan perikanan semakin terpelihara dengan indikasi semakin terkendalinya pencemaran perairan dari limbah industri dan rumah tangga.

Perkembangan kualitas SDM, struktur ekonomi yang makin makin mantap dan kepastian hukum yang semakin baik dan transparan, mendorong investasi daerah baik dari dalam maupun

luar negeri. Peningkatan investasi ini diikuti oleh meluasnya pengembangan sarana penunjang perdagangan melalui pengembangan jaringan informasi produksi, dan pasar dalam skala nasional dan internasional.

Berbagai produk andalan dan investasi yang makin berkembang memerlukan pemasaran yang luas sehingga peran perdagangan menjadi sentral. Industri mulai mapan dan kawasan industri telah berkembang. Struktur industri mulai mapan, perkebangan produk hulu – hilir makin berkembang dan berkaitan. Perdagangan produk unggulan makin berkembang, kerjasama antar wilayah dalam menjalin perdagangan makin mapan dan kontinyu, serta neraca perdagangan semakin positif. Dalam tahap ini peran BUMD dalam mengembangkan ekonomi semakin penting dan makin terwujud kemitraan antara BUMD dengan mitra usaha lainnya sekaligus sebagai salah satu sumber PAD.

Peran koperasi dan UKM dalam perdagangan dan perindustrian menjadi semakin penting, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha bidang perdagangan dan perindustrian. Selanjutnya semakin terbentuk kemitraan dalam pemenuhan bahan baku, proses produksi dan jaminan pasar untuk menjamin kontinuitas produk.

Pariwisata di Kabupaten Barito Kuala semakin meningkat perannya, terutama wisata berbasis alam dan bahari. Jaringan wisata nasional semakin mantap yang ditandai oleh adanya integrasi antar kunjungan wisata, semakin berkembangnya akomodasi dan industri wisata. Kemasan wisata yang makin menarik melalui pengembangan jalur wisata dan kalender wisata yang makin menarik dikemas. Obyek wisata yang ada semakin tertata dan memiliki ciri yang khas sehingga secara keseluruhan membentuk atraksi yang saling melengkapi. Pengelolaan pariwisata semakin membaik, yang ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas SDM dan manajement kepariwisataan.

Pertambangan sampai tahap ini tetap memiliki peran penting dalam perekonomian meskipun secara proporsional dan bertahap menurun perannya. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan peningkatan efisiensi melalui diversifikasi dan pengolahan sisa penambangan. Selanjutnya pengelolaan hasil-hasil penambangan yang ada semakin dikembangkan lebih efisien dan terkendali.

c. Prasarana Dasar

Peran transportasi darat semakin penting sebagai penghubung antar pusat permukiman dan pusat produksi yang ditandai oleh pengembangan jalan raya Nasional, Jalan raya provinsi, Jalan raya kabupaten, pengembangan dan pembangunan Jembatan penghubung dengan Kabupaten / Kota lainnya, semakin terpeliharanya jaringan jalan yang ada, serta semakin berkembangnya angkutan darat antar wilayah, antar provinsi maupun pada kawasan perdesaan. Permukiman dan sentra produksi memiliki akses darat yang semakin baik dengan pusat pemasaran. Dalam skala luas pengembangan jaringan jalan ini dibangun secara lebih terpadu dengan sistem transportasi lain.

Sistem irigasi semakin mampu mendorong pencetakan sawah baru, meningkatkan produk pertanian, yang ditandai oleh semakin besarnya produk pertanian. Perbaikan irigasi ini telah dapat menunjang swasembada pangan. Penyediaan pangan yang mandiri sangat didukung oleh perkembangan irigasi, yang ditandai oleh semakin mapannya sistem irigasi, semakin luasnya sawah yang dapat diairi, semakin besarnya produk pertanian, dan semakin optimalnya pemanfaatan sumberdaya air.

Perkembangan ekonomi dan kegiatan masyarakat yang menuju kemapanan dalam pembentukan masyarakat sejahtera juga semakin didukung oleh pasokan listrik yang lebih baik. Peningkatan pasokan melalui pembuatan pembangkit baru, pengembangan jaringan interkoneksi, peningkatan daya mampu pembangkit dengan melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan periodik mesin pembangkit,serta upaya perbaikan mutu dan kehandalan sistem ketenagalistrikan pada daerah dengan tegangan sistem dibawah 90 % dari tegangan normal didaerah.

d. Politik, Pemerintahan dan Penegakkan Hukum

Pada tahap ketiga ini peran pemerintah terus meningkatkan efisiensi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitasnya semakin nyata. Efisiensi tingkat pelayanannya telah sama dengan rata-rata nasional, standar pelayanan dan jumlah perangkat daerah telah terpenuhi. Kualifikasi sumberdaya manusia dalam bidang ini sudah baik, yang ditandai oleh tingkat pendidikan pegawai yang lebih tinggi, setiap bidang memiliki spesifikasi keahlian yang memadai, serta pada daerah terpencil, terisolir dan pedalaman juga memiliki pelayanan yang sudah memenuhi standar.

Pada tahap ketiga berbagai perangkat hukum telah memiliki infrastruktur sarana dan prasarana hukum yang memadai, baik pada wilayah yang telah maju maupun baru. Pada tahap ini penegakan hukum sudah lebih efektif dijalankan, kualitas SDM bidang hukum sudah baik yang ditandai oleh peningkatan kualitas SDM melalui berbagai penyelenggaraan pelatihan, pendidikan, bagi aparat hukum. Berbagai regulasi bidang hukum juga lebih dapat dilaksanakan secara efektif, demikian juga alokasi anggaran APBD di sektor hukum dan keamanan serta ketertiban masyarakat telah memadai.

e. Penataan Ruang dan Lingkungan

Pada tahap ini kaidah penataan ruang mulai dipahami dengan cukup baik oleh masyarakat, pemerintah, maupun dunia usaha, sehingga berbagai program pembangunan diarahkan sesuai dengan tencana tata ruang wilayah. Secara lebih spesifik, struktur ruang yang dibentuk menunjukkan terbentuknya keseimbangan perkembangan antara perkotaan dan perdesaan yang didukung oleh prasarana yang memadai, telematika telah berkembang sampai tingkat perdesaan, dan kegiatan ekonomi utama semakin mendukung perkembangan wilayah. Keseimbangan fungsi kawasan budidaya dan lindung yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah semakin terwujud yang ditandai oleh semakin kecilnya penyimpangan pemanfaatan ruang. Berbagai program pembangunan juga semakin mengacu pada tata ruang wilayah. Penataan ruang yang makin kondusif ini akan semakin mendorong minat investasi daerah, yang ditandai oleh semakin berkembangnya kawasan –kawasan strategis.

Seiring dengan meningkatnya kegiatan perekonomian, dan kesadaran akan kualitas lingkungan hidup, maka kualitas permukiman di berbagai wilayah juga semakin baik yang ditandai oleh terpenuhinya perumahan masyarakat berpendapatan rendah, meningkatnya kualitas permukiman secara rata-rata, serta semakin berkurangnya pemukiman tidak layak huni. Berbagai permukiman tradisional yang ada juga tetap terjaga, sebagian merupakan aset wisata dan budaya, dengan kualitas lingkungan yang lebih sehat.

Permukiman transmigrasi semakin menunjukkan peningkatan kualitas yang ditandai oleh semakin mapannya tingkat hunian, sebagian kawasan transmigrasi telah tumbuh menjadi kawasan perdesaan dan memiliki fungsi sebagai pusat perekonomian. Beberapa permukiman transmigrasi yang potensial telah terbentuk sebagai pusat perekonomian baru yang mampu berkembang sebagai pusat agroindustri.

Seiring dengan meningkatnya pengetahuan akan lingkungan hidup bagi masyarakat, maka kesadaran akan keseimbangan alam juga semakin baik, sehingga berbagai upaya pelestarian sumberdaya sudah dilakukan dengan kesadaran yang tinggi. Pendidikan lingkungan sudah mulai terintegrasi dalam pendidikan formal dan berbagai kegiatan masyarakat dan hal tersebut ditunjukkan oleh semakin menurunnya perusakan alam, meningkatnya kualitas lingkungan, dan semakin tegaknya hukum bagi pelaku perusakan lingkungan. Amdal sudah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Berbagai upaya pengembalian kualitas lingkungan yang rusak semakin tertangani dengan baik, dan berbagai upaya penyelamatan lingkungan juga dilakukan dengan kesadaran yang tinggi.

5.3.4. Arah Pembangunan Lima Tahun IV (2017 – 2022)

Berdasarkan pencapaian pembangunan selama tiga periode yang dilaksanakan secara konsisten, maka tahapan keempat ini ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera disegenap wilayah dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan melalui peningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Dalam tahapan keempat ini maka dicirikan oleh mantapnya berbagai sistem pembangunan, kemandirian dan daya daerah yang makin tinggi, tingkat perkembangan wilayah berada diatas rata-rata nasional dan secara umum mampu bersaing dalam lingkup Asean bahkan pada beberapa bagian bahkan sudah mampu bersaing dalam skala Asia-Pasific. Secara umum kualitas SDM sudah baik dengan tingkat pendidikan keahlian dan ketrampilan yang memadai; perekonomian tumbuh diatas rata-rata nasional dengan tingkat ketimpangan yang rendah; prasarana dan sarana dasar telah menjangkau kesegenap pelosok wilayah; pemerintahan yang berjalan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabilitasnya tinggi diikuti penegakan hukum tanpa pandang bulu; serta penataan ruang menjadi acuan pengembangan wilayah dengan kesimbangan ekosistem yang baik dan terjaganya keanekaragaman hayati yang tinggi.

a. Pengembangan SDM

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan telah ada dalam tingkat kesadaran yang tinggi yang ditunjukkan oleh pelaksanaan pendidikan ke segenap wilayah telah mencapai 12 tahun dan pendidikan tinggi sudah merupakan kebutuhan. Mayoritas penduduk dalam usia sekolah (dan kuliah) mengenyam dunia pendidikan dengan spesialisasi yang lebih terfokus pada kebutuhan pasar kerja. Sekolah unggulan dan sekolah kejuruan telah berkembang di setiap kecamatan, serta kualitas pendidikan umumnya telah ada diatas rata-rata nasional. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat dan nilai kelulusan yang ada diatas rata-rata nasional, kualitas pengajar pendidikan dasar dan menengah telah berpendidikan minimal S1, dan pembinaan - pelatihan telah berjalan menerus.

Pada tahap ini perbaikan pendidikan dan pengetahuan masyarakat juga menjadikan kesadaran akan kesehatan terus meningkat, perilaku hidup sehat telah memasyarakat. Pelayanan kesehatan berupa fasilitas kesehatan serta tenaga medis-paramedis telah terdistribusi dengan baik yang ditandai oleh semakin mudahnya masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan, dan hal ini juga terjangkau oleh masyarakat miskin. Peningkatan derajat kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat ini ditandai oleh semakin tingginya usia harapan hidup rata-rata masyarakat yang mencapai diatas rata-rata nasional, jumlah kematian ibu saat melahirkan semakin kecil, wabah semakin dini dapat diatasi, dan perilaku hidup sehat masyarakat juga semakin baik. Secara umum pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat termasuk dalam pelayanan prima.

Dalam tahapan keempat ini bidang keagamaan menunjukan semakin baiknya kerukunan antar umat beragama, kegiatan keagamaan semakin marak yang ditandai oleh semakin banyaknya kegiatan keagamaan oleh masyarakat, dan fasilitas peribadatan semakin merata dan berkembang sesuai kebutuhan masing-masing pemeluk agama. Sekolah keagamaan semakin mapan dan mampu bersaing dalam skala nasional, dan terdistribusi ke berbagai daerah.

Dalam tahap ini kualitas SDM secara umum semakin membaik demikian juga dengan kesejahteraan sosial masyarakat, yang ditandai oleh semakin berkurangnya anak terlantar dan anak asuh, dimana anak asuh dan terlantar semakin mendapat pelayanan sosial yang setara dengan anak lain. Pemerintah daerah dapat menyantuni berbagai kebutuhan masyarakat yang kurang beruntung dan semakin meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

b. Pengembangan Ekonomi Wilayah

Perubahan struktur ekonomi masyarakat sudah menunjukkan pola yang semakin mapan, investasi sektor produktif semakin meningkat, pertanian dalam arti luas semakin menjadi tumpuan, ketergantungan pada sumberdaya alam primer yang tidak terbarukan semakin berkurang, industri pengolahan semakin berperan dalam memantapkan struktur perekonomian dari hulu sampai hilir dan keterkaitan antar sektor makin tinggi, sektor perdagangan dan jasa semakin meningkat perannya dalam lingkup regional dan nasional. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perekonomian semakin tinggi, dan masyarakat banyak semakin tergabung dalam koperasi dan berbagai UKM.

Pelaksanaan pembangunan bidang pertanian tanaman pangan dalam tahap ini menunjukkan bahwa penyediaan lahan baik pada lahan sawah – ladang untuk kebutuhan pangan telah dapat dipenuhi secara mandiri, ketahanan pangan sudah mapan, beberapa produk unggulan sudah dieksport dalam kemasan yang memenuhi standar perdagangan. Diversifikasi pangan sudah dikenal masyarakat dan didukung oleh teknologi pangan yang memenuhi standar kesehatan. Pada tahap ini perkembangan pertanian telah ditunjang oleh sistem pemasaran dalam sistem jaringan nasional. Agropolitan sistem menjadi andalan pengembangan, infrastruktur pertanian telah mapan. Kegiatan pertanian berbasis pada agribisnis dan agro industri yang memberi nilai tambah produk pertanian semakin terarah.

Sumberdaya hutan yang telah dikelola selama tiga periode dalam tahapan keempat ini dapat dikatagorikan sebagai pengelolaan lestari dan terkontrol oleh stakeholders, kawasan hutan lindung semakin berfungsi sebagai penyeimbanga lingkungan hidup dan memiliki keanekaragaman hayati yang makin tinggi; sementara hutan produksi semakin dikelola dengan arif dan efisien. Ekspor bahan mentah sudah tidak dilakukan, pengolahan hasil hutan dilakukan dengan rangkaian yang lebih panjang dan nilai ekonomisnya juga lebih tinggi. Penegakan hukum terhadap pelaku liar penebangan kayu sudah dapat ditangani dengan lebih sistematis. Penanganan kerusakan tanah pasca penebangan hutan semakin tertangani yang dilaksanakan dari program reboisasi menerus. Partisipasi masyarakat disekitar kawasan hutan sudah mendukung pada pembentukan dan pengelolaan hutan lestari.

Pada tahapan keempat ini perkebunan unggulan telah menjadi salah satu tumpuan ekonomi wilayah, memiliki daya saing tinggi dipasaran nasional dan internasional. Peran perkebunan menjadi lebih penting, karena mampu mengembangkan bidang lain dengan

berkembangnya industri pengolahan dari hulu-hilir dengan pangsa pasar eksport. Pengembangan perkebunan ini juga ditandai oleh berbagai diversifikasi hasil, menyerap tenaga kerja yang makin baik, membentuk pusat permukiman berbasis perkebunan, serta mampu menjadi pusat pengembangan teknologi bidang perkebunan. Pada tahap ini, kerjasama dengan berbagai stakeholders semakin mantap dan masyarakat semakin mendapatkan nilai tambah dari pengembangan perkebunan.

Pengembangan peternakan dalam tahapan keempat ini sudah ada pada kondisi yang mantap, mulai dari bibit ternak ungul sampai pengolahan produk ternak sudah dapat dilakukan secara mandiri, diversifikasi produk peternakan dan pengolahannya merupakan sebuah rangkaian menerus dari pengembangan peternakan. Pada tingkat ini beberapa produk ternak sudah diolah dan menjadi komoditas eksport. Indikator keberhasilan ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas produk peternakan, industri produk ternak menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat dan berbagai penyakit ternak sudah dapat dideteksi secara dini dan ditangulangi dengan dini pula. Tenaga ahli bidang peternakan semakin meningkat jumlahnya, dan lembaga penelitian dan penyediaan bibit ternak unggulan semakin berkembang, serta kotoran ternak sudah dapat diolah menjadi pupuk kandang dalam kemasan yang mudah didistribusikan.

Pada tahap ini bidang kelautan dan perikanan memiliki peran semakin penting dengan pengambilan hasil kelautan yang mendukung laut lestari, didukung oleh teknologi yang memadai, pemasaran ikan bukan hanya ikan segar segar, tetapi juga ikan olahan. Hal ini berarti juga industri opengolahan ikan semakin berkembang. Untuk ini maka investasi bidang perikanan terus dipromosikan, pembinaan untuk peningkatan kualitas SDM semakin ditingkatkan, penggunaan sarana dan prasarana perikanan yang semakin canggih, dan kelembagaan yang lebih mapan. Sentra-sentra produksi perikanan juga semakin berkembang, kualitas lingkungan permukiman nelayan semakin baik dan pencemaran perairan dari limbah industri dan rumah tangga pengolah ikan semakin terkendali.

Berbagai kemudahan dalam penanaman modal atau investasi yang kondusif semakin meningkatkan minat investasi daerah berbagai bidang, baik dari dalam maupun luar negeri. Pembentukan kawasan ekonomi potensial, kawasan strategis yang dipromosikan makin diminati investor, yang perlu terus dijaga kondisinya. Promosi berbagai peluang investasi mudah diakses melalui sarana elektronik maupun melalui promosi langsung.

Perkembangan perindustrian telah mendorong terciptanya struktur ekonomi yang mantap, pertumbuhan yang besar diatas rata-rata nasional. Produk ungulan daerah sudah dapat bersaing dalam pasar nasional. SDM perindustrian telah memiliki specsialisasi yang tinggi dengan dukungan kelembagaan yang mendorong pengembangan SDM dan kegiatan perindustrian. Secara umum perdagangan telah memasuki pasar eksport, terdapat kerjasama regional yang baik dan neraca perdagangan yang makin positif. Peran BUMD sudah mapan, berbagai program kemitraan antara BUMD dengan berbagai lembaga semakin meningkat. Peran koperasi dan UKM dalam perdagangan dan perindustrian sudah ada dalam tingkat mapan, pelaku usaha bidang perdagangan dan perindustrian semakin meningkat yang pelakunya adalah masyarakat sendiri.

Pemeliharaan kualitas lingkungan yang semakin baik dan budaya yang makin terpelihara menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan memiliki peran makin penting dalam meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat. Wisata berbasis alam dan bahari makin diminati masyarakat, jaringan wisata nasional sudah terbentuk sehingga Kabupaten Barito Kuala sudah masuk dalam tujuan utama wisata Indonesia. Kalender wisata sudah menjadi bagian dari perjalanan wisatawan nusantara dan mancanegara. Akomodasi wisata dan industri wisata memiliki ciri atau muatan lokal yang makin menarik. Obyek wisata memiliki ciri khas yan saling melengkapi, biodeversity semakin melengkapi daya tarik wisata yang sudah berkembang. Pengelolaan pariwisata semakin membaik, yang ditandai oleh semakin tingginya spesialisasi keahlian bidang pariwisata dan arah kebijakan pengembangan wisata didukung oleh berbagai sektor lain sebagai satu sistem pembangunan yang utuh.

Pada tahap keempat ini pertambangan tetap memegang peran penting yang secara proporsional menunjukkan penurunan jumlah produksi tetapi diikuti peningkatan kualitas pengolahan. Selanjutnya peningkatan efisiensi tetap dilakukan secara menerus, diversifikasi dan pengolahan sisa penambangan semakin dilakukan secara intensif. Pengembangan telah mampu mengeksport pengolahan hasil sebagai industri hilir. Berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup dalam jangka panjang, maka setiap area bekas tambang ditingkatkan kualitasnya melalui penghijauan untuk kawasan lindung maupun budidaya.

c. Prasarana Dasar

Pembangunan yang ada pada tahap yang mapan menjadikan transportasi darat memiliki peran sangat penting dan hubungan antar pusat permukiman dan pusat produksi sudah

terhubungkan secara keseluruhan. Hal ini ditandai oleh telah terwujudnya jalan lintas Kalimantan, jalan dalam provinsi yang dibangun sudah mencapai pelosok, telah dikembangkan jalan antar provinsi. Jalan yang telah dibangun dapat dipelihara secara memadai. Permukiman perkotaan dan perdesaan serta sentra produksi memiliki akses darat yang semakin baik ditandai oleh semakin baiknya kondisi jalan sebagai penghubung dengan pusat produksi. Pengembangan jaringan jalan dn jembatan terus dipacu untuk membentuk sistem intermoda yang lebih baik.

Pada tahap ini pembangunan pelabuhan laut dan pembangunan stasiun dan rel kereta apai yang ditetapkan telah berfungsi secara penuh yang bermanfaat dalam mendorong perdagangan dalam skala nasional Berbagai deregulasi akan mendorong volume perdagangan antar wilayah yang tentunya akan melalui pelabuhan laut.

Peningkatan produktivitas tanah untuk pertanian semakin meluas dan sistem irigasi semakin mampu mengairi dalam jangka panjang serta dapat mengairi sawah yang diperluas. Perbaikan irigasi ini ditandai oleh kemampuan penyediaan pangan secara mandiri bahkan sudah dapat mengeksport.

Persediaan energi listrik telah mencapai tahap mapan, pasokan listrik untuk permukiman perkotaan dan perdesaan, kawasan industri dan berbagai kebutuhan lain telah dapat dipenuhi meskipun pada saat beban puncak. Pengembangan sistem terpadu, diversifikasi sumber pembangkin dan sistem pengamanannya telah memenuhi standar kebutuhan. Hanya sebagian kecil wilayah yang tersebar dalam jumlah kecil masih dilayani oleh PLTD mandiri.

d. Politik, Pemerintahan dan Penegakkan Hukum

Pada tahap ke empat ini bidang hukum telah menduduki tempat sentral dalam perikehidupan. Hal ini ditunjukkan oleh semakin lengkapnya perangkat hukum pada berbagai wilayah. Penegakan hukum sudah berjalan dengan lebih efektif dimana kualitas SDM bidang hukum sudah baik yang ditandai oleh peningkatan kualitas SDM dengan semakin baiknya tingkat pendidikan bagi aparat hukum, dan kesadaran masyarakat akan hukum juga semakin membaik. Berbagai deregulasi bidang hukum juga lebih banyak dihasilkan, dan alokasi anggaran untuk bidang hukum dan keamanan serta ketertiban masyarakat telah cukup untuk melaksanakan berbagai tindakan hukum yang diperlukan

e. Penataan Ruang dan Lingkungan

Pelaksanaan pembangunan selama tiga tahap telah menunjukkan hasil yang makin baik, berbagai pelaksanaan program pembangunan lebih mengacu pada rencana tata ruang wilayah, masyarakat, pemerintah, maupun dunia usaha lebih memiliki pemahaman yang baik tentang rencana tata ruang. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya produk turunan dari rencana tata ruang wilayah kabupaten dalam bentuk rencana detail-teknis ruang tertentu. Berbagai program pembangunan juga lebih bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. Struktur ruang wilayah dalam skala Kabupaten maupun Kecamatan menunjukkan terbentuknya keseimbangan yang lebih baik, angka kesenjangan yang makin menurun, dan berbagai prasarana dasar sudah melayani perkembangan kegiatan ekonomi utama seperti pada kawasan – kawasan strategis dari sudut pandang ekonomi. Keseimbangan fungsi kawasan budidaya dan lindung semakin mantap sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan penyimpangan pemanfaatan ruang semakin terkendali yang ditandai oleh menurunnya simpangan pemanfaatan ruang. Konsistensi terhadap penataan ruang ini juga semakin mendorong investasi daerah sesuai dengan potensi masing-masing.

Pada tahap keempat ini pengetahuan masyarakat akan lingkungan hidup semakin baik, kepatuhan akan pengelolaan juga semakin meningkat, dan upaya menjaga keseimbangan alam juga semakin baik. Berbagai upaya penyelamatan lingkungan hidup terus dilakukan, perlindungan flora dan fauna yang termasuk dalam katagori dilindungi terus dilakukan dan biodiversity semakin terjaga. Berbagai kegiatan berkaitan dengan alam dan penyelamatan lingkungan terus berkembang, pendidikan lingkungan dilakukan dengan terintegrasi dalam pendidikan formal dan berbagai kegiatan masyarakat. Penegakan hukum bagi perusak lingkungan semakin ditegakkan. Berbagai ketentuan dalam pengelolaan lingkungan sudah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan pembangunan.

5.3.5. Arah Pembangunan Lima Tahun V (2022 – 2025)

Arah pembangunan pada tahap kelima, akan menjadi tahap pemantapan dan penyempurnaan kinerja pembangunan jangka panjang daerah yang telah dilaksanakan secara konsisten pada tahap pertama sampai dengan tahap keempat. Pemantapan dan penyempurnaan kinerja tersebut mencakup seluruh bidang pembangunan yang telah ditetapkan seperti pembangunan sumber daya manusia, struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat

yang seluas-luasnya, pelayanan dasar bagi masyarakat dan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum yang sinergi dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

a. Pengembangan SDM

Kualitas SDM dalam periode ini sudah berada dalam kondisi mapan, tingkat dan kualitas pendidikan membaik, kesehatan rata-rata masyarakat tinggi, peran wanita dan pemuda dalam berbagai program pembangunan semakin menampakan hasil. Dalam konteks ini maka kemandirian masyarakat telah mencapai tingkat mapan, dan daya saingnya tinggi.

Lebih lanjut perkembangan kualitas SDM ini terus ditopang oleh litbang dan iptek yang juga merupakan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Kebutuhan akan litbang dan iptek ini terus mendorong berbagai lembaga untuk memanfaatkan jasa tersebut, dan berbagai produk litbang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan publik. Hal ini ditandai oleh semakin berkembangnya wacana tentang perlunya penggunaan hasil penelitian, serta makin munculnya litbang dan pengunaan iptek canggih pada lembaga pemerintah dan swasta.

Pembangunan yang telah dilaksanakan dalam tiga periode sebelumnya meningkatkan indeks pembangunan manusia dan daya saing semakin tinggi, pendapatan masyarakat semakin membaik, serta spesialisasi tenaga kerja semakin terbentuk. Pola ini secara keseluruhan akan semakin mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja baik dalam pengetahuan maupun keahlian, semakin kecilnya angka pengangguran, dan secara umum produktivitas kerja juga semakin membaik. Penyediaan tenaga kerja yang memadai dan handal sudah tersedia di Kabupaten Barito Kuala yang sesuai dengan arah pengembangan ekonomi makro. Tenaga kerja dengan keahlian spesifik sesuai bidang pembangunan dapat dipenuhi oleh masyarakat setempat. Peningkatan kemampuan ini berbagai bidang ini juga semakin membuka peluang usaha dibidang telematika, dan berbagai jasa umum dan konstruksi semakin berkembang dengan cukup baik. Dalam tahap ini kegiatan kewirausahaan makin nyata dan sebagian besar masyarakat tidak lagi bergantung pada sektor formal.

b. Pengembangan Ekonomi Wilayah

Struktur ekonomi masyarakat berada pada kondisi yang menjamin keberlangsungan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Sektor pertanian, industri dan perdagangan menjadi sektor

yang berada pada posisi dominan dalam perekonomian daerah. Demikian pula dengan iklim investasi yang sudah kondusif. Pembangunan bidang pertanian khususnya pertanian tanaman pangan dengan eksistensi lahan yang terjamin. Bidang kelautan dan perikanan denngan pola budidaya yang menerapkan teknologi yang mengedepankan kelanjutan usaha dan kelestarian lingkungan serta pemasaran ikan yang tidak hanya dalam bentuk segar dan olahan melainkan dalam bentuk ikan hidup baik untuk pasar lokal, regional dan internasional dengan dukungan penyediaan dan penyaluran sarana produksi secara lokal.

Pengelolaan sumberdaya alam sudah memperhatikan kesejahteran masyarakat sekitar secara sosial ekonomi dan berorientasi pada pelestarian lingkungan, dengan tetap mengedepankan partisipasi masyarakat dalam poengelolaan berbagai sumberdaya alam yang ada. Perkebunan dengan produk primernya sudah menjadi andalan bahan baku industri hilir di bidang perkebunan demikian juga peternakan berada pada tingkatan produksi dan produktivitas yang maksimal.

Disisi lain dunia industri telah dapat berkontribusi secara optimal bagi perekonomian daerah yang didukung oleh ketersediaan sumberdaya manusia dengan penguasaan iptek yang tinggi. Koperasi UMKM, industri kecil dan industri rumah tangga semakin kuat dalam mendukung pembangunan perekonomian masyarakat. Barito Kuala pada tahap kelima, merupakan tujuan investasi yang potensial, baik bagi investor dalam maupun luar negeri.

c. Prasarana Dasar

Transportasi darat yang menghubungkan antara pusat permukiman dengan pusat produksi sudah terhubungkan sampai ke seluruh pelosok dengan aksesibilitas yang tinggi. Jalan antar wilayah dalam kabupaten, antar kabupaten dan antar provinsi telah dibangun dengan fungsi yang maksimal bagi kelancaran arus barang, arus jasa dan arus orang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Permukiman perkotaan dengan perdesaan telah memiliki akses jalan yang memadai sebagai penghubung antar pusat permukiman dan antar pusat produksi.

Persediaan dan kebutuhan energi listrik sudah terpenuhi dan berada pada tahap mapan dan stabil. Seluruh kebutuhan akan energi lietrik baik untuk pemukiman perkotaan dan perdesaan, kawasan industri dan berbagai kebutuhan lainnya sudah terpenuhi.

d. Politik, Pemerintahan dan Penegakkan Hukum

Pada tahap ini pemerintah telah berjalan dengan mapan, dalam memberikan pelayanan pada masyarakat telah berlaku prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitasnya pada berbagai sektor. Proses perijinan telah berjalan dengan cara yang lebih sederhana, sehingga lebih mendorong investasi daerah. Berbagai proses debirokratisasi terus dijalankan dengan cara yang lebih bertangungjawab, pelayanan publik sudah menyentuh wilayah terpencil, terisolir dan pedalaman. Kualitas SDM juga semakin meningkat yang ditandai oleh penggunaan alat yang lebih canggih organisasi yang lebih sederhana, dan tingkat kecepatan pelayanan yang lebih hemat waktu.

e. Penataan Ruang dan Lingkungan

Semakin meningkatnya indeks kualitas SDM menjadikan pendapatan juga meningkat dan kesadaran lingkungan juga semakin baik sehingga kualitas permukiman di berbagai wilayah juga semakin baik dan memenuhi standar kesehatan lingkungan hunian. Masyarakat berpendapatan rendah dapat menyediakan rumah layak dengan lingkungan yang memadai, serta pemukiman kumuh semakin dapat ditangani. Adanya revitalisasi Permukiman tradisional yang menyimpan berbagai nilai budaya, masyarakat juga mendapat keuntungan dari permukiman tradisional mereka diantaranya sebagai aset wisata.

Permukiman transmigrasi semakin berkembang yang ditunjukkan oleh peningkatan kualitas hunian yang semakin sempurna, meningkatnya kegiatan masyarakat, pasar lokal yang makin maju dan beberapa kawasan transmigrasi tumbuh menjadi kawasan kota terpadu mandiri sebagai pusat perekonomian dengan jaringan regional, nasional dan internasional. Hal ini ditandai dengan permukiman transmigrasi yang potensial dan telah terbentuk pusat perekonomian baru terus berkembang sebagai sentra pemasaran baru sekaligus semakin berperan sebagai pusat agroindustri.

BAB VI
KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ini ditetapkan sebagai komitmen politis daerah serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Barito Kuala periode 2005 – 2025.

RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 - 2025 selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama periode RPJPD ini berjalan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJPD Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut :

1. RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 – 2025 disusun dan ditetapkan dalam rangka mengemban amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Dalam rangka kesinambungan dalam merumuskan dan menentukan arah kebijakan daerah, maka seorang calon kepala daerah harus memperhatikan RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2005 – 2025 dan menjadikannya sebagai pedoman dalam menyusun visi dan misi daerah yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Kuala.
3. Semua stackholders yang ada di Kabupaten Barito Kuala baik eksekutif, legislatif didukung oleh instansi vertikal termasuk dunia usaha, akademisi, tokoh masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat berkewajiban untuk melaksanakan arah kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2005 – 2025.
4. Bupati sebagai Kepala Daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala dengan menggerakkan secara optimal semua potensi daerah yang dimiliki untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi guna mencapai tujuan yang tertuang dalam RPJPD 2005 - 2025.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan RPJMD sesuai tahapan arah pembangunan 5 (lima) tahun dalam RPJP Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 – 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada RPJP Kabupaten Barito Kuala 2005 – 2025.
6. RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2005 – 2025 adalah sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD Daerah Kabupaten Barito Kuala serta menjamin konsistensinya.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 2012

BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD

KATA PENGANTAR

Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala tahun 2005 – 2025 disusun dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Badan Pertencanaan Pembangunan Nasional RI, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, pihak perguruan tinggi dan daerah lain di Kalimantan Selatan yang telah menyelesaikan tahapan penyusunan RPJPD sampai dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dalam lingkup Kabupaten Barito Kuala, penyusunan rancangan awal RPJP juga telah melalui beberapa proses, mulai dari pembentukan tim penyusun, melaksanakan rapat koordinasi dan rapat forum SKPD yang secara bersama-sama membahas setiap misi yang terdapat dalam rancangan RPJPD ini. Selanjutnya rancangan ini akan menjadi bahan dalam melaksanakan Musrenbang RPJP yang tidak lama lagi akan dilaksanakan di Kabupaten Barito Kuala. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Musrernbang RPJP merupakan masukan berharga untuk proses penyempurnaan dokumen perencanaan ini selanjutnya.

Semoga rancangan yang telah dirampungkan oleh Tim Penyusun RPJP Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 – 2025 dapat segera dapat ditetapkan sebagai dokumen resmi perencanaan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Barito Kuala.

Marabahan, Oktober 2011

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

I. **PENDAHULUAN** 1

1.1. Latar Belakang 1

1.1.1. Sejarah Singkat Terbentuknya Kabupaten Barito Kuala 1

1.1.2. Pengertian dan Proses Penyusunan RPJP 5

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 6

1.3. Hubungan RPJP Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 7

1.3.1. RPJP dengan RPJP Provinsi dan Nasional 7

1.3.2. RPJP dengan RPJM 2007 – 2012 7

1.3.3. RPJP dengan RTRWK 2010 - 2030 7

1.4. Sistematika Penyusunan 8

1.5. Maksud dan Tujuan 9

II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 10

2.1. Aspek Geografi dan Demografi 10

2.1.1. Geografi 10

2.1.2. Demografi 13

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 15

2.3. Aspek Pelayanan Umum 18

2.3.1. Pendidikan 18

2.3.2. Kesehatan 20

2.4. Aspek Daya Saing Daerah 21

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah 21

2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 24

2.4.3. Iklim Berinvestasi 25

2.4.4. Sumberdaya Manusia (SDM) 26

III. ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS 29

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah 29

3.2. Isu Strategis 30

IV. VISI DAN MISI DAERAH 31
4.1. Visi 31
4.2. Misi 32
V. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH **35**
5.1. Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah 35
5.1.1. Terwujudnya Peningkatan Kulaitas SDM yang Berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ 35
5.1.2. Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Alam untuk Menjamin Pembangunan dan Menjaga eseimbang- an Lingkungan dengan berbagai Kebijakan 38
5.1.3. Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Maju Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis pada Potensi dan dan Keunggulan Lokal 39
5.1.4. Terwujudnya Peningkatan Pemerataan Prasarana dan Sarana Pembangunan 46
5.1.5. Terwujudnya Kehidupan yang Demokratis, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Berwibawa (*Clean Governance*) serta Terciptanya Kepastian Huku, Rasa Keadilan, Tertib/Taat Hukum 63
5.2. Arah Pembangunan Daerah 48
5.2.1. Mengembangkan dan Meningkatkan Kualitas SDM Berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ 48
5.2.2. Mengoptimalkan Pengelolaan SDA untuk Menjamin Kelanjutan Pembangunan dan Menjaga Keseimbangan Lingkungan 58
5.2.3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis pada Potensi dan Keunggulan Lokal 60
5.2.4. Mengembangkan dan Meningkatkan Pemerataan Prasarana dan Sarana Pembangunan 64
5.2.5. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 66

5.3. Sasaran Pokok 69
5.3.1. Arah Pembangunan Lima Tahun I (2005 – 2007) 69
5.3.2. Arah Pembangunan Lima Tahun II (2007 – 2012)..... 76
5.3.3. Arah Pembangunan Lima Tahun III (2012 – 2017)..... 83
5.3.4. Arah Pembangunan Lima Tahun IV (2017 – 2022) 90
5.3.5. Arah Pembangunan Lima Tahun V (2022 – 2025) 96
VI. KAIDAH PELAKSANAAN 100

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang :

a. bahwa Kabupaten Barito Kuala memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun guna mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah disepakati bersama sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat berjalan efisien, efektif dan berkelanjutan;
b. bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005–2025;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
dan
BUPATI BARITO KUALA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2005-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1) Program Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

(2) Rincian dari Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam arah kebijakan pembangunan daerah dan tertuang pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dituangkan dalam tahapan dan skala prioritas, yaitu RPJM Daerah Tahap I Tahun 2005 – 2007, RPJM Daerah Tahap II Tahun 2007 – 2012, RPJM Daerah Tahap III Tahun 2012 – 2017, RPJM Daerah Tahap IV Tahun 2017 – 2022, dan RPJM Daerah Tahap V Tahun 2022 – 2025.

(2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati.

(3) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dituangkan dalam tahapan dan skala prioritas, yaitu RPJM Daerah Tahap I Tahun 2005–2009, RPJM Daerah Tahap II Tahun 2010–2014, RPJM Daerah Tahap III Tahun 2015–2019, dan RPJM Daerah Tahap IV Tahun 2020–2024.

(4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.

(5) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2005-2025

Pasal 5

Sistematika Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN
   1.1. Latar Belakang;
      1.1.1. Sejarah Singkat Terbentuknya Kabupaten Barito Kuala;
      1.1.2. Pengertian dan Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
   1.2. Dasar Hukum Penyusunan;
   1.3. Hubungan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dengan Dokumen Perencanaan lainnya;
      1.3.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dengan Provinsi dan Nasional;
      1.3.2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
      1.3.3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang berlaku.
   1.4. Sistematika Penyusunan;
   1.5. Maksud dan Tujuan;

II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi;

2.1.1 Geografi

2.1.2 Demografi

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;

2.3. Aspek Pelayanan Umum;

2.3.1. Pendidikan;

2.3.2. Kesehatan;

2.4. Aspek Daya Saing Daerah;

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah;

2.4.2. Fasilitas wilayah/Infrastruktur;

2.4.3. Iklim Berinvestasi;

2.4.4. Sumberdaya Manusia;

III. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah;

3.2. 3.2. Isu Strategis;

IV. VISI DAN MISI DAERAH

4.1. Visi;

4.2. Misi;

V. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

5.1. Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

5.1.1. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM yang berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ;

5.1.2. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya untuk menjamin pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan dengan berbagai kebijakan;

5.1.3. Terwujudnya perekonomian daerah yang maju guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal;

5.1.4. Terwujudnya peningkatan pemerataan prasarana dan sarana pembangunan;

5.1.5. Terwujudnya kehidupan yang demokratis, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa (*clean governance*) serta terciptanya kepastian hukum, rasa keadilan, tertib/taat hukum;

5.2. Arah Pembangunan Daerah;

5.2.1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM berlandaskan IPTEK dan IMTAQ;

5.2.2. Mengoptimalkan pengelolaan SDA dan sumberdaya lainnya untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan;

5.2.3. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal;

5.2.4. Mengembangkan dan meningkatkan pemerataan prasarana dan sarana pembangunan;

5.2.5. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

5.3. Sasaran Pokok;

5.3.1. Arah Pembangunan Lima Tahun I (2005 – 2007)

5.3.2. Arah Pembangunan Lima Tahun II (2007 – 2012)

5.3.3. Arah Pembangunan Lima Tahun III (2012 – 2017)

5.3.4. Arah Pembangunan Lima Tahun IV (2017 – 2022)

5.3.5. Arah Pembangunan Lima Tahun IV (2022 – 2025)

VI. KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 6

Sistematika sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007-2012 masih tetap berlaku sampai dengan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahap selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Barito Kuala
pada tanggal 2012

BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Barito Kuala
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,

SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2012 NOMOR .....